



**RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVSU
TA. 2019**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	hal	i
BAB I PENDAHULUAN	hal	1
A. Dasar Hukum	hal	1
B. Gambaran Umum Daerah	hal	4
C. Kondisi Geografis Daerah	hal	6
1. Kondisi Geografis Daerah	hal	6
2. Topografi	hal	8
3. Geologi	hal	9
D. Gambaran Umum Demografis	hal	9
E. Kondisi Ekonomi	hal	16
1. Potensi Unggulan Daerah	hal	16
2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	hal	33
3. Geologi	hal	9
F. Indikator Kinerja Makro	hal	47
1. Indeks Pembangunan Manusia	hal	47
2. Angka Kemiskinan	hal	53
3. Angka Pengangguran	hal	55
4. Inflasi dan Perdagangan Luar Negeri	hal	57
5. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	hal	61
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)	hal	63
A. Visi Dan Misi Provinsi Sumatera Utara	hal	63
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	hal	66
C. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara	hal	77
BAB III URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	hal	115
A. Urusan wajib	hal	118
B. Urusan Pilihan	hal	149
C. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	hal	173

D. Urusan Pemerintahan Umum	hal	187
BAB IV REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019	hal	189
A. Prioritas Pembangunan Nasional	hal	189
BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	hal	210
A. Tugas Pembantuan Yang Diterima	hal	211
BAB VI TUGAS UMUM PEMERINTAHAN	hal	229
A. Kerjasama Antar Daerah	hal	230
B. Kerjasama Dengan Pihak Ketiga	hal	235
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah	hal	241
D. Pembinaan Batas Wilayah	hal	243
E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana	hal	250
F. Pengelolaan Kawasan Khusus	hal	255
G. Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	hal	261
BAB VII PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)	hal	265
A. Bidang Pendidikan	hal	265
B. Bidang Kesehatan	hal	266
C. Bidang Pekerjaan Umum	hal	269
D. Bidang Perumahan Rakyat	hal	270
E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	hal	272
F. Bidang Sosial	hal	274
BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	hal	276
A. Capaian Indikator Kinerja Utama	hal	277
B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	hal	278
C. Capaian Kinerja Tahun 2019	hal	281
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah	hal	316
BAB VI PENUTUP	hal	326

BAB I

PENDAHULUAN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 disusun dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana diamanatkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 pasal 23 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui publikasi media cetak dan/atau media elektronik, sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

A. DASAR HUKUM

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 23);
- 12) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 50);
- 13) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
- 14) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 10);
- 15) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 65);

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Sumatera Utara memiliki total luas 181.860,65 km², yang terdiri dari daratan 72.981,23 km² dan lautan 108.878,77 km². Luas wilayah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, wilayah terluas adalah Kabupaten Langkat dengan 6.262,00 km², atau sekitar 8,58% dari total luas Sumatera Utara, diikuti Kabupaten Mandailing Natal dengan 6.134,00 km² atau 8,40%, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 6.030,47 km² atau sekitar 8,26%, sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km² atau sekitar 0,04%.

Secara administratif wilayah Provinsi Sumatera terdiri dari 25 Kabupaten dan 8 Kota, 444 Kecamatan, 5.417 Desa dan 693 Kelurahan (BPS Provsu). Selanjutnya rincian luas wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel berikut :

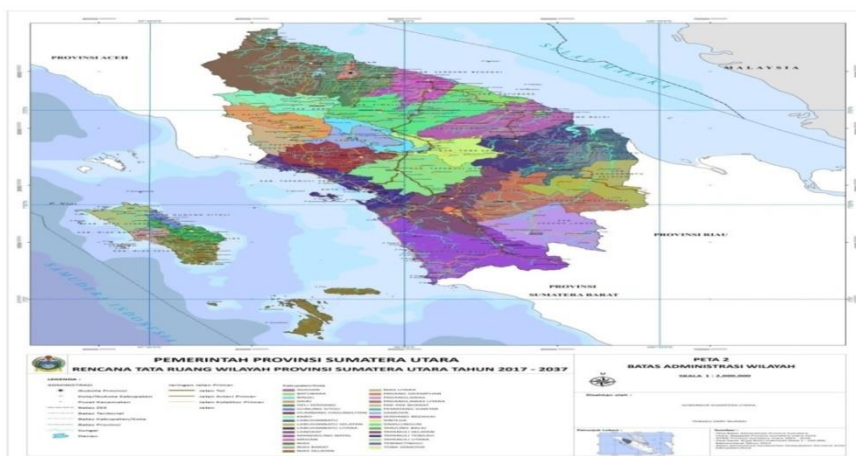
Tabel 1.1
Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
01. Nias	Gido	10	170	0	1.842,51
02. Mandailing Natal	Panyabungan	23	377	27	6.134,00
03. Tapanuli Selatan	Sipirok	14	211	37	6.030,47
04. Tapanuli Tengah	Pandan	20	159	56	2.188,00
05. Tapanuli Utara	Tarutung	15	241	11	3.791,64
06. Toba	Balige	16	231	13	2.328,89
07. Labuhanbatu	Rantau Prapat	9	75	23	2.156,02
08. Asahan	Kisaran	25	177	27	3.702,21
09. Simalungun	Pamatang Raya	32	386	27	4.369,00
10. D a i r i	Sidikalang	15	161	8	1.927,80
11. K a r o	Kabanjahe	17	259	10	2.127,00
12. Deli Serdang	Lubuk Pakam	22	380	14	2.241,68
13. Langkat	Stabat	23	240	37	6.262,00
14. Nias Selatan	Teluk Dalam	35	459	2	1.825,20
15. Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	10	153	1	2.335,33
16. Pakpak Bharat	Salak	8	52	0	1.218,30

KABUPATEN/KOTA	IBU KOTA	KEC	DESA	KEL	LUAS WILAYAH (Km2)
17. Samosir	Pangururan	9	128	6	2.069,05
18. Serdang Bedagai	Sei Rampah	17	237	6	1.900,22
19. Batu Bara	Limapuluh	7	141	10	922,20
20. Padang Lawas Utara	Gunung Tua	12	386	2	3.918,05
21. Padang Lawas	Sibuhuan	12	303	1	3.892,74
22. Labuhanbatu Selatan	Kota Pinang	5	52	2	3.596,00
23. Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	8	82	8	3.570,98
24. Nias Utara	Lotu	11	112	1	1.202,78
25. Nias Barat	Lahomi	8	105	0	473,73
26. Sibolga	Sibolga	4	0	17	41,31
27. Tanjungbalai	Tanjungbalai	6	0	31	107,83
28. Pematangsiantar	Pematangsiantar	8	0	53	55,66
29. Tebing Tinggi	Tebingtinggi	5	0	35	31,00
30. Medan	Medan	21	0	151	265,00
31. Binjai	Binjai	5	0	37	59,19
32. Padangsidimpuan	Padangsidimpuan	6	42	37	114,66
33. Gunungsitoli	Gunungsitoli	6	98	3	280,78
SUMATERA UTARA		444	5417	693	72.981,23

Sumber : Sumatera Utara Dalam Angka Tahun 2019 dan SUPAS

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi



Sumber : Perda No.2 Tahun 2017 tentang RTRW Provsu Tahun 2017-2037

Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Provinsi Aceh
- Sebelah Barat : Samudera Hindia
- Sebelah Selatan : Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat
- Sebelah Timur : Selat Malaka

C. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

1. Kondisi Geografis Daerah

a. Posisi Astronomis

Secara astronomis Provinsi Sumatera Utara berada pada posisi 1° - 4° Lintang Utara dan 96°-100° Bujur Timur.

b. Posisi Geostrategic

Secara regional Provinsi Sumatera Utara berada pada jalur strategis pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Provinsi Sumatera Utara memiliki garis pantai sepanjang 1.300 Km, garis Pantai Timur sepanjang 545 Km dan garis Pantai Barat sepanjang 375 Km, serta garis Pantai Pulau Nias sepanjang 380 Km. Terdapat 419 pulau di Sumatera Utara, dimana 237 pulau yang telah memiliki nama dan 182 pulau belum memiliki nama. Wilayah Pantai Timur Pulau Berhala sebagai pulau terluar yang berbatasan dengan selat Malaka dan wilayah Pantai Barat Pulau Wunga dan Pulau Simuk sebagai pulau terluar.

c. Kondisi/Kawasan

Provinsi Sumatera Utara terletak pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Provinsi Sumatera Utara memiliki hutan mangrove seluas 63.467,4 Ha dengan keadaan seluas 27.019,57 Ha berada

dalam kondisi baik dan 36.447,83 Ha dalam kondisi rusak yang tersebar di 6 Kabupaten (belum termasuk Nias). Selain hasil laut dan perikanan lainnya, kawasan ini memiliki potensi pariwisata bahari yang belum teridentifikasi seluruhnya. Oleh karena itu untuk kelestarian hutan mangrove dan terumbu karang maka perlu dilakukan upaya konservasi sehingga keanekaragaman hayati kawasan pesisir bisa dipertahankan.

Daerah pantai di kawasan Pantai Barat Sumatera Utara sangat bervariasi kondisi geografis yang terdiri dari daerah yang curam, berbatu dan di beberapa daerah terdapat pantai yang didominasi rawa. Kondisi pantai semacam ini juga banyak ditemukan di daerah Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga dan Mandailing Natal. Sedangkan Pantai Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh pantai berbatu dan berpasir, khususnya yang berhadapan langsung dengan Samudera Indonesia.

Kawasan pesisir barat Sumatera Utara memiliki ciri terdiri dari pulau-pulau kecil. Pantai barat ini juga memiliki hamparan hutan mangrove sekitar 14.270 Ha yang membujur dari pantai selatan Kabupaten Mandailing Natal sampai ke pantai selatan Kabupaten Tapanuli Tengah serta di daerah pulau-pulau di Kabupaten Nias dengan ketebalan antara 50-150 meter. Kawasan terumbu karang di Pantai Barat Sumatera Utara terdapat di tiga Kabupaten, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan yang tumbuh pada kedalaman 3-10 meter.

2. Topografi

Wilayah topografi Sumatera Utara terdiri dari daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi serta pegunungan Bukit Barisan yang membujur ditengah-tengah dari Utara ke Selatan. 65,51% dari total luas wilayah memiliki kemiringan tanah antara 0 – 12%, 8,64% wilayah memiliki kemiringan tanah antara 12 – 40% dan wilayah dengan kemiringan tanah diatas 40% adalah seluas 24,28%, sedangkan luas Wilayah Danau Toba adalah 112.920 Ha atau 1,57 % dari total seluruh wilayah.

Ketinggian lahan di Provinsi Sumatera Utara bervariasi mulai dari 0 – 2.200 m dpl. Berdasarkan ketinggian lahan tersebut, Provinsi Sumatera Utara terbagi atas 3 bagian yaitu bagian Timur dengan keadaan relatif datar, bagian tengah bergelombang sampai berbukit dan bagian Barat merupakan dataran bergelombang.

Wilayah Pantai Timur yang merupakan dataran rendah dengan keluasan 24.921,99 Km² atau 34,77% dari luas wilayah Sumatera Utara. Wilayah Pantai Timur adalah daerah yang subur dengan kelembaban tinggi dan curah hujan relatif tinggi. Banjir sering melanda wilayah tersebut akibat berkurangnya pelestarian hutan, erosi dan pendangkalan sungai. Pada musim kemarau terjadi kekurangan persediaan air disebabkan oleh kondisi hutan yang kritis.

Wilayah Pantai Barat merupakan dataran tinggi dengan luas 46.758,69 Km² atau 65,23% dari luas wilayah Sumatera Utara. Sebagian besar Wilayah Pantai Barat merupakan daerah pegunungan yang memiliki variasi dalam tingkat kesuburan tanah, iklim, topografi dan kontur tanah. Beberapa danau, sungai, air terjun dan gunung berapi dijumpai di wilayah ini serta sebagian wilayahnya tercatat sebagai daerah gempa tektonik dan vulkanik.

3. Geologi

Secara geologis, wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki struktur dan batuan yang kompleks dan telah beberapa kali mengalami tumbukan dari proses tektonik karena posisinya terletak pada pertemuan lempeng Euroasia di sebelah timur dan lempeng Australia di sebelah barat. Hal ini menyebabkan terbentuknya rangkaian jalur patahan, rekahan dan pelipatan disertai kegiatan vulkanik. Jalur patahan tersebut melewati jalur Sumatera Utara mulai dari segmen Alas-Karo dengan panjang kurang lebih 390 km yang merupakan sumber bencana alam geologi berupa pusat-pusat gempa di darat, tsunami dan pemicu terjadinya letusan gunung berapi dan tanah longsor. Jalur patahan (*subduction*) di Pantai Barat sepanjang kurang lebih 250 km merupakan pusat gempa di dasar laut.

Kondisi struktur geologi yang kompleks yang dicirikan oleh bentuk bentang alam perbukitan, terlipat dengan patahan selain merupakan jalur gempa juga potensial menimbulkan tanah longsor terhadap sekitar 40-50 % dari luas daerah Provinsi Sumatera Utara yang mencakup 18 wilayah kabupaten dan 1 kota (menurut keadaan tahun 2005) dan merupakan kawasan yang rentan gerakan tanah longsor.

D. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS

Sumatera Utara merupakan provinsi keempat terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Proyeksi penduduk Sumatera Utara pada tahun 2019 berdasarkan hasil pendataan Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) adalah 14.562.549 jiwa dengan penduduk laki-laki berjumlah 7.266.207 jiwa (49,90%) dan penduduk perempuan berjumlah 7.296.342 jiwa (50,10%) dengan rasio jenis kelamin (*sex ratio*) sebesar 99,59%.

Angka rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Sumatera Utara dapat dilihat berdasarkan jumlah penduduk per kelompok umur. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Sedangkan persentase rasio ketergantungan yang semakin rendah maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk belum produktif dan tidak lagi produktif. Berdasarkan Proyeksi hasil SP 2010 didapat rasio ketergantungan Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 55,51%, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 56 orang belum produktif dan orang tidak produktif lagi.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur
dan Jenis Kelamin Tahun 2019¹⁾

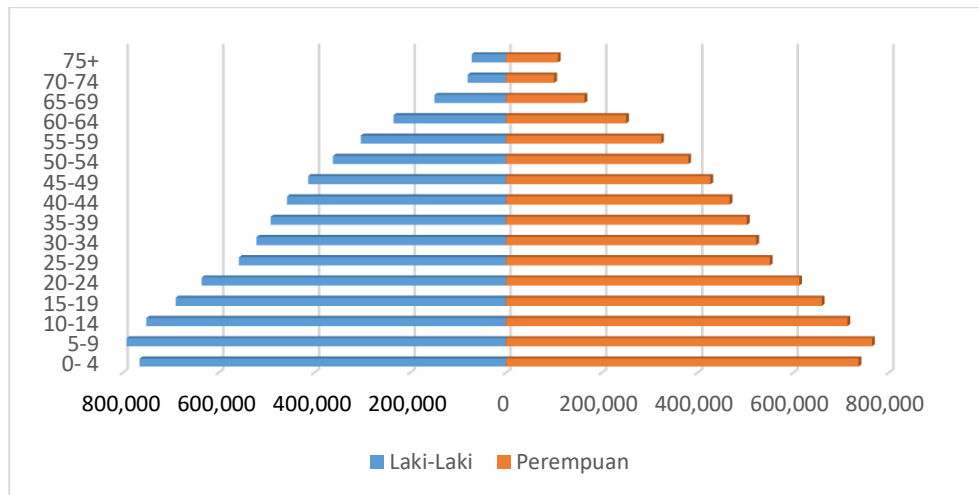
Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0- 4	764 534	737 311	1 501 845	103,69
5- 9	791 885	765 604	1 557 489	103,43
10-14	750 454	714 017	1 464 471	105,10
15-19	689 472	660 516	1 349 988	104,38
20-24	634 920	613 193	1 248 113	103,54
25-29	557 015	551 620	1 108 635	100,98
30-34	520 498	523 163	1 043 661	99,49
35-39	490 992	503 692	994 684	97,48
40-44	456 938	467 437	924 375	97,75
45-49	412 666	427 327	839 993	96,57
50-54	360 829	381 429	742 258	94,60
55-59	302 642	324 633	627 275	93,23
60-64	234 132	251 413	485 545	93,13

Golongan Umur	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65-69	148 844	164 512	313 356	90,48
70-74	79 255	101 385	180 640	78,17
75+	71 131	109 090	180 221	65,20
TOTAL	7 266 207	7 296 342	14 562 549	99,59

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Sensus Penduduk SP2010

Gambar 1.2
Jumlah Penduduk Sumatera Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2019¹⁾



Sebagian besar penduduk Provinsi Sumatera Utara berada di Kawasan Pantai Timur dengan jumlah penduduk mencapai 9.093.260 jiwa (62,44%), sedangkan pada Kawasan Dataran Tinggi sebanyak 2.674.231 jiwa (18,36%), dan Kawasan Pantai Barat (termasuk Pulau Nias) sebanyak 2.795.058 jiwa (19,19%). Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sumatera Utara berdasarkan proyeksi penduduk 2010-2035 mencapai 1,36% pertahun, lebih

tinggi dari laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000-2010, yang hanya mencapai 1,22% pertahun.

Jumlah penduduk terbesar berada di Medan yang mencapai 2.279.894 jiwa atau 15,66% dari total penduduk Sumatera Utara, disusul oleh Kabupaten Deli Serdang yang mencapai 2.195.709 jiwa (15,08%), Langkat 1.041.775 jiwa (7,15%), Simalungun 867.922 jiwa (5,96%), Asahan 729.795 jiwa (5,01%) dan Serdang Bedagai 616.396 jiwa (4,23%).

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin
Tahun 2019¹⁾

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Medan	1 125 267	1 154 627	2 279 894
2	Binjai	138 064	138 533	276 597
3	Pematangsiantar	124 533	130 784	255 317
4	Padangsidempuan	108 021	113 806	221 827
5	Tanjungbalai	88 181	87 042	175 223
6	Tebing Tinggi	81 281	83 121	164 402
7	Gunungsitoli	69 598	72 828	142 426
8	Sibolga	43 979	43 647	87 626
9	Deli Serdang	1 104 894	1 090 815	2 195 709
10	Langkat	524 481	517 294	1 041 775
11	Simalungun	432 425	435 497	867 922
12	Asahan	366 603	363 192	729 795
13	Serdang Bedagai	309 382	307 014	616 396
14	Labuhanbatu	249 722	244 456	494 178
15	Mandailing Natal	219 663	227 624	447 287
16	Batu Bara	209 639	206 854	416 493
17	Karo	206 395	209 483	415 878
18	Tapanuli Tengah	189 007	187 660	376 667
19	Labuhanbatu Utara	183 722	180 094	363 816
20	Labuhanbatu Selatan	172 877	166 105	338 982
21	Nias Selatan	158 673	161 229	319 902
22	Tapanuli Utara	149 205	152 584	301 789
23	Dairi	141 983	142 321	284 304

No	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
24	Tapanuli Selatan	140 134	141 797	281 931
25	Padang Lawas	140 916	140 323	281 239
26	Padang Lawas Utara	137 001	135 712	272 713
27	Humbang Hasundutan	94 517	95 669	190 186
28	Toba Samosir	91 237	92 475	183 712
29	Nias	69 753	73 566	143 319
30	Nias Utara	68 310	69 657	137 967
31	Samosir	62 731	63 457	126 188
32	Nias Barat	39 314	42 840	82 154
33	Pakpak Bharat	24 699	24 236	48 935
Sumatera Utara		7 266 207	7 296 342	14 562 549

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Sensus Penduduk SP2010

Jumlah penduduk terkecil berada di Kabupaten Pakpak Bharat yaitu 48.935 jiwa (0,34%), Nias Barat 82.154 jiwa (0,60 %), Sibolga 87.626 jiwa (0,60%), Samosir 126.188 jiwa (0,87%), Nias Utara 137.967 jiwa (0,95%) dan Kota Gunungsitoli 142.426 jiwa (0,98%). Sedangkan sebaran penduduk di kabupaten/kota lainnya masing-masing dibawah 4%.

Tabel 1.4
Jumlah Penduduk, Kepadatan, dan Distribusi Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2019¹⁾

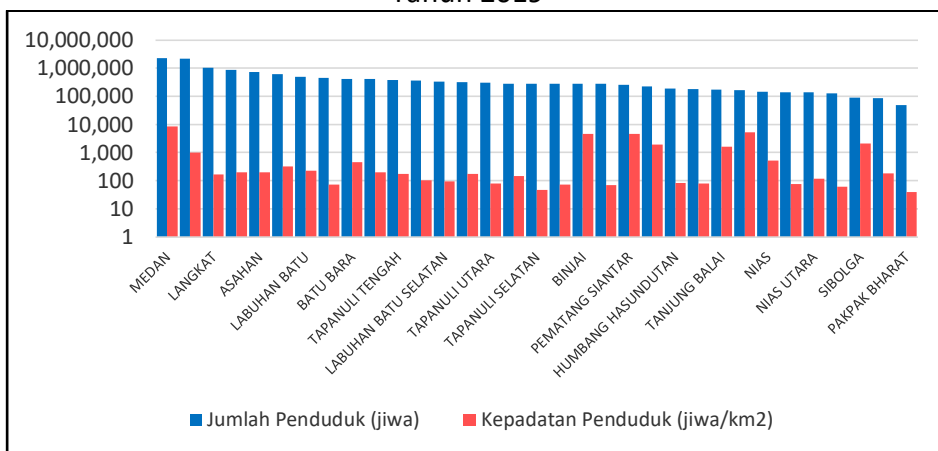
No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Medan	2 279 894	8 603	15,66
2	Binjai	276 597	4 673	1,90
3	Pematangsiantar	255 317	4 587	1,75
4	Padangsidempuan	221 827	1 935	1,52
5	Tanjungbalai	175 223	1 625	1,20
6	Tebing Tinggi	164 402	5 303	1,13
7	Gunungsitoli	142 426	507	0,98
8	Sibolga	87 626	2 121	0,60
9	Deli Serdang	2 195 709	979	15,08

No	Kabupaten/Kota	Jlh Penduduk (org)	Kepadatan (jiwa/km ²)	Distribusi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Langkat	1 041 775	166	7,15
11	Simalungun	867 922	199	5,96
12	Asahan	729 795	197	5,01
13	Serdang Bedagai	616 396	324	4,23
14	Labuhanbatu	494 178	229	3,39
15	Mandailing Natal	447 287	73	3,07
16	Batu Bara	416 493	452	2,86
17	Karo	415 878	196	2,86
18	Labuhanbatu Utara	376 667	172	2,59
19	Tapanuli Tengah	363 816	102	2,50
20	Labuhanbatu Selatan	338 982	94	2,33
21	Nias Selatan	319 902	175	2,20
22	Tapanuli Utara	301 789	80	2,07
23	Dairi	284 304	147	1,95
24	Tapanuli Selatan	281 931	47	1,94
25	Padang Lawas	281 239	72	1,93
26	Padang Lawas Utara	272 713	70	1,87
27	Humbang Hasundutan	190 186	81	1,31
28	Toba Samosir	183 712	79	1,26
29	Nias	138 771	75	0,95
30	Nias Utara	137 967	115	0,95
31	Samosir	126 188	61	0,87
32	Nias Barat	86 702	183	0,60
33	Pakpak Bharat	48 935	40	0,34
Sumatera Utara		14 562 549	200	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ¹⁾ Angka Proyeksi Sensus Penduduk SP2010

Gambar 1.3
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2019



Dengan luas wilayah daratan yang mencapai 72.981,23 km², kepadatan penduduk Sumatera Utara pada tahun 2019 mencapai 200 jiwa per km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kota Medan berjumlah 8.603 jiwa per km², diikuti oleh Kota Tebing Tinggi berjumlah 5.303 jiwa per km², Kota Binjai berjumlah 4.673 jiwa per km², Kota Pematangsiantar berjumlah 4.587 jiwa per km², Kota Sibolga berjumlah 2.121 jiwa per km², Kota Padangsidimpuan berjumlah 1.935 jiwa per km² dan Kota Tanjungbalai berjumlah 1.625 jiwa per km².

Kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Pakpak Bharat berjumlah 40 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 47 jiwa per km², Kabupaten Samosir berjumlah 61 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas Utara berjumlah 70 jiwa per km², Kabupaten Padang Lawas berjumlah 72 jiwa per km², Kabupaten Mandailing Natal berjumlah 73 jiwa per km², Kabupaten Nias berjumlah 75 jiwa per km², Kabupaten Toba Samosir berjumlah

79 jiwa per km², Kabupaten Tapanuli Utara berjumlah 80 jiwa per km², Kabupaten Humbang Hasundutan berjumlah 81 jiwa per km², dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 94 jiwa per km².

E. KONDISI EKONOMI

1. Potensi Unggulan Daerah

a. Potensi Sumber Daya Air

Di Provinsi Sumatera Utara terdapat lahan rawa dengan luas baku 1.012.005 Ha yang letaknya tersebar di Pantai Timur dan Pantai Barat. Dari luas tersebut, yang dapat dimanfaatkan/dikembangkan untuk lahan pertanian dan pertambakan mencapai 325.710 Ha (32,18%) namun dalam pengembangannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat dijadikan areal pertanian. Lahan rawa yang potensial untuk pertanian seluas 189.426 Ha, dan yang sudah mempunyai tata air jaringan rawa (sudah fungsional) seluas 34.923 Ha (3,45%).

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi air tanah dimana enam diantaranya dari cekungan air bawah permukaan berada pada lintas provinsi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 1.5
Cekungan Air Tanah (CAT)

No	Nama CAT	Luas CAT (Km ²)	Lokasi
1	Langsa	853	Kab. Langkat dan Aceh
2	Medan	19.786	Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Pematangsiantar, Kab. Langkat, Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Labuhanbatu, dan Kab. Labuhanbatu Utara.
3	Kutacane	351	Kab. Karo dan Aceh
4	Sibulus Salam	3.632	Kab. Tapanuli Tengah dan Aceh
5	Sidikalang	2.438	Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, dan Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Pakpak Bharat
6	Samosir	648	Kab. Samosir
7	Porsea-Prapat	483	Kab. Toba Samosir, Simalungun
8	Tarutung	875	Kab. Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan dan Toba Samosir
9	Onolimbu/ Gunungsitoli	42	Kota Gunungsitoli, Kab. Nias, dan Kab. Nias Selatan
10	Lahewa	20	Kab. Nias Utara
11	Sirombu	17	Kab. Nias Utara dan Kab. Nias Barat
12	Kuala Batangtoru	795	Kab. Tapanuli Tengah dan Kab. Tapanuli Selatan, Padangsidempuan
13	Teluk Durian/ Pekanbaru	21.799	Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Padang Lawas, dan Kab. Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan dan Provinsi Riau
14	Banjarampa	211	Kab. Mandailing Natal dan Kab. Tapsel
15	Panyabungan	242	Kab. Mandailing Natal, Tapanuli Selatan
16	Pasaribuhuan	225	Kab. Padang Lawas Tapanuli Selatan
17	Padangsidempuan	240	Kota Padangsidempuan dan Kab. Tapsel
18	Natal-Ujunggading	2.825	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat

No	Nama CAT	Luas CAT (Km ²)	Lokasi
19	Lubuk Sikaping	217	Kab. Mandailing Natal dan Provinsi Sumatera Barat

Sumber : Perda Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

b. Potensi Pengembangan Wilayah

Sektor pertanian mencatat pertumbuhan dengan laju positif dalam pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Sektor pertanian sendiri pada kenyataannya didukung oleh pertanian rakyat. Namun aktifitas sektor pertanian rakyat belum mampu menggerakkan proses pertambahan nilai untuk memperluas sumber pendapatan masyarakat secara lokal, sehingga masalah yang dihadapi adalah kondisi tak berkaitan (mismatch) antara sektor tersebut dengan sektor sekunder yang cenderung memperoleh bahan bakunya dari luar Sumatera Utara. Kebutuhan yang utama adalah terbentuknya tata kaitan (linkage) antara sektor pertanian rakyat dengan sektor sekunder (agroindustri) dan tersier (agrobisnis) yang saling menguntungkan. Sektor ekonomi rakyat memperlihatkan kondisi bahwa komoditi perkebunan rakyat telah mengambil peran yang sangat penting, dimana untuk luas dan produksi beberapa komoditi penting bahkan melampaui perkebunan milik PTP/PNP maupun swasta.

Potensi sumber daya alam Provinsi Sumatera Utara cukup berlimpah, diantaranya tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan dan pariwisata. Penggunaan lahan Provinsi Sumatera Utara didominasi oleh kegiatan perkebunan dan hutan. Penggunaan lahan untuk perkebunan adalah seluas

2.946.512 Ha atau sekitar 41%. Sedangkan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 579/Menhut-II/2014 tentang adalah 3.055.795.02 Ha atau 42.90% dari luas total wilayah.

Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian terbesar berada di wilayah Pantai Timur, yaitu meliputi areal seluas 57% dari luas areal pertanian Sumatera Utara. Sebagian besar lahan hutan berada di wilayah Pantai Barat, yaitu seluas 69% dari luas hutan di Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pertanian mendominasi wilayah Pantai Timur, sedangkan wilayah Pantai Barat didominasi oleh kegiatan pertanian dan hutan. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan non pertanian, seperti : industri, transportasi dan pertambangan tidak terlalu besar mengubah pemanfaatan ruang yang ada.

Potensi pertanian tanaman pangan dan hortikultura Provinsi Sumatera Utara diantaranya adalah sayuran, jeruk dan buah-buahan yang sebagian besar telah dipasarkan dengan baik dan sudah diperdagangkan ke provinsi lain dan di ekspor keluar negeri. Selain itu, komoditi pertanian dataran tinggi Bukit Barisan Sumatera Utara, seperti jagung, kentang, kopi, ikan mas, sapi, bawang merah dan sebagainya memiliki potensi untuk dikembangkan.

Pengembangan perikanan laut wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar, dengan luas laut Sumatera Utara 110.000 km², panjang pantai 1.300 km (Pantai Timur 545 km dan Pantai Barat 375 km serta Pulau Nias 380 km), Jumlah pulau sebanyak 213 pulau sangat berpotensi untuk dikembangkan. Hal ini seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia dan dunia sehingga

akan meningkatkan permintaan terhadap hasil kelautan dan perikanan.

Potensi perkebunan di Sumatera Utara untuk 22 komoditi diantaranya kelapa sawit, karet, kopi, kakao, kelapa dan tembakau. Produksi tanaman perkebunan \pm 22.585.403,86 ton dengan luas areal perkebunan adalah 2.150.651,76 ha atau 11,66% dari luas Provinsi Sumatera Utara atau 29,15% dari total daratan Provinsi Sumatera Utara.

Peternakan di Sumatera Utara sangat potensial untuk pengembangan sapi potong, sapi perah, Pengembangan kerbau, ternak kuda dan ternak hewan kecil seperti kambing dan domba. Pengembangan ternak unggas adalah seperti ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan ternak itik.

Provinsi Sumatera Utara memiliki potensi didalam pengembangan industri pertambangan dan energi. Potensi bahan tambang di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang panas bumi, tambang minyak bumi, tambang gambut, tambang batu bara, tambang mineral dan bahan galian air tanah. Potensi panas bumi sebagai energi alternatif juga dimiliki oleh Provinsi Sumatera Utara yang tersebar pada beberapa tempat antara lain di Gunung Sibayak Kecamatan Tigapanah di Kabupaten Karo, Kecamatan Sipirok di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kecamatan Pahae Jae, Sipoholon, Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara. Hingga saat ini, potensi panas bumi tersebut masih dalam tahap eksplorasi. Provinsi Sumatera Utara memiliki indikasi kandungan minyak pada 2 tempat yaitu di Pangkalan Susu Kabupaten Langkat dengan cadangan sebesar 15 MMSTB dengan analisa kimia sebesar 15 MMSTB dan di Gunungsitoli, Kabupaten Nias.

Gambut merupakan salah satu sumber energi yang banyak terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Selain sebagai sumber energi, gambut juga dapat digunakan sebagai media semai.

Selanjutnya potensi batu bara terdapat di 15 titik di Sumatera Utara, seperti yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.6
Sebaran Potensi Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
1	Desa Rantau Panjang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal		Penyelidikan Pendahuluan	
2	Desa Pulaupadang Kec. Lingga Bayu Kab. Mandailing Natal	00o31'44" LU 99o16'33" BT	Penyelidikan Pendahuluan	
3	Desa Pargarutan Kec. Padangsidempuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan		Eksplorasi Pendahuluan	1.000.000 ton
4	Desa Ampolu Kec. Padangsidempuan Timur, Kab. Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
5	Desa Jonggoljae Kec. Arse Kab. Tapanuli Selatan		Penyelidikan Pendahuluan	
6	Kec. Sibolga Kab. Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	-
7	Desa Hudopa Nauli Kec. Kolang Kab. Tapanuli Tengah		Penyelidikan Pendahuluan	
8	Desa Laudamak Kec. Bahorok Kab. Langkat	03o28'10,5" LU 98o08'37,2" BT	Penyelidikan Pendahuluan	100.000 ton
9	Desa Tangkahan Kec. Batangserangan Kab. Langkat	03o42'06,3" LU 98o03'22,11" BT	Penyelidikan Pendahuluan	150.000 ton
10	Kec. Besitang Kab. Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
11	Kec. Seilepan Kab. Langkat		Penyelidikan Pendahuluan	
12	Desa Tanjungberingin Kec. Kualuhhulu Kab. Labuhan Batu		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
13	Desa Hilimbowo Kare Kec. Alasa Kab. Nias		Eksplorasi Pendahuluan	19.200.000 ton

No	Lokasi	Koordinat	Status	Cadangan
14	Desa Nazalou Alo'oa, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton
15	Desa Onozitoli Sifaoro'ase Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli		Penyelidikan Pendahuluan	1.000.000 ton

Sumber : Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

Bahan tambang mineral di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari bahan tambang mineral radio aktif, mineral logam, mineral bukan logam dan pertambangan batuan. Bahan tambang mineral logam di Sumatera Utara terdiri dari 21 jenis dan bahan tambang mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Sumatera Utara, terdiri dari 28 jenis yang tersebar pada kabupaten-kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. Bahan galian tersebut adalah bentonit, batu gamping/batu kapur, zeolit, dolomit, marmer, travertin, diatomea, trass, andesit, granit, felspar, kaolin, batu mulia, batu apung, perlit, kalsit, kuarsa, fosfat, pasir kuarsa, kuarsit, grafit, mika, oker, talk, serpentin, lempung, pasir dan batu (sirtu), pasir laut, arahan lokasi kegiatan pertambangan tersebar di seluruh kabupaten. Potensi radioaktif di Provinsi Sumatera Utara terdapat di Desa Aekhabil Kecamatan Sibolga Kota Sibolga, yakni berupa Radium (Ra).

Tabel 1.7
Sebaran Potensi Bahan Tambang Mineral Logam
di Provinsi Sumatera Utara

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
1	Antimoni	Gunungsitoli, Kab. Nias Batangasih Batanglubuk, Kab. Mandailing Natal Kecamatan Sosa, Kab. Tapanuli Selatan Desa Bangko, Kecamatan Batangnata, Kab. Mandailing Natal
2	Arsen	Gunung Marisi, Siayu, Batangasih, Batanglubuk, Kab. Madina Kotapinang, Kab. Labuhanbatu Kecamatan Sosa, Kab. Tapanuli Selatan

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
3	Barit	Kecamatan Porsea, Kab. Toba Samosir Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga
4	Bauksit	Kotapinang, Kab. Labuhanbatu
5	Belerang	Desa Sibanggortonga Kecamatan Kotanopan Kab. Madina Kecamatan Panyabungan, Kab. Madina Desa Namorailangit, Kecamatan Pahaejulu, Kab. Tapanuli Utara Desa Situmeang, Kecamatan Sipoholon Kab. Tapanuli Utara Gunung Pusukbuhit, Kecamatan Pangururan Kab. Samosir Desa Banuaji, Kecamatan Adiankoting Kab. Tapanuli Utara Gunung Sibayak, Kecamatan Simpangempat Kab. Karo Gunung Sinabung, Kecamatan Payung Kab. Karo
6	Besi	Sebelah barat Pulau Nias, Kabupaten Nias Aeksorik, Aekhorsik, Siayu, Kecamatan Kotnopan Kab. Madina
7	Bismut	Batanggadis, Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal Pulau Samosir, Kab. Samosir
8	Kromium	Batangnatal, Kecamatan Batangnatal Kab. Mandailing Natal Kecamatan Natal, Kab. Mandailing Natal
9	Emas	Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal Desa Sinunukan, Desa Muarasoma, Kec. Batangnatal Kab. Mandailing Natal Desa Sikarakara, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal Kecamatan Sosa, Kab. Tapanuli Selatan Desa Sikuikkuik, Kec. Padangsidempuan Barat, Kab. Tapsel Gunungmeriah, Kecamatan Gunungmeriah Kab. Deli Serdang Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kab. Dairi Kecamatan Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan Desa Toralaulu Kecamatan Batangtoru, Kab. Tapanuli Selatan Dolok Pinapan, Kecamatan Onanganjang Kab. Humbang Hasundutan Kecamatan Bohorok, Kab. Langkat
10	Perak	Desa Pagargunung, Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal Desa Batahan, Kecamatan Batangnatal Kab. Mandailing Natal Kecamatan Sosa, Kab. Tapanuli Selatan
11	Tembaga	Batang Gadis, Aek Korsik, Aek Sorik, Aek Kulbung Nagodang, Batanglobung

No	Bahan Galian	Sebaran Lokasi
		Kecamatan Batangnatal Kab. Mandailing Natal Pagargunung, Patahajang, Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal Desa Aekhabil, Kec Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Dolokpinapan, Kecamatan Onanganjang Kab. Humbang Hasundutan Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kab. Dairi
12	Florit	Rantauprapat Kab. Labuhanbatu
13	Mangan	Desa Simpanggambir, Kecamatan Lingga Bayu Kab. Madina Desa Natal, Kecamatan Natal Kab. Mandailing Natal
14	Merkuri	Seisampali, Kecamatan Percut Seituan Kab. Deli Serdang
15	Molibdenum	Aek Kolbungnagodang, Kecamatan Kotanopan Kab. Madina
16	Niobium	Aek Habil, Kecamatan Sibolga Kab. Tapanuli Tengah
17	Platina	Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal
18	Tellurium	Bukit Piongggu, Kecamatan Kotanopan Kab. Mandailing Natal
19	Seng	Aektambang, Batanggadis, Batanglobung Kec. Batangnatal Kab. Madina Hutabargotjulu, Aeksorik, Pagargunung, Patahajang, Malilir, Bukit Piongggu, Gunungmarisi Kecamatan Kotanopan Kab. Madina Desa Parombunan, Kecamatan Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Desa Simangambat, Kecamatan Saipardolokhole Kab. Tapsel Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kab. Dairi Kecamatan Sosa Kab. Tapanuli Selatan
20	Timbal	Kecamatan Gunungsitoli Kabupaten Nias Batanggadis, Batanglobung, Aekhorskik Kec. Batangnatal Kab. Madina Desa Pagargunung, Patahajang, Gunungmarisi Bukit Piongggu, Kecamatan Kotanopan Kab. Madina Aekhabil, Kecamatan Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Kecamatan Pangaribuan Kab. Tapanuli Utara Desa Sopokomil, Kecamatan Silimapunggapungga Kab. Dairi Kecamatan Sosa Kab. Tapanuli Selatan
21	Wolfram	Aekhabil Kecamatan Sibolga Kab. Tapanuli Tengah Desa hatapang Kecamatan Na IX-X Kab. Labuhanbatu

Sumber: Perda No. 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara 2017-2037

c. Potensi Perikanan dan Kelautan

Potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di kawasan Pantai Barat antara lain Kabupaten Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah, Nias dan Nias Selatan, Kota Sibolga, dan Kota Padangsidimpuan dengan hasil mencapai 1.076.960 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, teri dan ikan hias (tingkat pemanfaatan baru sekitar 8,79%). Budi daya kelautan antara lain adalah teripang, rumput laut serta potensi terumbu karang.

Potensi SDI di Kawasan Pantai Timur yang meliputi Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan, Asahan, Tanjungbalai, Batu Bara, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Langkat dan Kota Medan, mencapai 276.030 ton/tahun dengan potensi jenis ikan unggulan di laut pesisir seperti, tuna, tongkol, cakalang, kerapu, kakap, kembung, tenggiri, baronang, japuh, biji nangka, senangin, teri dan pari (tingkat pemanfaatan baru sekitar 90,75%). Sementara Potensi SDI di Bagian Tengah yang meliputi Tapanuli Utara, Toba Samosir, Dairi, Pakpak Bharat, Karo, Simalungun, Samosir, Humbang Hasundutan, Pematangsiantar, Tebing Tinggi, Binjai, memiliki potensi jenis ikan unggulan seperti ikan mas, nila, mujair, gurame, lele dumbo dan udang galah.

d. Potensi Pariwisata

Sumatera Utara memiliki berbagai tempat pariwisata yang patut dikunjungi para wisatawan, dan banyak hal yang dapat dinikmati oleh para wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara dengan mengandalkan segala potensi yang ada di Sumatera Utara.

Berdasarkan jenis wisata yang dapat dikembangkan di Sumatera Utara antara lain wisata alam, wisata kebudayaan, dan wisata minat khusus.

Wisata Alam

Wisata alam merupakan jenis wisata yang mengandalkan daya tarik keindahan bentukan alam, berupa pantai, laut, danau, pegunungan, flora, fauna, dan lain sebagainya. Provinsi Sumatera Utara memiliki banyak objek wisata alam yang menjadi andalan dalam menarik wisatawan, diantaranya adalah Danau Toba.

Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang 100 kilometer dan lebar 30 kilometer. Di tengah danau ini terdapat sebuah pulau vulkanik bernama Pulau Samosir dan disekeliling pantai kawasan Danau Toba terdapat air terjun (Sipiso-piso), pantai tepi danau dan pemukiman tradisional yang beragam termasuk Pantai Haranggaol Kabupaten Simalungun, serta arahan ke depan Kawasan Danau Toba sebagai Taman Bumi (Geopark) yang direncanakan dengan titik pusat di Kecamatan Sianjur Mula-mula Kabupaten Samosir; Pemandian air panas pangururan, Pusuk Buhit, Danau Sidihoni, Tomok, Tuktuk, Aek Sipitudai, Kebun Raya Simanindo, Taman Bumi di Kecamatan Sianjur Mula-mula di Kabupaten Samosir; Brastagi, air terjun Sipiso-piso, pemandian air panas Rajaberne, Taman Hutan Rakyat Bukit Barisan, Kawasan Wisata Alam di Kecamatan Merek, Kabupaten Karo; Paroppo di Kabupaten Dairi; Pegunungan di Kabupaten Pakpak Barat; Parapat, Haranggaol, Salbe, Silau Ulu, Nagori Sibaganding Kecamatan Girsang, Nagori Sinar Naga Mariah Kecamatan Pamatang Silimakuta, Dolok Simarsolpah Kecamatan Raya Kahean, Dataran Tinggi Simarjarunjung-Tanjung Unta di Kecamatan Dolok

Pardamean, dan Air Panas Tinggi Raja di Kecamatan Purba di Kabupaten Simalungun; Tangga Seribu, Air Terjun, Desa Sipinsur Paranginan di Kabupaten Humbang Hasundutan; Ajibata, Agrowisata Rohani di Desa Lumban Rang Kecamatan Lumban Julu, Dolok Tolong, Balige, Silintong di Kabupaten Toba Samosir; Air Panas Sipoholon, Muara, Hutan Rakyat Bukit Barisan di Kabupaten Tapanuli Utara; Danau Siombak Kota Medan; Pantai Klang, Pantai Cermin, Pulau Berhala di Kabupaten Serdang Bedagai; Pantai Perupuk, Pantai Sejarah, di Kabupaten Batubara; Sibolangit, Pulau Siba Kecamatan Hamparan Perak, di Kabupaten Deli Serdang; Bahorok, Bukit Lawang di Kabupaten Langkat; Lagundri, Sorake, Pantai Moale, Pulau Pulau Batu, di Kabupaten Nias Selatan; Air Panas Bombo Aukhu, Pantai Bozihona dan Kawasan Onolimbu, di Kabupaten Nias; Pulau Asu dan Kepulauan Hinako, di Kabupaten Nias Barat; Air Terjun dan Pantai Lahewa di Kabupaten Nias Utara; Pulau Mursala, Pulau Pandan, Pulau Poncan di Kabupaten Tapanuli Tengah; Pantai Natal, Mandailing Natal; dan Danau Siais di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wisata Kebudayaan

Wisata kebudayaan merupakan jenis wisata dengan daya tarik budaya berupa peninggalan jaman dahulu seperti bangunan dan kawasan permukiman yang masih memelihara tradisi. Sumatera Utara memiliki beberapa objek wisata budaya diantaranya adalah: Istana kerajaan dan rumah kediaman Istana Maimun, Mesjid Raya, Mesjid Osmani, Kawasan Kesawan, Kediaman Chong A Fie, Rumah Dinas Walikota dan Gedung Pusat AVROS/BKS PPS, situs bersejarah kota Cina di Kota Medan; Stasiun Kereta Api Binjai; Kawasan situs bersejarah religi Islam di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah; Kawasan situs bersejarah kota Rantang di Kabupaten Deli

Serdang; Istana Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan; Peninggalan Sultan Labuhan di Kabupaten Labuhanbatu Utara; Peninggalan situs Candi/Biara di Kabupaten Padanglawas, Padanglawas Utara dan Mandailing Natal; Situs Benteng Portugis, Gua Jepang dan Gua Portugis di Kabupaten Mandailing Natal; Bangunan Cagar Budaya di Kota Sibolga; Makam Raja Simalungun Pematang Purba, Situs Batu Gajah di Kabupaten Simalungun; Makam Nommensen di Kabupaten Tapanuli Utara; Makam Sisingamangaraja XII, Rumah Bolon di Kabupaten Toba Samosir; Istana Sisimangaraja di Bakkara, tempat gugurnya Sisingamangaraja XII Desa Sionom Hudon di Kabupaten Humbang Hasundutan; Batu Hagon, Makam Sidabutar Tomok, Makam Sialagan Ambarita, Rumah Tradisionil Simanindo, Perkampungan Tua Suku Batak Harian Boho di Kabupaten Samosir; Situs Batu Sumbang, Batu Mejan di Kabupaten Dairi; Rumah Tradisionil di Kabupaten Phakpak Barat; Pemukiman Tradisional Desa Lingga, Desa Dokan, Peceren, Perkampungan Tradisionil di Kabupaten Karo; Istana Lima Laras, Meriam Kuno di Kabupaten Batu Bara; Situs Istana Kota Galuh di Kabupaten Serdang Bedagai; Gua Kemangdi Kabupaten Deli Serdang; Mesjid Azizi, Rumah Peninggalan Sultan Siak, Situs Komplek Istana Sultan Aziz di Kabupaten Langkat; Makam bersejarah Nias di Desa Ono Namolo I Lot dan Peninggalan Megalit di Kota Gunungsitoli; Peninggalan Megalit Kecamatan Gomo, Kampung Tradisionil Bawomatoluwo, Silima Ewali Majingo di Kabupaten Nias Selatan; Peninggalan Megalit Kecamatan Idanogawo, Gido dan Sogae'adu di Kabupaten Nias; Peninggalan Megalit dan Rumah Adat Tradisional Kecamatan Mandrehe dan Lahomi di Kabupaten Nias Barat.

Wisata Minat Khusus

Wisata minat khusus merupakan wisata dengan daya tarik aktivitas tertentu seperti wisata kuliner, pendidikan, belanja, konvensi dan lain sebagainya. Di wilayah Provinsi Sumatera Utara wisata minat khusus antara lain : Museum dan Kebun Binatang di Kota Medan dan Kota Pematangsiantar; Arung Jeram di Sei Asahan - Tobasa dan Sei Binge, Sei Wampu di Langkat; Olahraga Air di Sorake, Lagundri, Sigolong Golong, Teluk Dalam, Wisata menyelam di Perairan Pulau Pulau Batu di Nias Selatan Olahraga Air di Pulau Asu, Nias Barat Olah Raga Paralayang di Sitopshi; Wisata Rohani di Salib Kasih di Kabupaten Tapanuli Utara; Taman Wisata Iman di Kabupaten Dairi; Kawasan Rekreasi Pantai di Kecamatan Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai; Rekreasi Pegunungan dan Taman Hiburan di Sibolangit, di Kabupaten Deli Serdang; Museum pusaka Nias di Kota Gunungsitoli; Museum sejarah Batak di Balige, Kabupaten Toba Samosir.

e. Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara

Kawasan Strategis Nasional yang ditetapkan pada wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 1.8
Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara

No	Kawasan Strategis Nasional	Kode Tahapan dan Tipe Pengembangan
1	Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro)	I/A/1
2	Pulau Berhala Kabupaten Serdang Bedagai di Kawasan Perbatasan laut Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara India/Thailand/Malaysia	I/E/2
3	Kawasan Danau Toba dan sekitarnya	I/B/1

Sumber: PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo bahwa Kawasan Perkotaan Mebidangro merupakan satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Medan sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Binjai di Kota Binjai, Kawasan Perkotaan Hamparan Perak, Kawasan Perkotaan Sunggal, Kawasan Perkotaan Tanjung Morawa, Kawasan Perkotaan Percut Sei Tuan, Kawasan Perkotaan Pancur Batu, Kawasan Perkotaan Lubuk Pakam, dan Kawasan Perkotaan Galang di Kabupaten Deli Serdang, serta Kawasan Perkotaan Berastagi di Kabupaten Karo, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan.

Pulau Berhala, merupakan pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara dari 34 pulau kecil terluar di Pulau Sumatera. Pulau Berhala ditetapkan sebagai bagian dari kawasan perbatasan negara sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara yang berbatasan dengan Negara India, Negara Thailand, Negara Malaysia, Negara Singapura, dan Negara Vietnam sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera. Namun selain Pulau Berhala, masih ada 2 pulau kecil terluar di Provinsi Sumatera Utara yang belum termuat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 yaitu Pulau Simuk dan Pulau Wunga.

Untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan perekonomian nasional, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei telah ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Utara sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus Sei Mangkei. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei memiliki luas 2.002,77 ha yang terletak di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

Provinsi Sumatera Utara juga menetapkan kawasan strategis provinsi, yang merupakan bagian wilayah provinsi dan penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting, baik dibidang ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan skala provinsi. Kawasan strategis provinsi berfungsi :

- 1) Untuk memwadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang;
- 2) Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah provinsi; dan
- 3) Sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Kawasan strategis Provinsi Sumatera Utara ditetapkan berdasarkan kepentingan :

- 1) Pertumbuhan ekonomi :
Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
 - a. Kawasan agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan, meliputi sentra produksi :
 - Merek, Kabupaten Karo;
 - Siborong borong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan;
 - Lumban Julu, Kabupaten Toba Samosir;

- Harian, Kabupaten Samosir;
- Silimakuta, Kabupaten Simalungun;
- Sitinjo, Kabupaten Dairi;
- Siempat Rube, Kabupaten Pakpak Bharat; dan
- Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar
- b. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batu Bara – Asahan meliputi :
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Tanjungbalai – Asahan;
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Simalungun – Batubara;
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Khusus Sei Mangke.
- c. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuhanbatu dan sekitarnya.
- d. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Pantai Barat dan sekitarnya meliputi :
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Labuan Angin – Sibolga;
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mandailing Natal – Tapanuli Selatan;
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Perkotaan Padangsidimpuan dan sekitarnya.
- e. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Kepulauan Nias.

2) Sosial dan Budaya :

Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- a. Kawasan situs dan bangunan bersejarah di kawasan perkotaan Medan dan Deli Serdang, meliputi :

- Situs dan peninggalan bersejarah di Kota Cina di Kota Medan dan Kota Rantang di Kabupaten Deli Serdang;
 - Bangunan bersejarah di Koridor Kota Lama Belawan dan Kota Lama Kesawan di Kota Medan;
 - Bangunan bersejarah budaya Kesultanan Deli di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang.
- b. Kawasan religi dan situs candi/Biara di Kabupaten Padanglawas dan Padang Lawas Utara;
 - c. Kawasan Tradisional Bawomataluo Kabupaten Nias Selatan dan sekitarnya;
 - d. Kawasan religi dan situs bersejarah di Barus Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - e. Kawasan religi dan situs bersejarah suku Batak di Pusuk Buhit, Kabupaten Samosir.
- 3) Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup :
- Sebaran kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
- a. Kawasan Ekosistem Leuser dan Bahorok;
 - b. Kawasan Konservasi Hutan Batang Toru; dan
 - c. Kawasan Konservasi Taman Nasional Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal, dan
 - d. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak, Kabupaten Karo.

2. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan Struktur ekonomi di Pulau Sumatera didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Riau. Provinsi Sumatera Utara memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto di

Pulau Sumatera, yakni sebesar 23,39%, diikuti oleh Provinsi Riau sebesar 22,33% dan Provinsi Sumatera Selatan sebesar 13,28%. Perekonomian Sumatera Utara tahun 2019 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 801,73 triliun dan PDRB per kapita mencapai Rp. 55,05 juta rupiah.

Secara makro kinerja perekonomian Sumatera Utara pada tahun 2019 yang diukur berdasarkan atas perubahan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tumbuh 5,22%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,18%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,63%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga sebesar 9,95%.

Pertumbuhan positif pada PDRB terjadi pada semua lapangan usaha/kategori. Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi merupakan lapangan yang berhasil mencapai pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 9,63%. Pertumbuhan tertinggi selanjutnya dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,88%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,15%, Konstruksi sebesar 7,29%, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,93%, dan Jasa Lainnya sebesar 6,15%. Sedangkan lapangan usaha lainnya tumbuh di bawah 6%.

Tabel 1.9
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2019 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Laju Pertumbuhan			
	2016	2017	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,65	5,31	4,87	5,13
B. Pertambangan & Penggalian	5,68	4,81	5,46	4,53
C. Industri Pengolahan	5,05	2,31	3,66	1,23
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	4,85	8,72	2,58	4,92
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	6,71	6,67	2,90	5,44
F. Konstruksi	5,60	6,79	5,45	7,29
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,22	5,87	6,11	6,93
H. Transportasi dan Pergudangan	6,07	7,35	6,14	5,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,54	7,32	7,53	8,88
J. Informasi dan Komunikasi	7,76	8,57	8,43	9,63
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4,11	0,49	1,73	1,92
L. Real Estate	5,90	7,56	5,34	4,84
M,N. Jasa Perusahaan	5,95	7,46	7,10	5,87
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,02	2,52	6,12	8,15
P. Jasa Pendidikan	4,90	4,93	6,29	4,86
Q. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	7,37	7,64	5,90	4,63
R,S,T,U. Jasa Lainnya	6,50	7,56	5,96	6,25
PDRB	5,18	5,12	5,18	5,22

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat

Pertumbuhan terendah terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan yang hanya sebesar 1,23% dan jasa keuangan dan asuransi sebesar 1,92% lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai penyumbang PDRB terbesar mengalami pertumbuhan sebesar 5,13%. Sedangkan lapangan usaha lainnya mengalami pertumbuhan berkisar antara 5,13% - 5,87%.

Tabel 1.10
PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha/Kategori
2018-2019 (miliar rupiah)

Lapangan Usaha/Kategori	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	155 076,88	164 165,70	127 202,65	133 726,02
B. Pertambangan & Penggalian	9 552,00	10 173,18	6 792,01	7 099,76
C. Industri Pengolahan	148 430,31	152 202,54	96 174,60	97 362,10
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	840,59	908,22	694,58	728,79
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	102 921,37	796,72	489,61	516,23
F. Konstruksi	134 361,33	113 764,69	64 507,11	69 212,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	37 043,61	151 967,10	90 652,80	96 936,19
H. Transportasi dan Pergudangan	17 636,58	40 604,22	24 372,51	25 786,50
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15 154,95	19 386,72	12 131,74	13 209,12
J. Informasi dan Komunikasi	22 643,29	17 139,67	14 024,32	15 375,56
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	37 338,15	23 344,41	14 854,35	15 138,89
L. Real Estate	7 649,07	40 939,92	21 740,03	22 792,55
M,N. Jasa Perusahaan	27 290,31	8 671,79	4 678,85	4 953,49
R. Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	27 290,31	30 011,85	16 409,76	17 746,92
S. Jasa Pendidikan	13 527,65	14 767,59	10 418,75	10 924,95
T. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	7 273,25	8 155,28	4 977,05	5 207,26
R,S,T,U. Jasa Lainnya	4 257,54	4 733,76	2 644,92	2 810,24
PDRB	741 751,63	801 733,34	512 765,63	539 526,60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2019 PDRB Provinsi Sumatera Utara atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 801,73 triliun, sedangkan berdasar atas dasar harga konstan 2010 tercapai sebesar Rp. 539,53 triliun. Pada PDRB atas dasar harga berlaku, yang menghasilkan nilai tambah bruto terbesar pada tahun 2019 adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp. 164,17 triliun, diikuti oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp. 152,20 triliun, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp. 151,97 triliun, lapangan usaha Konstruksi Rp. 113,76 triliun, lapangan usaha *Real Estate* Rp. 40,94 triliun, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan Rp. 40,60 triliun, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib Rp. 30,01 triliun, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi Rp.23,34 triliun, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Rp. 19,39 triliun, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi Rp. 17,14 triliun, lapangan usaha Jasa Pendidikan Rp. 14,77 triliun, Pertambangan dan Penggalian 10,17 triliun, sedangkan 5 lapangan usaha lainnya memberikan nilai tambah dibawah Rp. 10 triliun.

Tabel 1.11
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2016-2019 (persen)

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2016	2017	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,47	21,38	20,91	20,48
B. Pertambangan & Penggalian	1,35	1,30	1,29	1,27
C. Industri Pengolahan	19,97	20,28	20,01	18,98
D. Pengadaan Listrik, dan Gas	0,11	0,12	0,11	0,11
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,10	0,11	0,10	0,10
F. Konstruksi	13,40	13,66	13,88	14,19

Lapangan Usaha/ Kategori	Peranan PDRB			
	2016	2017	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,14	17,54	18,11	18,95
H. Transportasi dan Pergudangan	5,07	5,02	4,99	5,06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,37	2,38	2,42
J. Informasi dan Komunikasi	1,94	2,01	2,04	2,14
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,30	3,17	3,05	2,91
L. Real Estate	4,73	4,97	5,03	5,11
M,N. Jasa Perusahaan	1,00	1,03	1,03	1,08
U. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,65	3,71	3,68	3,74
V. Jasa Pendidikan	1,88	1,82	1,82	1,84
W. Jasa Kesehatan, dan Kegiatan Sosial	0,95	0,96	0,98	1,02
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,56	0,58	0,57	0,59
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan mendominasi struktur PDRB Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 20,48%, diikuti oleh lapangan usaha industri pengolahan 18,98%, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor 18,95%, lapangan usaha konstruksi 14,19%, lapangan usaha real estate sebesar 5,11% dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 5,06%. Sedangkan lapangan usaha yang lain memberi kontribusi dibawah 5%.

Tabel 1.12
PDRB Provinsi Sumatera Utara menurut Komponen Pengeluaran
2018-2019 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku		Atas Dasar Harga Konstan 2010	
	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	397 072,81	430 663,91	263 925,55	275 496,72
2. Konsumsi LNPRT	6 948,33	7 669,43	5 386,84	5 922,97
3. Konsumsi Pemerintah	54 826,63	54 243,41	33 507,01	33 656,91
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	235 556,08	251 804,14	151 893,64	164 937,47
5. Perubahan Inventori	10 762,53	11 418,68	8 171,62	8 608,28
6. Ekspor Barang dan Jasa	271 970,63	262 956,13	220 084,77	217 157,01
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	235 385,38	217 022,36	170 203,80	166 252,77
PDRB	741 751,63	801 733,34	512 765,63	539 526,60

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

Pada tahun 2019, komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) merupakan komponen pengeluaran yang mencapai pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,95%. Pengeluaran Konsumsi LNPRT tumbuh dari Rp. 5,39 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 5,92 triliun pada tahun 2019. Pertumbuhan kompone pengeluaran diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto meningkat sebesar 8,59% atau dari Rp. 151,89 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 164,93 triliun pada tahun 2019, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah meningkat sebesar 0,45%, atau dari Rp.33,51 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 33,66 triliun pada tahun 2019, dan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 4,38%, atau dari Rp. 263,93 triliun pada tahun 2018 menjadi Rp. 275,50 triliun pada tahun 2019. Sedangkan komponen ekspor barang dan jasa dan

Impor Barang dan Jasa mengalami penurunan masing-masing sebesar 1,33% dan 2,32%.

Komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga pada tahun 2019 masih mendominasi pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 53,72%. Komponen pengeluaran terbesar lainnya adalah komponen pengeluaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 31,41%, komponen pengeluaran konsumsi pemerintah 6,77%, komponen ekspor barang dan jasa netto 5,73% (ekspor barang dan jasa 32,80% dan impor barang dan jasa 27,07%), komponen pengeluaran perubahan inventori 1,42% dan komponen pengeluaran konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga sebesar 0,96%.

Tabel 1.13
Peranan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran
Tahun 2016-2019 (persen)

Komponen Pengeluaran	Peranan PDRB			
	2016	2017	2018 ^{*)}	2019 ^{**)}
1. Konsumsi Rumah Tangga	53,07	53,18	53,53	53,72
2. Konsumsi LNPR	0,91	0,88	0,94	0,96
3. Konsumsi Pemerintah	7,33	7,57	7,39	6,77
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,60	31,16	31,76	31,41
5. Perubahan Inventori	1,44	1,18	1,45	1,42
6. Ekspor Barang dan Jasa	38,07	38,11	36,67	32,80
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	32,43	32,08	31,73	27,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Keterangan : ^{*)} Angka sementara ^{**)} Angka sangat sementara

PDRB perkapita adalah nilai PDRB dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB perkapita Provinsi Sumatera selama 3 tahun terakhir mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp. 48 juta

pada tahun 2017 meningkat menjadi Rp.51,46 juta pada tahun 2018 dan meningkat kembali menjadi Rp.55,05 juta pada tahun 2019.

Tabel 1.14

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019 (persen)

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Nias	5,03	5,01	4,95	5,04
02. Mandailing Natal	6,18	6,09	5,79	5,30
03. Tapanuli Selatan	5,12	5,21	5,19	5,23
04. Tapanuli Tengah	5,12	5,24	5,20	5,18
05. Tapanuli Utara	4,12	4,15	4,35	4,62
06. Tobasamosir	4,76	4,90	4,96	4,88
07. Labuhanbatu	5,06	5,00	5,06	5,07
08. Asahan	5,62	5,48	5,61	5,64
09. Simalungun	5,40	5,13	5,18	5,20
10. Dairi	5,07	4,93	5,01	4,82
11. Karo	5,17	5,21	4,55	4,60
12. Deli Serdang	5,32	5,10	5,15	5,18
13. Langkat	4,98	5,05	5,02	5,07
14. Nias Selatan	4,41	4,56	5,02	5,03
15. Humbang Hasundutan	5,00	5,02	5,04	4,94
16. Pakpak Bharat	5,97	5,94	5,85	5,87
17. Samosir	5,27	5,35	5,58	5,70
18. Serdang Bedagai	5,14	5,16	5,17	5,28
19. Batubara	4,44	4,11	4,38	4,35
20. Padang Lawas Utara	5,96	5,54	5,58	5,61
21. Padang Lawas	6,06	5,71	5,96	5,64
22. Labuhanbatu Selatan	5,19	5,09	5,27	5,35
23. Labuhanbatu Utara	5,21	5,11	5,20	5,15
24. Nias Utara	4,59	4,43	4,42	4,65
25. Nias Barat	4,83	4,81	4,77	4,82
26. Sibolga	5,15	5,27	5,25	5,20
27. Tanjungbalai	5,76	5,51	5,77	5,79
28. Pematangsiantar	4,86	4,41	4,80	4,82

Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan PDRB			
	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29. Tebing Tinggi	5,11	5,14	5,17	5,15
30. Medan	6,27	5,81	5,92	5,93
31. Binjai	5,54	5,39	5,46	5,51
32. Padangsidempuan	5,29	5,32	5,45	5,51
33. Gunungsitoli	6,03	6,01	6,03	6,05
Sumatera Utara	5,18	5,12	5,18	5,22

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota tahun 2019 se Sumatera Utara atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan pertumbuhan yang positif, pada kisaran 4,35% sampai dengan 6,05%. Kota Gunungsitoli merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu sebesar 6,05%, diikuti oleh Kota Medan sebesar 5,93%, Pakpak Bharat sebesar 5,87%, Tanjungbalai sebesar 5,79%, Samosir sebesar 5,70%, Asahan sebesar 5,64%, Padang Lawas 5,64% dan Padang Lawas Utara sebesar 5,61%. Sedangkan Kabupaten Batu Bara merupakan kabupaten dengan laju pertumbuhan paling rendah sebesar 4,35%, diikuti Karo 4,60%, Pematangsiantar 4,62%, Nias Utara sebesar 4,65% dan Pematangsiantar sebesar 4,82%.

Tabel 1.15
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019(miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2016	2017	2018	2019
01. N i a s	2 966,28	3 233,56	3 519,07	3 824,85
02. Mandailing Natal	10 660,04	11 712,51	12 618,05	13 544,74
03. Tapanuli Selatan	10 964,77	11 967,96	12 882,18	13 932,34
04. Tapanuli Tengah	7 849,65	8 545,38	9 229,98	9 956,78
05. Tapanuli Utara	6 300,29	6 765,69	7 296,78	7 889,05

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2016	2017	2018	2019
06 Tobasamosir	6 123,91	6 635,27	7 161,59	7 676,89
07 Labuhanbatu	26 505,44	29 032,57	31 302,58	33 610,43
08 Asahan	29 206,69	32 020,19	34 664,91	37 440,41
09 Simalungun	30 122,88	32 832,13	35 444,57	38 057,43
10 Dairi	7 484,07	7 980,47	8 560,78	9 166,42
11 Karo	16 728,46	18 064,32	19 220,88	20 584,73
12 Deli Serdang	85 152,02	93 193,89	101 060,21	109 334,14
13 Langkat	34 104,97	37 032,25	39 867,65	42 515,18
14 Nias Selatan	5 192,77	5 695,74	6 247,31	6 861,48
15 Humbang Hasundutan	4 777,17	5 131,05	5 527,25	5 951,26
16 Pakpak Bharat	917,38	999,87	1 086,96	1 178,22
17 Samosir	3 442,52	3 751,63	4 085,20	4 434,72
18 Serdang Bedagai	22 113,82	24 094,59	25 994,82	27 959,44
19 Batu Bara	27 554,61	29 756,87	31 972,00	34 047,85
20 Padang Lawas Utara	9 073,82	9 898,50	10 752,12	11 619,73
21 Padang Lawas	8 808,32	9 704,99	10 595,87	11 371,99
22 Labuhanbatu Selatan	21 004,17	23 196,31	25 124,04	27 132,30
23 Labuhanbatu Utara	19 374,23	21 161,68	22 749,93	24 378,34
24 Nias Utara	2 775,10	3 018,45	3 250,33	3 515,98
25 Nias Barat	1 413,80	1 543,97	1 673,31	1 816,85
26 Sibolga	4 262,85	4 644,67	5 063,94	5 531,54
27 Tanjungbalai	6 722,59	7 424,96	8 175,69	8 951,45
28 Pematangsiantar	11 579,29	12 443,96	13 176,71	13 933,25
29 Tebing Tinggi	4 725,48	5 123,02	5 512,52	5 924,20
30 Medan	184 809,04	203 035,74	222 483,24	241 482,35
31 Binjai	9 112,47	9 904,81	10 765,29	11 700,10
32 Padangsidempuan	4 903,28	5 372,28	5 858,84	6 373,13
33 Gunungsitoli	4 034,20	4 503,05	5 001,03	5 513,92
Sumatera Utara	630 766,38	689 422,33	747 925,63	807 211,47

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2019, Medan memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan nilai PDRB atas dasar harga berlaku Sumatera Utara sebesar 29,92%, Deli Serdang sebesar 13,54%, Langkat sebesar 5,27%, Simalungun sebesar 4,71%, Asahan sebesar 4,64 %, Batu Bara sebesar 4,22% dan Labuhanbatu sebesar 4,16%. Sedangkan kabupaten/kota lainnya memberikan kontribusi relatif kecil, yakni : Serdang Bedagai 3,46%, Labuhanbatu Selatan 3,36%, Labuhanbatu Utara 3,02%, Karo 2,55%, Pematangsiantar dan Tapanuli Selatan sebesar 1,73%, Mandailing Natal 1,68%, Binjai 1,45%, Padang Lawas Utara 1,443%, Padang Lawas 1,41%, Tapanuli Tengah 1,23%, Dairi 1,14% dan Kota Tanjungbalai 1,11%. Kontribusi di bawah 1% yaitu Tapanuli Utara 0,98%, Toba Samosir 0,95%, Nias Selatan 0,85%, Padangsidimpuan 0,79%, Humbang Hasundutan 0,74%, Tebing Tinggi 0,73%, Sibolga 0,69%, Gunungsitoli 0,68%, Samosir 0,55%, Nias 0,47%, Nias Utara 0,44%, Nias Barat 0,22%, dan Pakpak Bharat 0,15%.

Tabel 1.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2019(miliar rupiah)

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2016	2017	2018	2019
01. N i a s	2 214,15	2 325,01	2 440,16	2 563,03
02. Mandailing Natal	7 933,13	8 416,50	8 904,14	9 376,46
03. Tapanuli Selatan	8 314,69	8 748,18	9 201,96	9 683,66
04. Tapanuli Tengah	6 032,21	6 348,44	6 678,25	7 024,15
05. Tapanuli Utara	5 070,19	5 280,69	5 510,19	5 764,94
06 Tobasamosir	4 767,98	5 001,43	5 249,25	5 505,26
07 Labuhanbatu	20 046,02	21 048,17	22 112,34	23 232,71
08 A s a h a n	22 302,70	23 525,35	24 844,87	26 245,24
09 Simalungun	23 508,97	24 715,67	25 996,21	27 348,70
10 D a i r i	5 688,45	5 968,81	6 267,82	6 569,81
11 K a r o	12 494,87	13 145,85	13 744,17	14 376,28

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto			
	2016	2017	2018	2019
12 Deli Serdang	61 839,67	64 991,87	68 341,00	71 878,69
13 L a n g k a t	25 533,81	26 822,60	28 170,08	29 597,77
14 Nias Selatan	3 659,77	3 826,62	4 018,74	4 221,04
15 Humbang Hasundutan	3 577,05	3 756,66	3 946,12	4 141,10
16 Pakpak Bharat	717,89	760,55	805,01	852,30
17 Samosir	2 635,77	2 776,85	2 931,70	3 098,74
18 Serdang Bedagai	16 656,17	17 516,43	18 421,38	19 393,39
19 Batu Bara	21 165,04	22 034,26	22 998,60	23 998,59
20 Padang Lawas Utara	6 991,66	7 378,98	7 791,05	8 228,45
21 Padang Lawas	6 725,98	7 110,25	7 534,30	7 959,31
22 Labuhanbatu Selatan	16 088,42	16 907,59	17 797,95	18 750,16
23 Labuhanbatu Utara	14 843,99	15 602,05	16 413,33	17 259,19
24 Nias Utara	2 043,91	2 134,49	2 228,75	2 332,44
25 Nias Barat	1 074,48	1 126,19	1 179,91	1 236,73
26 S i b o l g a	3 063,07	3 224,58	3 393,91	3 570,33
27 Tanjungbalai	4 904,54	5 174,85	5 473,63	5 790,37
28 Pematangsiantar	8 380,77	8 750,15	9 170,19	9 611,74
29 Tebing Tinggi	3 400,75	3 575,51	3 760,50	3 954,03
30 M e d a n	132 062,86	139 739,34	148 007,14	156 780,58
31 B i n j a i	6 935,55	7 309,57	7 708,59	8 133,54
32 Padangsidimpuan	3 636,87	3 830,32	4 038,93	4 261,32
33 Gunungsitoli	2 876,34	3 049,12	3 232,97	3 428,45
Sumatera Utara	467 187,76	491 922,92	518 313,14	546 168,46

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

PDRB per kapita dilihat berdasarkan kabupaten/kota se Sumatera Utara, PDRB per kapita tertinggi di Kota Medan sebesar Rp.105,92 juta, diikuti oleh Kabupaten Batu Bara Rp.81,75 juta, Labuhanbatu Selatan Rp.80,04 juta, Labuhanbatu Rp.68,01 juta dan Labuhanbatu Utara Rp.67,01 juta. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten yang paling rendah nilai PDRB per kapitanya, sebesar Rp. 21,45 juta diikuti oleh Kabupaten Nias Barat Rp.22,16

juta, Pakpak Bharat Rp.24,08 juta, Nias Utara Rp.25,48 juta dan Tapanuli Utara sebesar Rp.26,14 juta.

Tabel 1.17
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2019(rupiah)

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
01 Nias	22 753 909	24 636 473	26 687 703
02 Mandailing Natal	26 649 320	28 451 718	30 281 979
03 Tapanuli Selatan	42 959 512	45 961 324	49 417 535
04 Tapanuli Tengah	23 495 349	24 934 361	26 433 899
05 Tapanuli Utara	22 718 451	24 332 249	26 140 945
06 Tobasamosir	36 499 646	39 204 402	41 787 622
07 Labuhanbatu	60 662 338	64 345 055	68 012 800
08 Asahan	44 551 814	47 854 663	51 302 635
09 Simalungun	38 211 192	41 038 393	43 848 908
10 Dairi	28 312 003	30 228 407	32 241 619
11 Karo	44 801 603	46 917 382	49 497 030
12 Deli Serdang	44 071 079	46 882 094	49 794 458
13 Langkat	36 012 766	38 504 178	40 810 325
14 Nias Selatan	18 116 499	19 694 732	21 448 686
15 Humbang Hasundutan	27 483 734	29 325 411	31 291 803
16 Pakpak Bharat	21 191 350	22 589 017	24 077 148
17 Samosir	29 989 294	32 469 661	35 143 764
18 Serdang Bedagai	39 310 887	42 294 269	45 359 548
19 Batu Bara	72 738 988	77 415 555	81 748 911
20 Padang Lawas Utara	37 651 926	40 154 176	42 607 913
21 Padang Lawas	35 971 180	38 458 403	40 435 311
22 Labuhanbatu Selatan	70 974 723	75 465 242	80 040 545
23 Labuhanbatu Utara	59 161 910	63 032 129	67 007 345
24 Nias Utara	22 179 782	23 724 681	25 484 234
25 Nias Barat	18 995 907	20 490 439	22 115 147
26 Sibolga	53 331 856	57 994 856	63 126 737
27 Tanjungbalai	43 373 414	47 175 954	51 086 050
28 Pematangsiantar	49 476 391	51 979 135	54 572 353

Kabupaten/Kota	PDRB per Kapita		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
29 Tebing Tinggi	31 882 154	33 906 282	36 034 837
30 Medan	90 341 498	98 263 688	105 918 236
31 Binjai	36 559 096	39 304 878	42 300 163
32 Padangsidempuan	24 870 189	26 765 890	28 730 165
33 Gunungsitoli	32 330 684	35 486 672	38 714 256
Sumatera Utara	48 003 602	51 455 533	55 054 465

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

F. INDIKATOR KINERJA MAKRO

1. Indeks Pembangunan Manusia

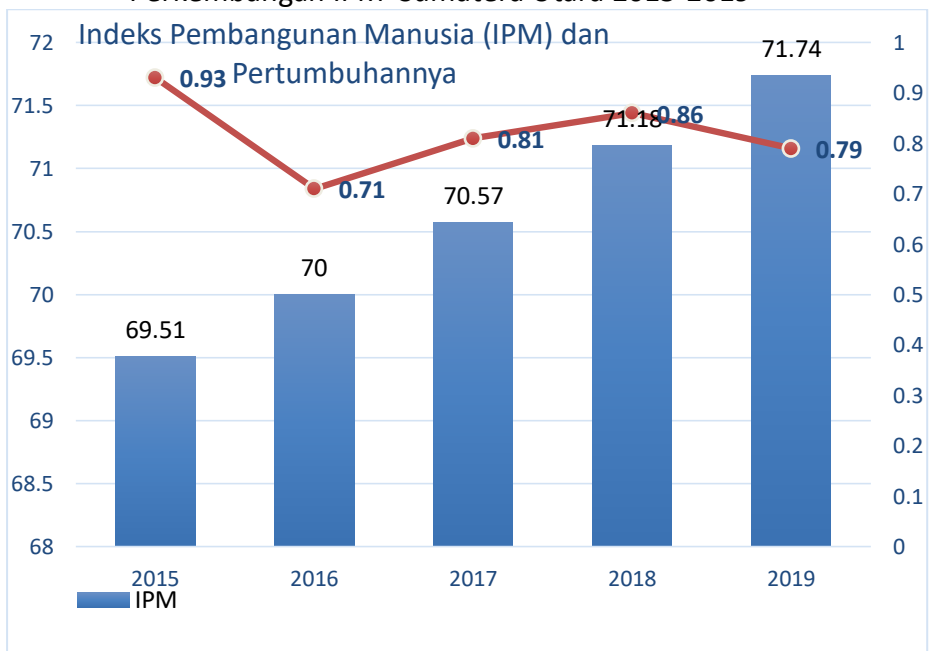
Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup dan digunakan oleh semua negara yang ada di dunia saat ini. IPM dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan kebijakan pemerintahan dalam membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).

IPM dapat menjelaskan bagaimana pemerataan dalam akses memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Untuk mendapatkan nilai IPM diperlukan data pendukung diantaranya data umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Ketiga data pendukung ini dapat dijelaskan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), serta nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Ketiga komponen tersebut kemudian

dihitung rata-ratanya sehingga menghasilkan indeks yang disebut sebagai indeks pembangunan manusia.

Indeks pembangunan manusia Sumatera Utara cenderung mengalami peningkatan dari tahun ketahun.untuk menjelaskan hal tersebut kita dapat mengacu pada data perkembangan IPM sebagai berikut.

Gambar 1.4
Perkembangan IPM Sumatera Utara 2015-2019



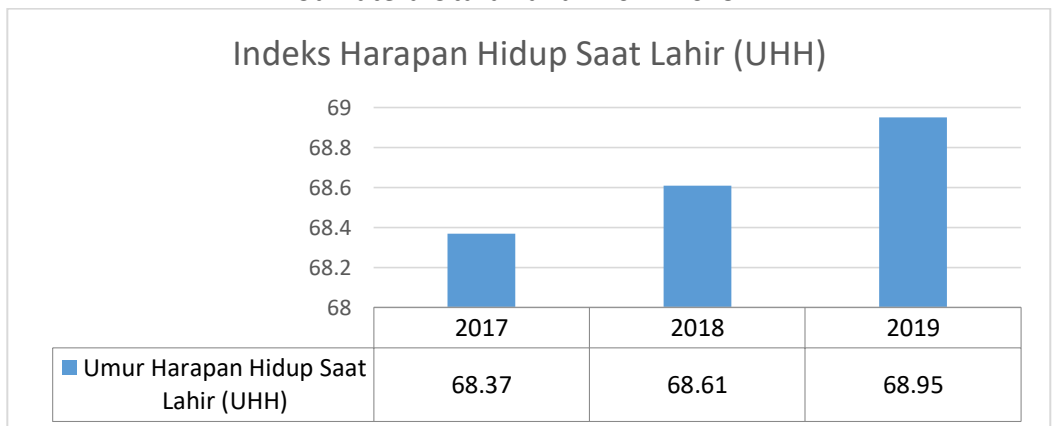
Gambar diatas menjelaskan secara umum bahwa pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara terus mengalami kemajuan selama periode 2015 hingga 2018. IPM Sumatera Utara meningkat sebesar 0,86% pada periode 2017-2018, dimana IPM pada tahun 2017 sebesar 70,57 dan menjadi 71,18 pada tahun 2018. Angka tersebut meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 71,74

atau tumbuh sebesar 0,79%. Meningkatnya nilai IPM tahun 2019 disebabkan oleh terjadinya peningkatan nilai variabel umur harapan hidup saat lahir sebesar 0,50%, kemudian diiringi dengan peningkatan harapan lama sekolah 0,08%, rata-rata lama sekolah 1,18% dan meningkatnya pengeluaran perkapita sebesar 2,48%. Persentase peningkatan pengeluaran perkapita adalah yang paling besar dibandingkan dengan komponen lain.

1.1 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dapat dilihat dari variable/indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir, indeks ini terus mengalami peningkatan selama periode 2017 hingga 2019. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,34 tahun. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup saat lahir di Sumatera Utara adalah 68,61 tahun, dan pada tahun 2019 telah mencapai 68,95 tahun.

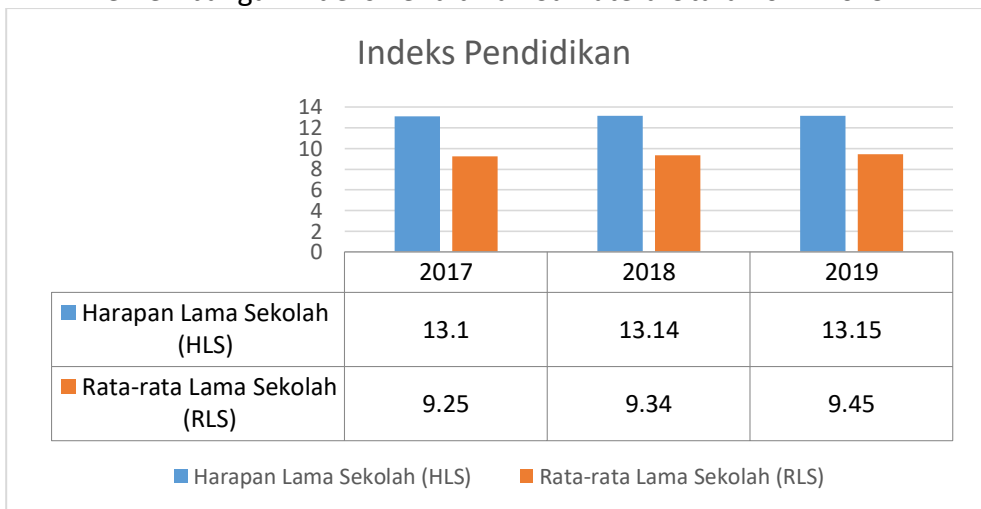
Gambar 1.5
Perkembangan Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)
Sumatera Utara Tahun 2017-2019



1.2 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan dibentuk oleh dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Selama periode 2017 hingga 2019, harapan lama sekolah di Sumatera Utara mengalami peningkatan yang sangat lambat yaitu sebesar 0,05 tahun. Sementara itu rata-rata lama sekolah meningkat 0,20 tahun. Peningkatan ini diharapkan mampu membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik.

Gambar 1.6
Perkembangan Indeks Pendidikan Sumatera Utara 2017-2019



1.3 Indeks Standar Hidup

Indeks Standar Hidup diukur melalui indikator pengeluaran per kapita, yang dapat menjelaskan kualitas hidup manusia. Pengeluaran per kapita masyarakat Sumatera Utara tahun 2017 mencapai Rp.10.036.000 per tahun dan mengalami

peningkatan sebesar 6,11% periode 2017-2019, sehingga pada tahun 2019 pengeluaran perkapita mencapai Rp.10.649.000. Peningkatan pengeluaran perkapita diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Gambar 1.7
Perkembangan Indeks Pengeluaran Perkapita Sumatera Utara 2017-2019



Tabel 1.18
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Sumatera Utara 2017-2019

No.	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019
1	Nias	60,21	60,82	61,65
2	Mandailing Natal	65,13	65,83	66,52
3	Tapanuli Selatan	68,69	69,10	69,75
4	Tapanuli Tengah	67,96	68,27	68,86
5	Tapanuli Utara	72,38	72,91	73,33
6	Toba Samosir	73,87	74,48	74,92

No.	KABUPATEN/KOTA	2017	2018	2019
7	Labuhanbatu	71,00	71,39	71,94
8	Asahan	69,10	69,49	69,92
9	Simalungun	71,83	72,49	72,98
10	Dairi	70,36	70,89	71,42
11	Karo	73,53	73,91	74,25
12	Deli Serdang	73,94	74,92	75,43
13	Langkat	69,82	70,27	70,76
14	Nias Selatan	59,85	60,75	61,59
15	Humbang Hasundutan	67,30	67,96	68,83
16	Pakpak Bharat	66,25	66,63	67,47
17	Samosir	69,43	69,99	70,55
18	Serdang Bedagai	69,16	69,69	70,21
19	Batu Bara	67,20	67,67	68,35
20	Padang Lawas Utara	68,34	68,77	69,29
21	Padang Lawas	66,82	67,59	68,16
22	Labuhanbatu Selatan	70,48	70,98	71,39
23	Labuhanbatu Utara	70,79	71,08	71,43
24	Nias Utara	60,57	61,08	61,98
25	Nias Barat	59,56	60,42	61,14
26	Sibolga	72,28	72,65	73,41
27	Tanjungbalai	67,41	68,00	68,51
28	Pematangsiantar	77,54	77,88	78,57
29	Tebing Tinggi	73,90	74,50	75,08
30	Medan	79,98	80,65	80,97
31	Binjai	74,65	75,21	75,89
32	Padangsidempuan	73,81	74,38	75,06
33	Gunungsitoli	67,68	68,33	69,30
Sumatera Utara		70,59	71,18	71,74

Sumber : BPS Provsu

Tabel diatas memperlihatkan variasi Indeks pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Utara periode 2017-2019, dengan nilai IPM tertinggi adalah Kota Medan dengan indeks sebesar 80,97, disusul Pematangsiantar (78,57) dan Kota Binjai

(75,89). Sedangkan nilai IPM terendah dimiliki oleh Kabupaten Nias Barat dengan IPM sebesar 61,14. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki IPM dengan kualifikasi rendah pada tahun 2019 sudah tidak ada. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai IPM dengan kualifikasi tinggi bertambah dari 15 kabupaten/kota pada tahun 2017 menjadi 17 kabupaten/kota pada tahun 2019. Kabupaten/kota yang mencapai IPM dengan kualifikasi tinggi yaitu Kabupaten Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhanbatu, Simalungun, Dairi, Deli Serdang, Langkat, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Karo, Kota Sibolga, Padangsidimpuan, Tebing Tinggi, Binjai, Pematangsiantar dan Medan.

Enam kabupaten/kota di Sumatera Utara yang memiliki laju pertumbuhan IPM lebih dari 1% yaitu Kabupaten Nias Utara (1,47%) Kota Gunungsitoli (1,42%), Kabupaten Nias Selatan (1,38%), Nias (1,36%), Humbang Hasundutan (1,28%), Pakpak Bharat (1,26%), Nias Barat (1,19%), Mandailing Natal (1,05%), Kota Sibolga (1,05%) dan Batu Bara (1,00%). Sementara itu, kemajuan pembangunan manusia di Kota Medan (0,40%), Kabupaten Karo (0,46%), dan Kabupaten Labuhanbatu Utara (0,49%) tercatat paling lambat selama tahun 2018-2019.

2. Angka Kemiskinan

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan Maret 2018 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara adalah 1.324.980 orang atau 9,22% terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara belum mengalami perubahan yang signifikan dimana kondisi pada

September 2017 jumlah penduduk miskin berjumlah 1.326.570 orang atau sebesar 9,28%. Penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 1.590 orang dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,06 poin.

Sementara itu Hasil Susenas bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.260.500 jiwa atau sebesar 8,63% terhadap total penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Sumatera Utara mengalami penurunan dimana pada Maret 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 1.282.040 jiwa atau sebesar 8,83%. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 21.540 jiwa dengan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,20 poin.

Tabel 1.19
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Utara
Tahun 2017-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota + Desa	Kota	Desa	Kota + Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Maret 2017	710,71	743,17	1 453,87	9,80	10,66	10,22
September 2017	663,27	663,30	1 326,57	8,96	9,62	9,28
Maret 2018	694,85	630,13	1 324,98	9,15	9,30	9,22
September 2018	686,97	605,02	1 291,99	8,84	9,05	8,94
Maret 2019	675,74	606,30	1 282,04	8,56	9,14	8,83
September 2019	665,46	595,04	1 260,50	8,39	8,93	8,63

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017– 2019

3. Angka Pengangguran

Jumlah Angkatan Kerja Sumatera Utara pada Agustus 2019 sebanyak 7.064.000 orang, turun 60.000 orang dibanding Agustus 2018. Komponen pembentuk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja dan pengangguran. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2019 sebanyak 6.681.000 orang, sedangkan yang menganggur 383.000 orang. Jika dibandingkan dengan 2018, maka jumlah penduduk bekerja berkurang 47.000 orang, sedangkan pengangguran turun 13.000 orang.

Tabel 1.20
Ketenagakerjaan di Sumatera Utara Agustus 2018- Agustus 2019

Status Keadaan Ketenagakerjaan		Satuan	Agustus 2018	Februari 2019	Agustus 2019
Penduduk Usia Kerja		Ribu Orang	9 919	9 992	10 064
Angkatan Kerja		Ribu Orang	7 124	7 451	7 064
-	Bekerja	Ribu Orang	6 728	7 037	6 681
-	Pengangguran	Ribu Orang	396	414	383
Bukan Angkatan Kerja		Ribu Orang	2 795	2 541	3 000
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Persen	71,82	74,57	70,19
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		Persen	5,56	5,56	5,41

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018, Februari 2019, dan Agustus 2019

Sejalan dengan menurunnya jumlah angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga menurun. TPAK pada Agustus 2019 tercatat sebesar 70,19%, turun 1,63 poin dibanding setahun yang lalu. Penurunan TPAK memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT pada Agustus 2018 sebesar 5,56% turun menjadi 5,41% pada Agustus 2019.

Tabel 1.21
Jumlah dan Persentase Penduduk Bekerja
Menurut Lapangan Pekerjaan Utama 2018 - 2019

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2018		Agustus 2019	
		Jumlah (000)	Persen	Jumlah (000)	Persen
1	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2 391	35,53	2 374	35,54
2	B. Pertambangan dan Penggalian	41	0,61	40	0,61
3	C. Industri Pengolahan	687	10,22	662	9,91
4	D,E. Pengadaan Listrik dan Gas. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	47	0,70	37	0,56
5	F. Konstruksi	353	5,25	375	5,61
6	G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	1 210	17,99	1 181	17,68
7	H. Transportasi dan Pergudangan	330	4,90	313	4,68
8	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	416	6,18	485	7,25
9	J. Informasi dan Komunikasi	43	0,64	38	0,56
10	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	257	3,82	219	3,27
11	P. Jasa Pendidikan	345	5,13	370	5,54
12	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	115	1,71	102	1,53
13	K, L, M, N, R, S, T, U. Jasa Keuangan, Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya	492	7,31	485	7,26
JUMLAH		6 728	100	6 681	100

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2018 dan Agustus 2019

Kondisi ketenagakerjaan baik menyangkut tingkat pengangguran dan penduduk yang bekerja tidak terlepas dari kinerja sektor-sektor perekonomian yang ada. Jumlah penduduk yang bekerja pada tiap sektor menunjukkan kemampuan sektor tersebut dalam penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lapangan pekerjaan utama pada Agustus 2018, penduduk Sumatera Utara paling banyak bekerja pada Sektor Pertanian yaitu sebanyak 2.374.000 orang (35,53%), disusul oleh Sektor Perdagangan dan Industri Pengolahan masing-masing sebanyak 1.181.000 orang (17,68%) dan 662.000 orang (9,91%). Dilihat berdasarkan persentase perubahan lapangan pekerjaan selama Agustus 2018-Agustus 2019, lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase penduduk bekerja terutama pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (1,07 poin), dan Jasa Pendidikan (0,41 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan utamanya pada Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (0,55 poin), Konstruksi (0,36 poin), dan Industri Pengolahan (0,31 poin)

4. Inflasi dan Perdagangan Luar Negeri

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai uang secara kontinu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga.

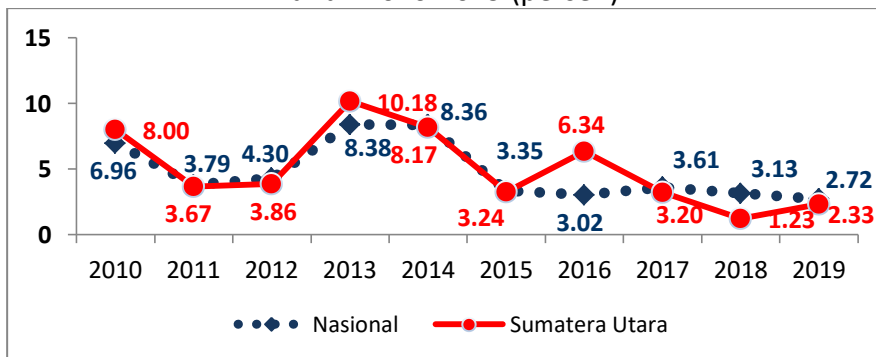
Dari 4 kota penghitungan inflasi (IHK) di Sumatera Utara, Sibolga mengalami inflasi tertinggi selama 2019 yaitu 2,58%, diikuti Medan sebesar 2,43%, Padangsidimpuan sebesar 2,15%, sedangkan Pematangsiantar mengalami inflasi terendah selama tahun 2019 yaitu sebesar 1,54%.

Tabel 1.22
Perkembangan Inflasi 4 Kota di Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2019 (persen)

Tahun	Medan	Pematang - siantar	Sibolga	Padang- sidimpuan	Sumatera Utara	Nasional
2010	7,65	9,68	11,83	7,42	8,00	6,96
2011	3,54	4,25	3,71	4,66	3,67	3,79
2012	3,79	4,73	3,30	3,54	3,86	4,30
2013	10,09	12,02	10,08	7,82	10,18	8,38
2014	8,24	7,94	8,36	7,38	8,17	8,36
2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,35
2016	6,60	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02
2017	3,18	3,10	3,08	3,82	3,20	3,61
2018	1,00	2,15	2,86	2,22	1,23	3,13
2019	2,43	1,54	2,58	2,15	2,33	2,72

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Gambar 1.8
Perkembangan Inflasi Sumatera Utara dan Nasional
Tahun 2010-2019 (persen)



Selama 2019, inflasi gabungan kota IHK di Sumatera Utara sebesar 2,33%, angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian 2018 yang sebesar 1,23%. Walaupun demikian, inflasi Sumatera Utara masih lebih rendah bila dibandingkan dengan angka inflasi Nasional yang sebesar 2,72%.

Dalam periode 2017-2019, nilai neraca perdagangan luar negeri Sumatera Utara mengalami penurunan.dengan rata-rata laju penurunan sebesar 14,58%, dan penurunan tertinggi pada tahun 2019 sebesar 21,04%. Dalam dua tahun terakhir aktivitas ekspor ke luar negeri mengalami penurunan, baik dalam berat maupun nilainya. Tahun 2018, nilai ekspor Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 4,77% dibandingkan tahun 2017 yaitu dari US\$9,23 miliar menjadi US\$8,78 miliar tahun 2018. Pada tahun 2019 nilai ekspor kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 menjadi US\$.7,68 miliar atau sekitar 12,59%.

Tabel 1.23
Neraca Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2010-2019

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010	7 992 103	9 147 778	6 171 734	3 576 248	5 571 530
2011	8 161 003	11 883 268	6 718 063	4 953 462	6 929 806
2012	8 695 942	10 393 936	6 813 898	5 164 751	5 229 185
2013	9 275 891	9 598 008	6 949 116	5 108 512	4 489 497
2014	9 087 526	9 361 110	7 391 305	5 046 514	4 314 596
2015	9 008 200	7 752 788	6 853 734	3 988 439	3 764 349
2016	8 391 024	7 776 492	6 819 193	3 914 490	3 862 002
2017	8 981 772	9 225 286	7 038 772	4 635 808	4 345 963

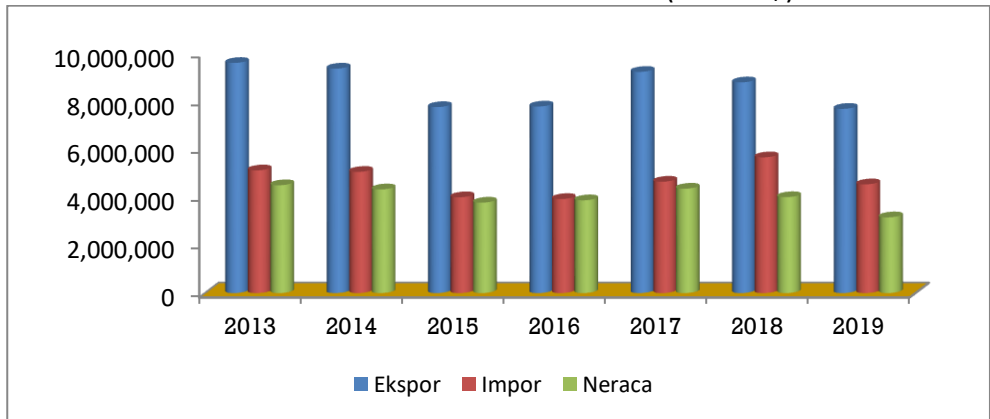
Tahun	Ekspor		Impor		Neraca Perdagangan Luar Negeri (Ribu US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FoB (Ribu US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai CiF (Ribu US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2018	9 645 281	8 784 934	7 215 593	5 652 590	3 132 344
2019	9 553 990	7 678 721	6 324 899	4 525 905	3 152 771

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara

Seperti halnya kegiatan ekspor, nilai impor Sumatera Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dalam periode 2017-2019 terjadi kenaikan nilai impor pada tahun 2018 namun mengalami penurunan pada tahun 2019. Tahun 2018, nilai impor mengalami kenaikan sebesar US\$1,02 miliar dibandingkan tahun 2017, sedangkan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar US\$1,13 miliar dibandingkan 2018.

Neraca perdagangan Sumatera Utara selalu mengalami surplus, artinya nilai ekspor selalu lebih besar dari nilai impor. Perkembangan neraca perdagangan tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi, tahun 2016 neraca perdagangan naik sebesar 2,59% dan tahun 2017 kembali naik 12,53%, tahun 2018 neraca perdagangan Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 27,93%. Namun pada tahun 2019 angka tersebut sedikit mengalami kenaikan sebesar 0,65% dimana pada tahun 2018 surplus perdagangan adalah US\$3,13 miliardan menjadi US\$3,15 miliar pada tahun 2019.

Gambar 1.9
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri
Sumatera Utara Tahun 2013 - 2019 (ribu US\$)



5. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Pada September 2017, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,335. Angka ini menurun sebesar 0,020 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2017 sebesar 0,315. Pada September 2018, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur oleh Gini Ratio tercatat sebesar 0,311. Angka ini menurun sebesar 0,007 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2018 yang sebesar 0,318.

Pada September 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan Gini Ratio tercatat sebesar 0,315. Angka ini turun sebesar 0,002 poin atau membaik jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 yang sebesar 0,317. Secara umum angka Gini Ratio mengalami penurunan pada periode tahun 2017-2019. Penurunan angka Gini ratio memperlihatkan ketimpangan pendapatan yang semakin menurun.

Tabel 1.24
Gini Ratio di Sumatera Utara Tahun 2017-2019

Tahun	Gini Ratio		
	Kota	Desa	Kota + Desa
Maret 2017	0,342	0,256	0,315
September 2017	0,365	0,264	0,335
Maret 2018	0,335	0,272	0,318
September 2018	0,330	0,257	0,311
Maret 2019	0,338	0,264	0,317
September 2019	0,337	0,262	0,315

Sumber : BPS-Survey Sosial Ekonomi Nasional 2017 – 2019

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Visi

RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 –2025 yaitu tahappemantapan *“Tingkat kemandirian yang tinggi, makmur, berkeadilan dan maju, melalui percepatan pembangunan semua bidang yang didukung struktur ekonomi yang tangguh”* menuju pencapaian *“Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”*. Visi Pembangunan jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara. Adapun visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yaitu :

“Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sumatera Utara, bermakna seluruh wilayah dan komponen/lapisan masyarakat yang berdiam di Sumatera Utara, yang berasal dari berbagai ragam adat budaya, etnis, agama dan golongan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan;

Maju, bermakna wilayah Sumatera Utara yang kondusif untuk terjadinya proses nilai tambah atas potensi yang dimiliki serta penduduk dengan kualitas kesehatan dan pendidikan yang baik serta berpikiran ke depan, sehingga Sumatera Utara menjadi wilayah terdepan di Sumatera.

Aman, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara bebas dari bahaya gangguan dan terlindungi dari berbagai macam marabahaya dalam melaksanakan aktivitas keseharian.

Bermartabat, bermakna wilayah dan penduduk Sumatera Utara yang agamis dan menjunjung tinggi etika dan norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi adat istiadat dalam kehidupan bermasyarakat, dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam segala aspek.

2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 sebagai berikut :

- Misi Pertama
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
- Misi Kedua
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
- Misi Ketiga
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
- Misi Keempat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
- Misi Kelima
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

3. Tujuan dan Sasaran

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan RPJMD 2019-2023 melalui pendekatan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi untuk pencapaian visi dan misi provinsi Sumatera Utara. Pendekatan ini menggunakan hasil analisis terhadap isu strategis dan permasalahan, kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Threats*) yang di miliki Provinsi Sumatera Utara, maka dirumuskan strategi yang tepat dalam melakukan perubahan dan transformasi menuju keadaan yang lebih maju, aman, dan bermartabat, sebagaimana cita-cita masyarakat Sumatera Utara.

Strategi pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan	1.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1. Mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama 2. Meningkatkan fungsi rumah ibadah sebagai sarana kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
		1.2	Meningkatnya ketersediaan sandang pangan	1. Pengembangan diversifikasi pangan 2. Penanganan daerah rawan pangan 3. Stabilisasi harga dan pasokan pangan 4. Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar 5. Pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan berbasis korporasi petani 6. Pengembangan agroindustri melalui penerapan dan penanganan Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Komoditas pertanian, peternakan dan perikanan
		1.3	Meningkatnya rumah yang layak	1. Pembangunan PSU Permukiman bagi masyarakat kurang mampu 2. Bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu 3. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
				<p>4. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi</p> <p>5. Peningkatan peran dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman kumuh</p>
		1.4	Meningkatnya kesehatan yang prima	<p>1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan</p> <p>2. Peningkatan Sumber Daya Kesehatan</p>
		1.5	Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	<p>1. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif</p> <p>2. Pemberian insentif dan fasilitas investasi</p> <p>3. Penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha</p> <p>4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama investasi</p> <p>5. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha</p> <p>6. Peningkatan Nilai Tambah Produk</p> <p>7. Pemberdayaan dan penguatan pelayanan terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu dalam pengembangan ekonomi kreatif</p> <p>8. Pemberdayaan dan penguatan pelayanan</p>

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
				terhadap masyarakat miskin dan kurang mampu dalam pengembangan ekonomi kreatif
		1.6	Meningkatnya keterjangkauan harga	1. Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah 2. Pengendalian Laju Inflasi dan Penguatan stabilitas harga
		1.7	Meningkatnya konektivitas infrastruktur meningkatnya infrastruktur dasar	1. Pembangunan dan peningkatan Jalan 2. Peningkatan layanan irigasi dalam kondisi optimal 3. Pembangunan dan peningkatan penyediaan air minum dan pengelolaan sanitasi 4. Pembangunan dan Peningkatan Sambungan Listrik Rumah Tangga Masyarakat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik	2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi
		2.2	Meningkatnya politik yang beretika	1. Peningkatan upaya pre-emptif, preventif, dan represif atas pelanggaran Perda dan Peraturan Pelaksanaannya
		2.3	Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan	1. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat	3.1	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan 2. Pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan yang berfokus pada program keahlian yang sesuai dengan potensi daerah 3. Peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 4. Peningkatan peran perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat 5. Peningkatan pemanfaatan riset dan inovasi
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	4.1	Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 2. Peningkatan pembinaan pemuda 3. Peningkatan Penegakan Perda
		4.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kebijakan pelaksanaan kesetaraan dan keadilan gender
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologiannya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah,	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	5.1.	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan dan hasil hutan 2. Penataan, Pembinaan dan pendampingan para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam

MISI	TUJUAN	SASARAN		STRATEGI
penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab				<p>pengelolaan hutan lestari</p> <p>3. Peningkatan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan</p> <p>4. Peningkatan Pemberian Pelayanan Informasi rawan Bencana</p> <p>5. Peningkatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</p> <p>6. Peningkatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p>
		5.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	<p>1. Penguatan Warisan Budaya Daerah</p> <p>2. Peningkatan dan Optimalisasi Sektor Pariwisata yang Berkelanjutan</p>

Sumber : Bappeda Provsu

2. Arah Kebijakan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 tahun atau selama periode RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2019 hingga tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara

Arah Kebijakan				
Tahun-1 2019	Tahun-2 2020	Tahun-3 2021	Tahun-4 2022	Tahun-5 2023
Difokuskan pada upaya mewujudkan reformasi birokrasi dengan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan yang baik (<i>good government</i>) dan tata pemerintahan yang bersih (<i>clean government</i>), serta menggali dan mengoptimalkan potensi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan infrastruktur dan pelaksanaan pembangunan yang berwawasan kependudukan serta lingkungan dan peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.	Difokuskan pada percepatan pembangunan di Kabupaten/Kota khususnya di daerah kumuh, perdesaan, terpencil dan kepulauan untuk mengatasi ketimpangan melalui peningkatan kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta penciptaan kesempatan kerja dan berusaha	Difokuskan untuk melanjutkan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan sebelumnya dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan	Difokuskan pada upaya pengoptimalandan mensinergikan serta mempercepat pencapaian pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat	Difokuskan pada akselerasi pencapaian program-program prioritas untuk terwujudnya Provinsi Sumatera Utara yang bermartabat.

Sumber : Bappeda Provsu

Keberhasilan dari setiap misi ditunjukkan oleh indikator kinerja sasaran dengan target terukur. Kinerja sasaran disusun selama lima tahun dengan target setiap tahun selama periode Tahun 2019 – 2023, seperti disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	2023
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yg bermartabat dalam kehidupan	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	77	80	83	85	90	90
			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71.18	71.35	71.67	72.22	72.77	73.32	73.32
		1.1 Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	NA	77	80	83	85	90	90
		1.2 Meningkatnya ketersediaan sandang pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	89,1	90.4	92.3	94.3	96.3	98.1	98.1
		1.3 Meningkatnya rumah yang layak	Rasio Rumah Layak Huni	Persen	NA	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72	94.72
		1.4 Meningkatnya kesehatan yang prima	Usia Harapan Hidup	Tahun	68.61	68.74	68.87	69	69.13	70.00	70.00
			Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2.91	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78	2.78
		1.5 Meningkatnya mata pencaharian yang menyenangkan	Nilai Tukar Petani	Skor	97.98	100.10	100.10	100.10	100.10	100.21	100.22
			Persentase Kemiskinan	Persen	8.94	8.87	8.43	8.04	7.7	7.39	7.39

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	2023
			Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.56	5.5	5.45	5.4	5.35	5.3	5.3
			Indeks Gini	Poin	0.318	0.325	0.32	0.315	0.31	0.3	0.3
			Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.18	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7
			Inflasi	Persen	1.23	2.95	2.9	2.85	2.8	2.75	2.75
		1.6	Meningkatnya keterjangkauan harga	Persen	1.23	2.95	2.9	2.85	2.8	2.75	2.75
		1.7	Meningkatnya konektifitas infrastruktur	Persen	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90	90
			Rasio elektrifikasi	Persen	99.9	99.9	100	100	100	100	100
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial	Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik		Indeks Demokrasi							
		2.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	CC	B	B	BB	BB	BB	BB
			Indeks Reformasi Birokrasi	Predikat	B	B	B	A	A	A	A

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2023
	yang kuat serta harmonis;	2.2.	Meningkatnya politik yang beretika	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persen	63.8	64	64	64	64	65	65
		2.3	Meningkatnya masyarakat yang berwawasan kebangsaan	Persentase Masyarakat yang menerima Pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri		Terwujudnya kualitas pendidikan masyarakat	Harapan lama sekolah	Tahun	13.14	13.37	13.81	14.01	14.21	14.42	14.42
		3.1	Meningkatnya masyarakat yang terpelajar, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9.61	9.79	9.97	10.15	10.33	10.50	10,50
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi,		Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	NA	0.9	0.93	0.96	0.99	1	1

NO	MISI	TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET CAPAIAN SASARAN					KONDISI AKHIR
							2019	2020	2021	2022	2023	2023
	narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	4.1	Menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan	Persentase Terpeliharanya Kehidupan masyarakat yg aman, tertib dan teratur	Persen	NA	95	96	98	99	100	100
		4.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.85	90.87	90.93	91	91.08	91.17	91.17
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab		Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67.17	68	68.7	70.7	71.7	72.7	72.7
		5.1	Meningkatnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	67.17	68	68.7	70.7	71.7	72.7	72.7
				Indeks Resiko Bencana	Poin	150	145	134.4	127	121	109	109
		5.2	Meningkatnya pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	231,465	280,000	300,000	370,000	400,000	500,000	500,000
				Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	8.15	8.56	8.99	9.44	9.92	9.92	9.92

Sumber : Bappeda Provsu

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada :

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas tersebut akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

1. **Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang baik**, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan,

pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

1. Program Unggulan

Dalam rangka pencapaian 5 sasaran prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, akan dilaksanakan melalui serangkaian program unggulan yang akan mendorong terjadinya *“lompatan”* dalam pembangunan Provinsi Sumatera yaitu :

- 1) Prioritas Pembangunan-1 : Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja, diarahkan kepada :
 - a. Membangun kerjasama dengan institusi nasional dan internasional serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja antara lain Kota Medan, Kabupaten Simalungun dan Wilayah Kepulauan Nias.
 - b. Pengembangan Pusat Inovasi dan Industri Kreatif antara lain Kab. Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Kota Medan.
 - c. Pengembangan UMKM Center di Kawasan Danau Toba dan Wilayah Pantai Barat (Sibolga)

- d. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis online(*e-smart*) antara lain : Medan, Deli Serdang, Binjai dan Pematang Siantar.
 - e. Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru dan pengembangan industri kreatif.
 - f. Peningkatan Promosi serta kemudahan perizinan sebagai upaya tumbuhnya investasi dan wirausahawan baru.
- 2) Prioritas Pembangunan-2 : Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan, diarahkan kepada :
- a. Pemberian Beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru.
 - b. Penambahan Gaji Guru Honorer.
 - c. Program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara.
 - d. Beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
 - e. Mendorong partisipasi BUMN/BUMD Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA disetiap kecamatan menyesuaikan dengan kebutuhan.
 - f. Pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah.
 - g. Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter di semua mata pelajaran/kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin terutama di sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara.

- 3) Prioritas Pembangunan-3 :Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, diarahkan kepada :
- a. Peningkatan akses dan pemenuhan infrastuktur Pelayanan Dasar (jalan, air minum, sanitasi, energi listrik, dan rumah layak huni).
 - b. Mendukung Pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Pembangunan Jalan TOL Sumatera. Kereta Api Trans Sumatera dan pelabuhan Kuala Tanjung.
 - c. Pengembangan kawasan strategis nasional Mebidang dengan pembangunan SPAM Regional, Transportasi Massal LRT/MRT, bendung serbaguna lau simeme.
 - d. Pengembangan KSN Danau Toba melalui Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat serta peningkatan akses Transportasi menuju Destinasi Wisata.
 - e. Pengembangan wilayah pada 14 Kawasan Strategis Provinsi antara lain :
 - Kawasan Sport Center Berstandar Internasional;
 - Pembangunan Jalan Alternatif Medan-Berastagi;
 - Penataan Kawasan Koridor Sei Mangke – Kuala Tanjung;
 - Akses Jalan Lingkar Pulau Nias;
 - Pemenuhan Infrasruktur Dasar (Air Minum, Sanitasi, Energi dan Penyediaan Rumah Lauak Huni dan Terjangkau);
 - Penataan kawasan kumuh pada sempadan sungai wilayah perkotaan.
- 4) Prioritas Pembangunan-4 : Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, diarahkan kepada :
- a. Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kesehatan, Sarana dan Prasarana, dan Peningkatan kualitas pelayanan.

- b. Pengembangan Rumah Sakit Rujukan antara lain : RSUD Samosir, RSUD Toba Samosir, RSUD Padang Sidempuan, serta pengembangan Rumah Sakit bertaraf Internasional.
 - c. Pengembangan siaga kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
 - d. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Balita Stunting dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 5) Prioritas Pembangunan-5 : Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata, diarahkan kepada:
- a. Sektor Agraris :
 - Pengembangan Kawasan Agrobisnis dan Agro Industri berbasis produk unggulan Daerah (*One Region One Product*);
 - Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan.
 - Pengembangan sentra-sentra peternakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhanbatu;
 - Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui Pembangunan *Cold Stronge* di Kabupaten Batu Bara dan Kepulauan Nias;
 - Menghidupkan kembali kearifan lokal melalui inovasi Mina Padi di seluruh Wilayah Sentra-sentra Produksi Padi.
 - b. Sektor Pariwisata :
 - Mendorong Partisipasi Swasta dalam Pembangunan *Convention Center*, perhotelan, Restoran dan *Sport Area*;
 - Pembangunan Agrotechno Park di Kawasan Mebidangro;
 - Pembangunan *Wisata Sport Eco Tourism* di Kawasan Danau Toba, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Tapanuli Selatan, Bahorok dan Tangkahan;

- Pengembangan pusat wisata budaya dan Religi sejarah (*islamic center*) di Deli Serdang, Titik Nol Masuknya islam di Barus Tapanuli Tengah dan Putri Hujau di Deli Serdang;
- Situs-situs dan cagar budaya serta wisata Mangrove pesisir timur di Kabupaten Batu Bara, Langkat dan Serdang Bedagai;
- Pelaksanaan Event Wisata seperti Festival Kopi, Buah dan Bunga di Karo serta Karnaval Kebudayaan.

2. Program Prioritas Pembangunan

Untuk mengupayakan terjadinya perubahan kearah yang lebih baik serta terciptanya pembangunan yang berarti bagi kesejahteraan rakyat, maka penyusunan program prioritas pembangunan Sumatera Utara berlandaskan kepada :

Pertama, sejalan dengan amanat Pancasila dan UUD 1945, diupayakan secara sungguh-sungguh agar hasil-hasil daerah dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Untuk itu, bagi hasil sumber daya alam terbarukan seperti perkebunan, minyak bumi, gas, hasil laut, hutan, dan emas pondo ditingkatkan. Sejalan dengan itu, penggunaan bagi-hasil tersebut bagi kesejahteraan rakyat Sumatera Utara akan dimanfaatkan dan disosialisasikan secara transparan.

Kedua, sebagaimana diketahui bahwa setiap daerah di Sumatera Utara memiliki potensi yang dapat dijadikan keunggulan daerah tersebut dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, setiap daerah didorong agar dapat menetapkan orientasi pembangunannya secara khusus dan menjadi ikon dari daerah tersebut. Sejalan dengan itu maka koordinasi pembangunan terus dimantapkan dan ego sektoral ditekan seminimal mungkin.

Ketiga, mensukseskan dan mengawal pembangunan infrastruktur yang merupakan program nasional dan mengalokasikan dana yang lebih besar bagi pembangunan infrastruktur daerah (seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pelabuhan) guna menghubungkan daerah dan memperlancar peningkatan ekonomi rakyat.

Keempat, melakukan upaya sungguh-sungguh dalam peningkatan pemahaman dan pengalaman Pancasila, wawasan kebangsaan, peningkatan iman dan taqwa, penguatan lembaga-lembaga agama dan ormas-ormas keagamaan dalam peningkatan moralitas dan karakter bangsa, peningkatan kesadaran pluralitas, dan perwujudan harmonisasi sosial yang kuat.

Kelima, memaksimalkan pelaksanaan peran seluruh instrumen pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu ditegakkan disiplin, budaya kerja, dan efisiensi dana pembangunan, sehingga roda pembangunan Sumatera Utara dapat berjalan lancar dan kesejahteraan rakyat dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Untuk itu, pendapatan asli daerah harus ditingkatkan dari berbagai sumber untuk memepersbesar alokasi dana publik.

Keenam, menekan semaksimal mungkin segala bentuk kebocoran dana pembangunan, pungli, gratifikasi, transaksi pembuatan perturan dan formasi jabatan, serta debirokratifikasi perizinan.

Ketujuh, memaksimalkan pelaksanaan Pendidikan Universal 12 tahun dan meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan melalui Peningkatan alokasi anggaran untuk urusan Pendidikan diatas 20%, pembangunan dan pengembangan perguruan tinggi baru di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan pertimbangan wilayah dengan jenis program studi disesuaikan dengan potensi dan keunggulan daerah

serta meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing dengan memberikan beasiswa kepada siswa/siswi yang layak dan kompeten.

Kedelapan, mendorong secara sungguh-sungguh peningkatan kewirausahaan (*entrepreneurship*) di kalangan rakyat, mendorong dan mengadvokasi pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha besar.

Kesembilan, meningkatkan kuantitas dan kualitas pariwisata Sumatera Utara dan halal tourism dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada serta sosialisasinya di Asia Tenggara dan dunia internasional.

Kesepuluh, memaksimalkan pencegahan narkoba, radikalisme-terorisme, perdagangan manusia (*trafficking*) dan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya.

Kesebelas, meningkatkan rasa keamanan masyarakat, serta meningkatkan peran rakyat dalam pertahanan Negara di wilayah Sumatera Utara. Pada saat yang sama melakukan advokasi rakyat dari penguasaan tanah, usaha, dan perdagangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak memiliki rasa keadilan dan kasih sayang kepada kaum yang lemah.

3. Target Kinerja Pembangunan

Sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018, ditetapkan sasaran dan target kinerja pembangunan Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Utara
Tahun 2019-2023

	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET CAPAIAN SASARAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	77	80	83	85	90
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90.4	92.3	94.3	96.3	98.1
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Poin	100.1	100.1	100.1	100.1	100.2
4	Rasio Rumah Layak huni	Persen	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68.74	68.87	69	69.13	70.00
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.5	5.45	5.4	5.35	5.3
7	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7
8	Persentase kemiskinan	Persen	8.87	8.43	8.04	7.7	7.39
9	Indeks Gini	Poin	0.325	0.32	0.315	0.31	0.3
10	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	82.99	84.52	86.29	88.59	90
11	Rasio Elektrifikasi	Persen	99.9	100	100	100	100
12	Inflasi	Persen	2.95	2.9	2.85	2.8	2.75
13	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78
14	IPM	Poin	71.35	71.67	72.22	72.77	73.32
15	Opini BPK Terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Predikat	B	B	BB	BB	BB
17	Persentase Penegakan Perda	Persen	45	60	75	80	85
18	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.79	9.97	10.15	10.33	10.50
19	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Poin	0.9	0.93	0.96	0.99	1
20	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90.87	90.93	91	91.08	91.17

INDIKATOR KINERJA		SATUAN	TARGET CAPAIAN SASARAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68	68.7	70.7	71.7	72.7
22	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	134.4	127	121	109
23	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	280,000	300,000	370,000	400,000	500,000

Sumber : Bappeda Provsu

b. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagaimana terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A.1	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	Pertumbuhan Ekonomi	5.18	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.7	Seluruh OPD
1.1	Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.87	5.37	5.38	5.41	5.43	5.46	5.46	Dinas TPH, Dinas KP, Dinas KPP, Disbun, Dinas Kehutanan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.2	Pertumbuhan Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Terhadap PDRB (ADHK)	5.17	5.47	5.48	5.49	5.50	5.52	5.52	Dinas TPH, Dinas KPP, dan Dinas Perkebunan
1.3	Pertumbuhan Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB ADHK	5.55	6.07	6.08	6.09	6.10	6.12	6.12	Dinas Kelautan dan Perikanan
1.4	Pertumbuhan Sektor Kehutanan terhadap PDRB ADHK	0.27	0.41	0.42	0.43	0.44	0.46	0.46	Dinas Kehutanan
1.5	Pertumbuhan Sektor Pertambangan terhadap PDRB ADHK	4.75	4.35	4.76	4.78	4.90	4.97	4.97	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2	Laju Inflasi	1.23	2.95	2.90	2.85	2.80	2.75	2.75	Seluruh OPD
3	PDRB Per Kapita	47,960,000	55,000,000	59,000,000	63,000,000	67,000,000	71,000,000	71,000,000	Seluruh OPD
4	PDRB Per Kapita (ADHK)	35,570,000	36,000,000	37,000,000	38,000,000	39,000,000	40,000,000	40,000,000	Seluruh OPD
5	Pengeluaran Perkapita	857,000	950,000	1,050,000	1,150,000	1,250,000	1,350,000	1,350,000	Seluruh OPD
6	Indeks Gini	0.311	0.325	0.320	0.315	0.310	0.300	0.300	Seluruh OPD
7	Indeks Ketimpangan Regional	0.5706	0.565	0.562	0.560	0.558	0.556	0.556	Seluruh OPD
8	Persentase Kemiskinan	9.66	8.87	8.43	8.04	7.70	7.39	7.39	Seluruh OPD
9	Jumlah Penduduk Miskin	1,291,990	1,298,513	1,247,505	1,202,304	1,173,832	1,127,554	1,127,554	Seluruh OPD
10	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	44.00	48.25	50.38	50.80	51.66	50.82	50.82	BPPRD
11	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
A.2	FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71.18	71.12	71.67	72.22	72.77	73.32	73.32	Seluruh OPD
2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90.66	90.87	90.93	91.00	91.08	91.17	91.17	Dinas PP PA
3	Angka Melek Huruf	98.96	99.24	99.38	99.52	99.66	99.80	99.80	Dinas Pendidikan
4	Rata-rata Lama Sekolah	9.34	9.45	9.62	9.79	9.95	10.12	10.12	Dinas Pendidikan
5	Harapan Lama Sekolah	13.14	13.37	13.81	14.01	14.21	14.42	14.42	Dinas Pendidikan
6	Usia Harapan Hidup	68,37 Tahun	68,54 Tahun	68,72 Tahun	68,89 Tahun	69,07 Tahun	70,00 Tahun	70,00 Tahun	Dinkes
7	Penanganan Daerah Rawan Bencana	4.00	4.00	4.00	5.00	5.00	5.00	25.00	BPBD
8	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	71.82	73.01	74.20	75.39	76.58	77.77	77.77	Dinas Tenaga Kerja
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	5.56	5.50	5.45	5.40	5.35	5.30	5.30	Dinas Tenaga Kerja
10	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	CC	B	B	BB	BB	BB	BB	Biro Organisasi
A.3	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA								
1	Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga								
1.1	Jumlah Group Kesenian	38	48	58	68	78	88	88	Dinas Budpar
1.2	Jumlah Gedung Kesenian	4	5	5	6	6	7	7	Dinas Budpar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3	Jumlah Klub Olahraga	1,837	2,020	2,203	2,386	2,569	2,752	2,752	Dispora
1.4	Jumlah Gedung Olahraga	11	14	18	22	27	34	34	Dispora
B ASPEK PELAYANAN UMUM									
B.1 FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB									
B.1.1 PELAYANAN DASAR									
1 PENDIDIKAN									
1.1	APK SM Sederajat	97.14	97.44	98.14	98.44	99.14	99.44	99.44	Dinas Pendidikan
1.2	APM SM Sederajat	71.19	71.49	73.19	73.49	74.19	74.49	74.49	Dinas Pendidikan
1.3	Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SM SEDERAJAT	43.44	44.9	45.84	47.04	48.24	49.44	49.44	Dinas Pendidikan
1.4	Persentase Guru SMA/LB berkualifikasi Akademik S1/D4	96.43	96.2	97	97.4	98.2	99.01	99.01	Dinas Pendidikan
1.5	Persentase Guru SMA/LB bersertifikasi	NA	56.1	57.4	58.7	60	61.3	61.3	Dinas Pendidikan
1.6	Persentase Guru SMK berkualifikasi akademik S1/D4	94.12	94.42	94.72	95.02	95.32	95.62	95.62	Dinas Pendidikan
1.7	Persentase Guru SMK bersertifikasi	NA	42.7	43.4	44.1	44.8	45.5	45.5	Dinas Pendidikan
2 KESEHATAN									
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup	NA	4.5	4.3	4.1	3.9	3.7	3.7	Dinkes

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.2	Angka Kesakitan (Morbiditas)	11.07	11.01	10.99	10.97	10.95	10.93	10.93	Dinkes
2.3	Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	NA	80.1	75.1	70.2	68.1	64.3	64.3	Dinkes
2.4	Prevalensi Stunting (Pendek dan sangat Pendek) pada Anak dibawah 5 Tahun	32.30	31.50	30.50	29.50	28.50	27.50	27.50	Dinkes
2.5	Pencapaian Persentase BOR (<i>Bed Occupancy Rate</i>) Rumah Sakit Jiwa	98.12	97.00	95.00	90.00	85.00	80.00	80	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.6	Rata-rata LOS (<i>Length of Stay</i>) Rumah Sakit Jiwa	66.36	65 hari	61 hari	57 hari	50 hari	42 hari	42	Rumah Sakit Jiwa Daerah
2.7	<i>Persentase Bed Occupancy Rate BOR</i>) Rumah Sakit Haji	49	60.00	62.00	65.00	67.00	70.00	70	Rumah Sakit Haji Medan
2.8	<i>Length Of Stay (LOS)</i> Rumah Sakit Haji	5	6.00	6.00	7.00	7.00		8	Rumah Sakit Haji Medan
2.9	<i>Bed Turn Over (BTO)</i> 40-50 Rumah Sakit Haji	36	40.00	42.00	42.00	41.00	40.00	40	Rumah Sakit Haji Medan
2.10	<i>Turn Over Internal (TOI)</i> Rumah Sakit Haji	5	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	2	Rumah Sakit Haji Medan
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
3.1	PEKERJAAN UMUM								
3.1.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90	90	Dinas BM & BK

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Kondisi Mantap								
3.1.2	Persentase Jembatan Dalam Kondisi Baik	81.88	84.26	84.78	85.42	87.24	88.43	88.43	Dinas BM & BK
3.1.3	Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Klasifikasi Ahli	2.65	-	2.68	2.71	2.74	2.77	2.8	Dinas BM & BK
3.1.4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	88.51	89.23	89.66	90.02	90.33	90.61	90.61	Dinas SDA, CK & TR
3.1.5	Cakupan Akses Minum Perpipaan (%)	12.78	15.28	15.77	17.01	17.69	18.99	18.99	Dinas SDA, CK & TR
3.1.6	Cakupan Pelayanan Air Limbah Perpipaan (Sambungan Rumah/SR)	-	100	200	300	400	500	500	Dinas SDA, CK & TR
3.1.7	Pengurangan timbunan sampah antar kab/kota (TPA Regional)	-	1	1	1	1	1	5	Dinas SDA, CK & TR
3.1.8	Cakupan penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala Kota (KK) (kumulatif)	-	500,000	535,000	570,000	605,000	640,000	640,000	Dinas SDA, CK & TR
3.1.9	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81.82	82.50	84.00	85.50	87.00	88.50	88.50	Dinas SDA, CK & TR
3.1.1 0	Layanan irigasi rawa dalam kondisi optimal (%)	53.48	55.00	57.50	60.00	62.50	65.00	65.00	Dinas SDA, CK & TR
3.1.1 2	Kapasitas daya tampung sumber Air Baku dalam Bentuk Waduk/Embung/ Situ (M3)	325,000	5,000	20,000	20,000	20,000	20,000	410,000	Dinas SDA, CK & TR

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.2	PENATAAN RUANG								
3.2.1	Persentase kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dengan implementasi pembangunan daerah (%)	NA	70	70	70	75	75	75	Dinas SDA, CK & TR
3.2.2	Tersedianya regulasi daerah tentang pengendalian pemanfaatan ruang (Perda/Pergub)	NA	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	1 Perda/ Pergub	5 Perda/ Pergub	Dinas SDA, CK & TR
3.2.3	Tersedianya regulasi daerah tentang RTR Kawasan Strategis Provinsi yang diterbitkan (Perda)	NA	0	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	5 Perda	Dinas SDA, CK & TR
3.2.4	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Provinsi berserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	NA	20	40	60	80	100	100	Dinas SDA, CK & TR
4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
4.1	Rasio Rumah Layak Huni (%)	NA	92.72	93.22	93.72	94.22	94.72	94.72	Dinas PKP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4.2	Pengurangan luas Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan (ha/tahun)	135	135 ha	135 ha	135 ha	135 ha	135 ha	675 ha	Dinas PKP
4.3	Cakupan Lingkungan Yang Sehat Dan Aman yang Didukung Dengan PSU (Unit)	Na	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	Dinas PKP
5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
5.1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	10,383	12,978	16,226	20,321	25,401	31,751	31,751	Satpol PP
5.2	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	20	65	68	71	76	80	80	Satpol PP
5.3	Persentase Penegakan PERDA	33	45	60	75	80	85	85	Satpol PP
5.4	Persentase LSM Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bakesbangpol
5.5	Persentase Partisipasi Pemilih	63	64	64	64	64	65	42 Kegiatan	Bakesbangpol
5.6	Persentase Pertambahan Ormas	160	20	20	20	20	20	260 Ormas	Bakesbangpol
5.7	Peringkat Laporan Rencana Aksi Penanganan Konflik sosial	9	1	9	8	8	7	7	Bakesbangpol

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5.8	Persentase Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	100	100	100	100	100	100	100	Bakesbangpol
5.9	Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (Kab/Kota)	33	33	33	33	33	33	33	BPBD
5.10	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3	3	4	5	5	5	22	BPBD
5.11	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota)	2	2	2	2	3	3	12	BPBD
5.12	Indeks Resiko Bencana	150	145	134.4	127	121	109	109	BPBD
6	SOSIAL								
6.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1,277	1,167	1,167	1,167	1,167	1,167	5,835	Dinas Sosial
6.2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	440	530	530	530	530	530	2,650	Dinas Sosial
6.3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	310	293	293	293	293	293	1,465	Dinas Sosial
6.4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis	320	285	285	285	285	285	1,425	Dinas Sosial

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	didalam Panti								
6.5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Provinsi	2000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	Dinas Sosial
B.1.2	NON PELAYANAN DASAR								
1	TENAGA KERJA								
1.1	Rasio Penduduk yang bekerja (%)	93.20	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	5.47	Dinas Tenaga Kerja
1.2	Angka Kesempatan Kerja (jiwa)	NA	6,452,182	6,683,245	7,041,964	7,521,576	8,124,267	8,124,267	Dinas Tenaga Kerja
1.3	Produktivitas Tenaga Kerja Bruto (juta Rp./TK)	NA	21.95	22.59	23.30	24.09	24.96	24.96	Dinas Tenaga Kerja
1.4	Angka Penganggur Terbuka (jiwa)	NA	383,088	389,086	395,287	401,699	408,326	408,326	Dinas Tenaga Kerja
2	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
2.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69.35	70.34	71.61	72.88	75.15	75.42	75.42	Seluruh OPD
2.2	Pesentase Kabupaten/kota layak Anak (menuju)	17	30	45	60	75	90	90	Seluruh OPD

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2.3	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsive Gender)	40	50	60	70	80	100	100	Dinas PP dan PA
2.4	Persentase Cakupan layanan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	55	60	72	78	84	96	96	Dinas PP dan PA
2.5	Rasio kekerasan terhadap Perempuan	17	15	13	10	7	5	5	Dinas PP dan PA
2.6	Rasio kekerasan terhadap Anak	20.5	20	18	15	13	10	10	Dinas PP dan PA
2.7	Persentase Ketersediaan data, Informasi gender dan anak yang <i>up to date</i>	55	60	65	70	75	90	90	Dinas PP dan PA
3	PANGAN								
3.1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89.10	90.40	92.30	94.30	96.30	98.10	98.10	Dinas Ketapang
3.2	Produksi Daging (ton)	164,748.17	169,775.74	175,551.96	181,328.18	187,104.40	192,880.62	192,880.62	Dinas Ketapang
3.3	Produksi Telur (ton)	265,515.36	186,062.33	191,961.45	197,860.67	203,759.69	209,658.81	209,658.81	Dinas Ketapang
3.4	Produksi susu (ton)	1,843.20	1,587.56	1,661.68	1,735.80	1,809.92	1,884.05	1,884.05	Dinas Ketapang

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
4	PERTANAHAN								
5	LINGKUNGAN HIDUP								
5.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (%)	67.17	68.00	68.70	70.70	71.70	72.70	72.70	Dinas Lingkungan Hidup
5.2	Indeks Kualitas Air (%)	77.50	78.00	79.00	80.00	81.00	82.00	82.00	Dinas Lingkungan Hidup
5.3	Indeks Kualitas Udara (%)	85.59	86.00	87.00	88.00	89.00	90.00	90.00	Dinas Lingkungan Hidup
5.4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	45.60	47.00	47.26	50.75	51.75	52.75	52.75	Dinas Lingkungan Hidup
6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0.242424242	0.363636364	0.51515152	0.666666667	0.818181818	1		
6.1	Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	78,76%	84%	87%	90%	93%	96%	96%	Dinas Adm. Duk &Capil
6.2	Cakupan Akte Anak Usia 0- 18 Tahun	68,02%	71%	76%	81%	86%	91%	91%	
6.3	Cakupan Akte Perkawinan	27,47%	32%	37%	42%	47%	52%	52%	
6.4	Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA)	24	36	52	67	82	100	100	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
6.5	Persentase OPD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan	41	53	65	78	84	100	100	
		0.41	0.53	0.65	0.78	0.84	1.00	1.00	
7	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
7.1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang Aktif	-	30	32	35	38	40	40	Dinas Pemdes
7.2	Persentase Kelompok Binaan PKK	-	40	42	45	50	55	55	Dinas Pemdes
7.3	Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	-	5	6	7	8	9	9	Dinas Pemdes
8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
8.1	Total Fertility Rate (TFR)	2.91	2.86	2.84	2.82	2.8	2.78	2.78	Dinas PP dan KB
8.2	Rata-rata Anak Per Keluarga	2.46	2.20	2.18	2.16	2.14	2.12	2.12	Dinas PP dan KB
8.3	Persentase Pemakaian Kontrasepsi/CPR	54	59.2	59.39	59.57	59.75	60	60	Dinas PP dan KB

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8.4	Median Usia Kawin Pertama bagi Perempuan	21.92	22.02	22.11	22.2	22.29	22.38	22.38	Dinas PP dan KB
8.5	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	20.07%	19.00%	18.00%	17.00%	16.00%	15.00%	15.00%	Dinas PP dan KB
8.6	Cakupan PUS yang Ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11.54%	12.50%	11.50%	10.50%	9.50%	8.50%	8.50%	Dinas PP dan KB
8.7	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	33.1%	32.00%	34.00%	36.00%	38.00%	40.00%	40.00%	Dinas PP dan KB
8.8	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber- KB	56,88	59,10%	62,25%	65,80%	69,12%	70,30%	70,30%	Dinas PP dan KB
8.9	Cakupan Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber- KB	38,35%	43,20%	45,15%	48,25%	51,42%	57,35%	57,35%	Dinas PP dan KB
8.10	Cakupan Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber- KB	50,20%	54,20%	56,70%	59,47%	60,10%	62,52%	62,52%	Dinas PP dan KB
9	PERHUBUNGAN								
9.1	Persentase Tersedianya Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas pada Jalan Provinsi (%)	N/A	90	92	94	96	98	98	Dinas Perhubungan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
10.1	Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat Sumut	67%	84%	86%	90%	95%	100%	100%	Diskominfo
10.2	Cakupan Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	80%	85%	87%	90%	95%	100%	100%	Diskominfo
10.3	Rasio sistem pelayanan berbasis online	6%	20%	41%	61%	82%	100%	100%	Diskominfo
11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
11.1	Persentase Koperasi Aktif	57.26	58.00	59.00	60.00	61.00	62.00	62.00	Dinas K UKM
11.2	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil (Unit)	2,857,124	2,858,000	2,859,000	2,860,000	2,861,000	2,862,000	2,862,000	Dinas KUKM
12	PENANAMAN MODAL								
12.1	Investor PMDN (Proyek)	187	309	200	205	215	210	215	DPM & P2TSP
12.2	Investor PMA (Proyek)	330	380	337	342	342	357	362	DPM & P2TSP
12.3	Nilai Investasi PMDN (Rp. Triliun)	11.68	8.37	11.89	12.00	12.75	13.00	13.60	DPM & P2TSP
12.4	Nilai Investasi PMA (Rp. Triliun)	20.24	16.45	21.11	22.00	22.25	23.00	23.40	DPM & P2TSP
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMDN	31.92	38.19	33.00	33.80	34.00	34.60	34.70	DPM & P2TSP
12.6	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja PMA	10.69	11.26	11.30	11.40	12.00	12.30	12.30	DPM & P2TSP

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12.7	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi (PMDN)	136	28.35	68.50	68.75	70.00	70.20	70.50	DPM & P2TSP
12.8	Lama Proses Perizinan								DPM & P2TSP
	- PMDN	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	3 Hari Kerja	
	- Sektoral	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	3 - 40 Hari Kerja	
13	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
13.1	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	NA	71	73	75	77	78	78	Dispora
13.2	Persentase Wirausaha Muda	NA	56	62	70	70	75	81	Dispora
13.3	Cakupan Pembinaan Cabang Olahraga	NA	88	90	92	94	95	95	Dispora
13.4	Cakupan Pelatih yang Bersertifikat	NA	90	91	92	93	94	94	Dispora
13.5	Cakupan Pembinaan Atlet Muda	NA	71	75	79	83	87	87	Dispora
14	STATISTIK								
14.1	Data Statistik Sektoral	NA	25%	50%	75%	85%	100%	100%	Diskominfo
15	PERSANDIAN								
15.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Memahami Persandian dan Keamanan Informasi	NA	10%	25%	55%	75%	100%	100%	Diskominfo

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
16	KEBUDAYAAN								
16.1	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	20	21	22	23	24	25	25	Dinas Budpar
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	8	9	10	11	12	13	13	Dinas Budpar
16.3	Jumlah Karya Budaya yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	608	625	650	675	700	725	725	Dinas Budpar
17	PERPUSTAKAAN								
17.1	Pengunjung Perpustakaan Per Tahun	129,562	160,395	192,474	221,345	243,480	267,828	1,200,091	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.2	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah	14.790	11,611	11,959	12,318	12,688	13,068	835,706	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0.61%	0.06%	0.08%	0.10%	0.13%	0.17%	1.16%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.4	Rata-rata Pengunjung Perpustakaan/Tahun	9,547	2,864	3,723	4,840	6,292	8,180	35,447	Dinas Perpustakaan dan Arsip
17.5	Koleksi Judul Buku Perpustakaan	98,326	3,441	4,474	5,816	7,561	9,829	129,447	Dinas Perpustakaan dan Arsip

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
17.6	Indeks Minat Membaca	-	1%	1.4%	1.6%	1.7%	1.9%	1.9%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18	KEARSIPAN								
18.1	Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Baku	42%	4%	4.62%	5.08%	5.59%	6.15%	67.64%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
18.2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	248	50	60	71	86	103	618	
B.2	FOKUS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
1	PARIWISATA								
1.1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	231.465	280,000	300,000	370,000	400,000	500,000	500,000	Dinas Budpar
1.2	Lama Kunjungan Wisata	NA	2.26	2.36	2.46	2.56	2.66	2.66	Dinas Budpar
1.3	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB (%)	7.38	8.15	8.56	8.99	9.44	9.92	9.92	Dinas Budpar
1.4	Daerah yang difasilitasi untuk pengembangan destinasi	2	2	2	3	3	2	12	Dinas Budpar
2	PERTANIAN/PERKEBUNAN								
2.1	Produksi Tanaman Pangan								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton GKG)	5,136,186.00	5,375,167.60	5,498,796.45	5,625,268.77	5,754,649.95	5,887,006.90	5,887,006.90	
	2. Jagung (ton pipilan kering)	1,741,258.00	1,829,409.19	1,875,144.42	1,922,023.03	1,970,073.60	2,019,325.44	2,019,325.44	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	3. Kedele (ton)	7,778.00	8,905.03	9,528.38	10,195.37	10,909.05	11,672.68	11,672.68	
2.2	Produktivitas Tanaman Pangan								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Padi (ton/Ha)	5.20	5.22	5.23	5.25	5.26	5.27	5.27	
	2. Jagung (ton/Ha)	6.19	6.24	6.27	6.29	6.32	6.35	6.35	
	3. Kedele (ton/ha)	1.30	1.30	1.31	1.31	1.32	1.32	1.32	
2.3	Produksi Tanaman Holtikultura								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	16,103.20	16,918.42	17,341.39	17,774.92	18,219.29	18,674.78	18,674.78	
	2. Cabe (ton)	159,131.00	168,822.08	173,886.74	179,103.34	184,476.44	190,010.74	190,010.74	
	3. Sayur-sayuran (ton)	988,612.30	998,498.42	1,008,483.41	1,018,568.24	1,028,753.92	1,039,041.46	1,039,041.46	
	4. Buah - buahan (ton)	1,154,687.60	1,180,230.44	1,193,212.98	1,206,338.32	1,219,608.04	1,233,023.73	1,233,023.73	
2.4	Produktivitas Tanaman Holtikultura								Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura
	1. Bawang Merah (ton)	7.70	7.89	7.99	8.08	8.18	8.28	8.28	
	2. Cabe (ton)	9.70	9.91	10.02	10.13	10.24	10.36	10.36	
2.5	Persentase peningkatan produksi tanaman perkebunan rakyat (PR) (%/tahun)		300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	300.00%	Dinas Perkebunan
2.6	Produksi								Dinas Perkebunan
	1. K. Sawit (ton)	6,729,162.09	7,004,659.63	7,223,006.12	7,447,877.73	7,679,553.61	7,918,271.07	7,918,271.07	
	2. Karet (ton)	309,760.12	323,589.02	326,824.91	330,093.16	333,394.09	336,728.03	336,728.03	
	3. Kopi Arabika (ton)	63,233.94	65,327.91	67,666.65	70,089.12	72,598.31	75,197.32	75,197.32	
	3. Kopi Robusta (ton)	8,835.09	9,223.04	9,407.50	9,595.65	9,787.56	9,983.32	9,983.32	
	4. Kelapa (ton)	97,033.44	102,943.95	106,311.66	107,733.83	110,211.71	112,746.58	112,746.58	

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	5. Kakao (ton)	35,430.38	41,936.76	42,146.44	42,357.17	42,568.95	42,781.79	42,781.79	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (ton)	37,472.76	42,028.92	43,037.24	44,175.89	45,365.99	46,576.52	46,576.52	
2.7	Produktifitas sektor perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, kelapa, kakao)								
	1. K. Sawit (kg/Ha/tahun)	15,962.67	16,202.11	16,445.14	16,691.81	16,942.19	17,196.32	17,454.27	Dinas Perkebunan
	2. Karet (kg/Ha/tahun)	1,082.33	1,091.35	1,098.25	1,103.25	1,104.15	1,105.36	1,105.36	
	3. Kopi Arabika (kg/Ha/tahun)	1,135.93	1,158.65	1,181.83	1,205.46	1,229.57	1,254.16	1,279.25	
	3. Kopi Robusta (kg/Ha/tahun)	783.52	795.27	807.20	819.31	831.60	844.08	856.74	
	4. Kelapa (kg/Ha/tahun)	1,063.15	1,067.41	1,070.61	1,073.82	1,078.12	1,082.43	1,082.43	
	5. Kakao (kg/Ha/tahun)	1,028.07	1,029.25	1,030.00	1,031.02	1,046.48	1,062.18	1,062.18	
	6. Komoditi perkebunan lainnya (kg/Ha/tahun)								
2.8	Luas Areal								
	1. K. Sawit (Ha)	414,915.84	437,889.03	443,581.59	449,348.15	454,740.33	460,197.21	460,197.21	Dinas Perkebunan
	2. Karet (Ha)	394,113.57	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	393,189.02	
	3. Kopi Arabika (Ha)	61,063.35	73,214.13	74,495.38	75,799.05	77,125.53	78,475.23	78,475.23	
	3. Kopi Robusta (Ha)	20,643.00	19,609.88	19,805.98	20,004.04	20,204.08	20,406.12	20,406.12	
	4. Kelapa (Ha)	110,457.93	109,935.50	110,760.02	111,590.72	112,427.65	113,270.86	113,270.86	
	5. Kakao (Ha)	66,623.88	56,630.65	57,055.38	57,483.29	57,914.42	58,348.78	58,348.78	
	6. Komoditi Lainnya (Ha)	60,096.42	63,000.41	63,438.56	63,880.23	64,325.44	64,774.23	64,774.23	
2.9	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018								

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3	KEHUTANAN								
3.1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis (Ha)	276.336	276,336	276,226	276,116	276,000	275,900	275,900	Dinas Kehutanan
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan (Ha)	60,500	60,500	59,500	58,500	57,500	56,500	56,500	Dinas Kehutanan
3.3	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB (%)	0.84	0.84	0.85	0.86	0.87	0.88	0.88	Dinas Kehutanan
4	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
4.1	Daya Listrik Terpasang	4,552.44	4,244.00	5,307.00	6,496.00	6,546.00	6,683.00	6,683.00	Dinas ESDM
4.2	Rasio Elektrifikasi	99.99	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas ESDM
5	PERDAGANGAN								
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	3,992.69	4,900.00	5,200.00	5,500.00	5,800.00	6,200.00	6,200.00	Disperindag
5.2	Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	5.87	6.48	6.50	6.77	6.79	6.95	6.95	Disperindag
6	PERINDUSTRIAN								
6.1	Laju Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap PDRB ADHK	2.31	3.27	3.29	3.35	3.45	3.53	3.53	Disperindag
6.2	Pertumbuhan Industri								Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang	4.01	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	9.00	Disperindag
	- Pertumbuhan Industri Mikro dan Kecil	7.90	8.50	9.10	9.70	10.30	11.30	11.30	Disperindag

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
7	TRANSMIGRASI								
8	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
8.1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	503,232.20	544,232.57	560,559.54	577,376.32	594,697.61	612,538.53	612,538.53	DKP
8.2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	243,829.40	237,222	244,339	251,669	259,219	266,996	266,996.00	DKP
8.3	Konsumsi Ikan Masyarakat (Kg/Kap/Thn)	42.33	44.24	45.57	46.91	48.34	49.79	49.79	DKP
8.4	Luasan (Ha)								DKP
a	Kawasan Konservasi Perairan (Ha)	29,000	138,438.4	25,000	25,000	25,000	25,000	267,438.4	DKP
b	Kawasan Rehabilitasi								DKP
b.1	Rehabilitas Ekosistem Terumbu Karang (m²)	2,141	500	500	500	500	500	3,941	DKP
b.2	Rehabilitas Ekosistem Mangrove (Ha)	30	3	3	3	3	3	42	DKP
B.3	FOKUS LAYANAN URUSAN PENUNJANG								
1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN								
1.1	Tingkat Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
1.2	Tingkat Konsistensi Program RKPD kedalam Penjabaran APBD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1.3	Tingkat Pengendalian Target Capaian Pembangunan Daerah	76%	80%	85%	90%	95%	100%	100%	Bappeda
2	KEUANGAN								
2.1	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2.2	Persentase SILPA Terhadap APBD	NA	11.5	1.73	1.25	1.53	1.47	1.47	BPKAD
2.3	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	22.60	25.00	25.35	25.83	26.15	26.85	26.85	BPKAD
2.4	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	4.43	19.00	19.35	19.75	20.25	21.15	21.15	BPKAD
2.5	Perbandingan Antara Belanja Langsung Dengan Belanja Tidak Langsung	30.13	36:64	38:62	38:62	39:61	40:60	40:60	BPKAD
2.6	Bagi Hasil Kab/Kota dan Desa	2.9	11.03	10.72	10.89	11.10	11.71	11.71	BPKAD
2.7	Penetapan APBD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	BPKAD
3	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
	Pengembangan Sumber Daya Manusia								
3.1	Rata-rata Lama Pegawai Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	35 hari	36 hari	36 hari	37 hari	37 hari	40 hari	40 hari	BPSDM

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
3.2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	NA	17.49	19.24	18.24	21.16	23.28	25.61	BPSDM
4	KEPEGAWAIAN DAERAH								
4.1	Jabatan Pimpinan Tinggi pada Instansi Pemerintah	60	60	60	60	60	60	300	BKD
4.2	Jabatan Administrasi pada Instansi Pemerintah	398	1	1	1	1	1	403	BKD
4.3	Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	BKD
4.4	Pemangku Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah	1.64	25	26	27	28	29	137	BKD
5	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.1	Persentase Implementasi Rencana Kelitbaangan	NA	20	20	20	20	20	100	Balitbang
5.2	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	NA	20%	20%	30%	30%	30%	30%	Balitbang
5.3	Penerapan SIDA:								Balitbang
5.4	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	15	15	20	25	30	35	35	Balitbang

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
5.5	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	NA	50%	50%	50%	50%	50%	50%	Balitbang
6	PENGAWASAN								
6.1	Persentase Tindak Lanjut Temuan	65	71	76	81	86	91	91	Inspektorat
6.2	Persentase Hasil Penanganan Kasus Kasus serta Pengaduan Masyarakat pada OPD Provinsi dan Kab/Kota dan Limpahan Instansi Tingkat Atas	50	50	55	60	65	70	70	Inspektorat
7	BADAN PENGHUBUNG								
7.1	Persentase hubungan antar lembaga	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Badan Penghubung
7.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Badan Penghubung
8	SEKRETARIAT DEWAN								
8.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada Setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi	9 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	10 Laporan Hasil Kerja Tahunan	Setwan

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
8.2	Tersusun dan Terintegrasinya Program-program Kerja DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahun (RPJM) Maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	Setwan
8.3	Terintegrasi Program-program DPRD Untuk Melaksanakan Fungsi Pengawas, Pembentukan Perda, dan Anggaran Kedalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	18	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	9 Program	Setwan
9	SEKRETARIAT DAERAH								
9.1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik yang diselenggarakan perangkat daerah	-	B	B	B	A	A	A	Biro Organisasi

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9.2	Indeks Kerukunan Umat Beragama	NA	77	80	83	85	90	90	Biro Sosial
9.3	Jumlah fasilitasi kehumasan	-	10	12	14	16	18	70	Biro Humas dan Protokol
9.4	Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan	-	50%	60%	70%	80%	90%	90%	Biro Pemerintahan
9.5	Penyelesaian Batas Daerah	14	20	15	0	0	0	0	Biro Pemerintahan
9.6	Jumlah fasilitasi kerjasama	-	4	4	4	4	4	20	Biro Otda dan KS
9.7	Perkembangan kemajuan laporan realisasi fisik pembangunan daerah setiap OPD secara tepat waktu (%)	-	80	90	100	100	100	100	Biro Adm. Pemb. & Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9.8	Tingkat kepuasan pengguna jasa terhadap layanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (%)	-	70	75	80	85	90	90	Biro Adm. Pemb. & Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9.9	Persentase Rancangan Produk Hukum Provinsi yang telah dieksaminasi	1,000							Biro Hukum
	Persentase Rancangan Produk Hukum daerah Kab/Kota yang telah di Evaluasi dan difasilitasi								Biro Hukum

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Persentase jumlah penanganan perkara hukum di pengadilan								Biro Hukum
9.10	Tingkat kepuasan terhadap layanan administrasi dan konsultasi (%)	-	70	75	80	85	90	90	Biro Umum dan Perlengkapan
9.11	Tingkat realisasi pendapatan asli daerah dari pemanfaatan gedung dan mess pemerintah provinsi (%)	-	80	85	90	95	100	100	Biro Umum dan Perlengkapan
C. ASPEK DAYA SAING DAERAH									
C.1 FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH									
1	Nilai Tukar Petani	97.98	100.10	100.10	100.10	100.10	100.22	100.22	Dinas Ketapang & Peternakan, Dinas TPH, Dinas Perkebunan, DKP
	- Peternakan	112.07	113.65	114.44	115.23	116.02	116.81	116.81	
	- Pangan	93.11	100.62	100.64	100.66	100.68	100.82	100.82	
	- Holtikultura	94.22	100.98	101.01	101.03	101.06	101.20	101.20	
	- Perikanan	103.17	101.12	101.14	101.15	101.16	101.29	101.29	
	- Perkebunan	98.53	99.02	99.51	100.01	100.51	101.01	101.01	
2	Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkpita	86.99	86.99	88.00	88.00	88.00	88.00	88.00	
C.2 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR									
1	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap	81.17	82.99	84.52	86.29	88.59	90	90	Dinas BM & BK

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung jawab
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
2	Rasio Elektrifikasi	99.99	99.90	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas ESDM
3	Layanan irigasi permukaan dalam kondisi optimal (%)	81.82	82.50	84.00	85.50	87.00	88.50	88.50	Dinas SDA, CK, TR
4	Cakupan Layanan Akses Air Minum Layak	88.51	89.23	89.66	90.02	90.33	90.61	90.61	Dinas SDA, CK, TR
5	Cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan	-	87.97	90.16	92.01	93.61	95.02	95.02	Dinas SDA, CK, TR
C.3 FOKUS IKLIM BERINVESTASI									
1	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah	18	20	20	20	20	20	20	BP2RDSU
2	Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha	2	1	1	1	1	1	2	DPM & P2TSP
C.4 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA									
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	97.14	97.03	97.16	97.28	97.40	97.52	97.52	Dinas Pendidikan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA	71.19	69.07	69.33	69.59	69.86	70.12	70.12	Dinas Pendidikan
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	98.27	97.04	97.06	97.08	97.11	97.13	97.13	Dinas Pendidikan
4	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	93.59	94.26	94.59	94.93	95.26	95.60	95.60	Dinas Pendidikan
*) Untuk Indikator Dengan Target Penjumlahan, Tidak Menggunakan Rumus Tetapi Langsung Menentukan Jumlah Yang Dicapai									
*) Indikator Diatas Dapat Disesuaikan/Ditambah Sesuai Dengan Kebutuhan									

BAB III

URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 telah melaksanakan urusan konkuren pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan gambaran tentang keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan layanan dan daya saing. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019 merupakan bagian dari masa waktu RPJMD 2019-2023, maka tahun ini merupakan tahun pertama dalam mencapai target dan capaian yang sudah direncanakan melalui RPJMD. Dalam melaksanakan urusan konkuren pemerintahan (urusan wajib dan urusan pilihan), fungsi penunjang urusan pemerintahan dan urusan pemerintahan umum, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melaksanakan berbagai strategi dan program kegiatan yang mengacu kepada pencapaian RPJMD 2019-2023.

Guna mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah sebagai pelaksana otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan organisasi penyelenggara urusan pemerintahan sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.1

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Konkuren, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB		
1	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan
		RS. Umum Haji Medan
		RS. Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem
3	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi
		Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
4	Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Urusan Wajib Trantibum dan Linmas	Satuan Polisi Pamong Praja
6	Urusan Wajib Sosial	Dinas Sosial
7	Urusan Wajib Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
8	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Urusan Wajib Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
10	Urusan Wajib Pertanahan	Biro Pemerintahan
11	Urusan Wajib Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
12	Urusan Wajib Adm. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14	Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Urusan Wajib Perhubungan	Dinas Perhubungan
16	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Urusan Wajib Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi dan UKM
18	Urusan Wajib Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
19	Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Pemuda dan Olahraga
20	Urusan Wajib Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Wajib Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika
22	Urusan Wajib Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
23	Urusan Wajib Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
24	Urusan Wajib Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Arsip
URUSAN PILIHAN		
1	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Urusan Pilihan Pertanian	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan
3	Urusan Pilihan Kehutanan	Dinas Kehutanan
4	Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Urusan Pilihan Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
6	Urusan Pilihan Perindustrian	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Biro Perekonomian
8	Urusan Pilihan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
2	Inspektorat	
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	Badan Penelitian dan Pengembangan	
6	Badan Kepegawaian Daerah	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
8	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	
9	Badan Penghubung Daerah	
10	Sekretariat DPRD	
11	Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama	
12	Biro Hukum	

NO	URUSAN YANG DILAKSANAKAN	OPD PELAKSANA
13	Biro Organisasi	
14	Biro Administrasi Pembangunan	
15	Biro Humas dan Keprotokolan	
16	Biro Sosial dan Kesejahteraan	
17	Biro Umum dan Perlengkapan	
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan OPD baik urusan wajib dan urusan pilihan, maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan arah kebijakan umum APBD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB

1. Urusan Wajib Pendidikan

Perkembangan capaian indikator utama bidang pendidikan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah/Sederajat

Tabel 3.2
Capaian Kinerja APK Sekolah Menengah/Sederajat
Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APK SM Sederajat	95,00	97,14	102,25	97,44	100,83	103,47

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Realisasi APK Sekolah Menengah/Sederajat tahun 2019 mencapai 100,83 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,44, persentase pencapaian 103,47, dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 3,39, sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami kenaikan mencapai 3,69. Pada tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 97,14 menjadi 100,83 pada tahun 2019, dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 797.800 orang sedangkan jumlah siswa yang sekolah di Sekolah Menengah/Sederajat berjumlah 804.385 siswa.

2) Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah/Sederajat

Tabel 3.3
Capaian Kinerja APM Sekolah Menengah/Sederajat
Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
APM SM Sederajat	74,00	71,19	96,20	71,49	80,61	112,76

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Realisasi APM Sekolah Menengah/Sederajat tahun 2019 mencapai 80,61 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 71,49. Persentase pencapaian IKU ini adalah 112,76 dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi kenaikan sebesar 9,12. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 kenaikannya mencapai 9,42 yaitu pada tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 71,19 menjadi 80,61 pada tahun 2019, dimana jumlah penduduk usia 16-18 tahun adalah 797.800 orang sedangkan jumlah siswa usia 16-18 Tahun yang sekolah di Sekolah Menengah/Sederajat berjumlah 643.137 siswa.

3) Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Sekolah Menengah/Sederajat

Tabel 3.4
Capaian Kinerja APM Sekolah Menengah/Sederajat
Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Nilai Rata-Rata Ujian Nasional SM Sederajat	43,60	43,44	98,99	44,90	44,64	99,42

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Realisasi indikator Nilai Rata-Rata Ujian Nasional Sekolah Menengah/Sederajat tahun 2019 mencapai 44,64 dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 44,90, persentase pencapaian 99,42 dimana perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 0,26. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 1,20 yaitu pada tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 98,99 menjadi 99,42 pada tahun 2019, dimana jumlah peserta Ujian Nasional Tahun 2019 adalah 206.605 siswa dengan jumlah rata-rata nilai Ujian Nasional 44.64.

4) Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Presentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMA/LB berkualifikasi akademik minimal S1/D4	93.00	96.43	103.69	96.20	90.14	93.71

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Indikator kinerja adalah Persentase Guru SMA/LB Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4, target yang direncanakan sebesar 96.20, dimana realisasi pelaksanaan sebesar 90.14 dengan capaian presentase kinerja yang baik yaitu mencapai sebesar 93.71. Perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 6.06, sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 penurunannya mencapai 6.29, dimana jumlah guru SMA/LB yang berkualifikasi tahun 2019 adalah 19.400 orang sedangkan guru SMA/LB berjumlah 21.521 orang.

5) Persentase Guru SMA/LB Bersertifikasi

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Presentase Guru SMA/LB Bersertifikasi

Indikator Kinerja	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMA/LB bersertifikasi	56.10	52.07	92.82

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Jumlah guru SMA/LB yang bersertifikasi tahun 2019 adalah 11.622 orang, sedangkan guru SMA/LB berjumlah 22.319 orang.

6) Persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Presentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4 Tahun 2018 – 2019

Indikator Kinerja	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMK berkualifikasi akademik minimal S1/D4	95.45	94.12	98.61	94.42	90.48	95.83

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Indikator kinerja adalah persentase Guru SMK Berkualifikasi Akademik Minimal S1/D4, target yang direncanakan sebesar 94.42, realisasi pelaksanaan sebesar 90.48 dengan capaian presentase kinerja mencapai sebesar 95.83. Perbandingan antara target dan realisasi terjadi penurunan sebesar 3.94, sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2018 dan tahun 2019 mengalami penurunan mencapai 3.64 yaitu pada tahun 2018 realisasi kinerja sebesar 94.12 menjadi 90.48 pada tahun 2019. Jumlah guru SMK yang berkualifikasi tahun 2019 adalah 16.783 orang sedangkan guru SMK berjumlah 18.549 orang.

7) Persentase Guru SMK Bersertifikasi

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Presentase Guru SMK Bersertifikasi

Indikator Kinerja	Tahun 2019		
	Target	Realisasi	%
Persentase guru SMK bersertifikasi	42.70	40.77	95.47

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

Jumlah guru SMK yang bersertifikasi tahun 2019 adalah 7.562 orang, sedangkan guru SMK berjumlah 18.549 orang.

8) Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan semua jenjang :

- a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat pada tahun 2018 dicapai 105,09% menjadi 104,42% pada tahun 2019.
- b. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Pertama/Sederajat pada tahun 2018 dicapai 105,77% menjadi 105,83% pada tahun 2019.

- c. Angka Partisipasi Kasar Sekolah Menengah Atas/Sederajat pada tahun 2018 dicapai 97,17% menjadi 100,83% pada tahun 2019.
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Dasar/Sederajat tahun 2018 dicapai 90,94% menjadi 96,45% Tahun 2019.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/ Sederajat tahun 2018 dicapai 77,19% menjadi 83,88% Tahun 2019.
- f. Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat tahun 2018 dicapai 71,19% menjadi 80,61% Tahun 2019.

9) Perkembangan Angka Kelulusan

- a. Angka kelulusan SD/MI pada tahun 2018 adalah sebanyak 279.876 siswa dan menjadi 305.571 siswa pada tahun 2019.
- b. Angka kelulusan SMP/MTs pada tahun 2018 adalah sebanyak 214.293 siswa dan menjadi 284.135 siswa pada tahun 2019.
- c. Angka kelulusan SMA/MA/SMK pada tahun 2018 adalah sebanyak 207.522 siswa dan menjadi 243.554 siswa pada tahun 2019.

10) Perkembangan angka melanjutkan sekolah SD/MI

Jumlah melanjutkan SD/MI pada tahun 2018 adalah sebanyak 220.815 orang dan menjadi 245.648 orang pada tahun 2019.

11) Perkembangan angka melanjutkan sekolah SMP/MTs

Jumlah melanjutkan SMP/MTs pada tahun 2018 adalah sebanyak 235.326 orang dan menjadi 317.440 orang pada tahun 2019.

12) Angka melek huruf 15 tahun keatas pada tahun 2018 adalah 99,14 dan menjadi 99,23 pada tahun 2019.

13) Penyandang Ketunaan

- a. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SD/MI tahun 2018 adalah 3.507 orang menjadi 3.869 orang pada tahun 2019.
- b. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMP/MTs tahun 2018 adalah 669 orang menjadi 842 orang pada tahun 2019.
- c. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah tingkat SMA/SMK/MA tahun 2018 adalah 306 orang menjadi 399 orang pada tahun 2019.

2. Urusan Wajib Kesehatan

2.1 Dinas Kesehatan

Saat ini derajat kesehatan masyarakat telah meningkat dari waktu ke waktu, dilihat dari beberapa indikator capaian kinerja bidang kesehatan antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut :

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah 68,95 tahun. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diterbitkan oleh BPS, terjadi peningkatan UHH penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun yakni 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017; 68,29 tahun pada tahun 2016; 68,21 tahun pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

2) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Karena ketiadaan survei pada Angka Kematian Bayi (AKB) maka data yang diperoleh adalah berdasarkan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dan Laporan dari Kabupaten/Kota, yakni dari jumlah kematian bayi dibagi sasaran lahir hidup dikali 1.000 Kelahiran Hidup.

Berdasarkan laporan rutin Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) bahwa pada tahun 2019 jumlah kasus kematian bayi adalah sebanyak 790 kasus dari 302.555 sasaran lahir hidup sehingga AKB Tahun 2019 adalah sebesar 2,61 per 1.000 Kelahiran Hidup (KH), angka ini menunjukkan penurunan kasus jika dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 869 kasus dari 305.935 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2018 yakni 2,84 per 1.000 KH); dan tahun 2017 yaitu 1.066 kasus dari 300.358 sasaran lahir hidup (AKB Tahun 2017 yakni 3,52 per 1.000 KH).

Dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu 4,5 per 1.000 Kelahiran Hidup maka Angka Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sudah melampaui target.

3) Prevalensi Stunting pada Balita

Stunting pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekuarangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi kronis terjadi sejak bayi dalam kandungan hingga usia dua tahun. Dengan demikian periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seyogyanya mendapat perhatian khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktivitas seseorang di masa depan.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018, diperoleh data prevalensi stunting pada balita di Provinsi Sumatera Utara sebesar 32,3%, angka ini menunjukkan penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan hasil Riskesdas tahun 2013 dimana prevalensi stunting pada balita di Sumatera Utara Tahun 2013 adalah 42,5%.

4) Angka Kesakitan (*Morbiditas*)

Angka kesakitan (*morbiditas*) merupakan indikator penting yang dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata.

Kurun waktu 5 tahun terakhir Angka Kesakitan di Sumatera Utara berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) bidang kesehatan adalah 11,84% tahun 2015,

menurun menjadi 11,15% tahun 2016, 11,17% tahun 2017 dan 11,03% tahun 2018, namun tahun 2019 meningkat menjadi 11,97%.

Peningkatan angka kesakitan (*morbidity*) ini disebabkan oleh antara lain meningkatnya faktor resiko kesakitan pada masyarakat berupa kerentanan penyakit yang meliputi :

- a. Kerentanan Individu (*susceptibility*);
- b. Kerentanan Lingkungan;
- c. Kerentanan Perilaku Penyebab Timbulnya Kesakitan.

5) Ketersediaan Sarana Kesehatan

Pada tahun 2019 tersedia 600 unit puskesmas dengan perincian 156 unit puskesmas rawat inap dan 444 puskesmas non rawat inap (rawat jalan), ketersediaan sarana kesehatan dasar (Puskesmas) ini bertambah 19 unit jika dibanding dengan tahun 2018 yakni 581 unit dengan perincian 155 unit puskesmas rawat inap dan 426 unit puskesmas non rawat inap (rawat jalan).

Persebaran puskesmas di kabupaten/kota sudah cukup merata, setiap kecamatan di Provinsi Sumatera Utara sudah memiliki paling sedikit 1 puskesmas. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Sumatera Utara (14.901.786 jiwa), maka 1 puskesmas melayani 24.836 jiwa. Bila dibandingkan dengan standar nasional dimana 1 puskesmas melayani 30.000 jiwa, maka Provinsi Sumatera Utara telah mampu menyediakan sarana kesehatan dasar sesuai standar nasional tersebut.

Untuk sarana pelayanan kesehatan rujukan (Rumah Sakit), tahun 2019 jumlah rumah sakit di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 211 unit, dimana 4 unit RS tutup di tahun 2019 dan 2 unit RS berdiri dan beroperasi. Jumlah rumah sakit berkurang 2 unit, menjadi 211 unit Rumah Sakit (RS) dari sebelumnya 213 unit tahun 2018. Rumah sakit yang berkurang adalah rumah sakit swasta yang tutup pada tahun 2018, yakni RS Keluarga di Kabupaten Deli Serdang dan RSU Kasih Ibu di Kabupaten Labuhanbatu.

6) Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Tahun 2018 jumlah tenaga kesehatan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 58.767 orang dan bertambah menjadi 61.190 orang tenaga kesehatan pada tahun 2019.

Data ketenagaan yang dihitung adalah data tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang meliputi tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lainnya, karena pada tahun-tahun sebelumnya data yang dihitung dan disajikan adalah tenaga medis saja.

7) Ketersediaan Obat dan Vaksin

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pada Pasal 36 menyebutkan bahwa pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial. Untuk tahun 2019

persentase ketersediaan obat dan vaksin di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari 93,36% pada tahun 2018 menjadi 95,10% pada tahun 2019.

8) Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin yang tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah sebanyak 6.217.681 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2018 yaitu 5.894.020 jiwa dan tahun 2017 yaitu 5.466.094 jiwa. Seluruh penduduk yang miskin yang tercatat sebagai PBI (100%) mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di rumah sakit.

9) Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam

Pada tahun 2017, 2018 dan 2019, cakupan desa/kelurahan yang mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam oleh Tim Surveilans Dinas Kesehatan Kab/Kota dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara sudah mencapai 100%.

10) Cakupan Desa Siaga Aktif

Cakupan desa siaga aktif di Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 40%, capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu 38% dan 36,06% pada tahun 2017.

2.2 Rumah Sakit Umum Haji Medan

Capaian indikator tingkat akseibilitas pelayanan kesehatan pada RS. Umum Haji Medan, dimana indikator ini juga ditentukan/diukur dengan Indikator di bawah ini, yaitu :

- 1) *Bed Occupancy Rate* (BOR) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, target kinerja sebesar 55%. Kemudian diakhir tahun diukur tingkat pencapaian target kinerja dan diperoleh realisasinya sebesar 46 %, dengan capaian kinerja 84%.
- 2) *Length Of Stay* (LOS) adalah rata-rata lama rawat seorang pasien, dengan target kinerja 5 hari. Kemudian diakhir tahun diukur tingkat pencapaian target kinerja dan diperoleh capaian realisasinya sebesar 4 hari. Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator ini adalah 92%.
- 3) *Turn Over Internal* (TOI) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya, target kinerja 3 hari capaian realisasi 5 hari. Sehingga dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator ini adalah 57%.
- 4) *Bed Turn Over* (BTO) adalah frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode. Berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu waktu tertentu, target kinerja 46 kali, capaian realisasi 38 kali dengan demikian dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada indikator ini adalah 74%.

2.3 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem

Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem akan terus melaksanakan berbagai upaya program/kegiatan untuk pencapaian serta mempertahankan BOR yang ideal bagi suatu rumah sakit yang berkisar BOR 80-100%. Pencapaian angka BOR untuk Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. Muhammad Ildrem pada tahun 2019 adalah 73.85%, berhasil diturunkan dari capaian BOR 85,00% pada tahun 2018.

Dalam hal penurunan ALOS (*Average Lenght Of Stay*) atau rata rata lama hari rawatan pasien tidak dapat tercapai di tahun ini. Capaian kinerja 91,40% dengan ALOS 70,59 hari dari 65 hari yang menjadi target. Tidak tercapainya target di tahun 2019 merupakan dampak yang harus dihadapi dengan dilaksanakannya kegiatan Pemulangan Pasien Terjadwal (Dropping) kembali ke keluarganya (penanggung jawab) bagi pasien yang telah dianjurkan untuk Pulang Berobat Jalan (PBJ) oleh dokter. Diantara pasien yang dirawat ada yang memiliki masa rawatan cukup tinggi, sehingga mempengaruhi nilai rata rata masa rawatan yang diperoleh di tahun 2019. Kegiatan Dropping ini harus dilaksanakan agar capaian kinerja BOR dan ALOS ditahun tahun mendatang dapat tercapai dengan baik.

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.1 Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

Panjang jaringan jalan di Provinsi Sumatera Utara pada saat ini sepanjang 39.376,25 Km, yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 2.632,22 Km, Jalan Provinsi sepanjang 3.005,65 Km dan Jalan Kabupaten/Kota sepanjang 33.738,38 Km.

Dalam RPJMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Jalan Mantap 82,99% pada tahun 2019. Pada tahun anggaran 2019 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan pembangunan/ peningkatan jalan provinsi dengan realisasi sepanjang 75,72 Km, dari target 146,71 km pada RPJMD, sehingga kondisi kemantapan Jalan Provinsi tahun 2018 - 2019 dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2018 dan 2019

Tahun	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)
2018 (SK Lama)	1.336,31	1.349,12	139,99	223,09
Km	2.685,42		363,08	
%	88,09		11,91	
2018 (SK Baru)	1.026,78	1.410,83	217,14	350,90
Km	2.685,42		363,08	
%	81,10		18,89	
2019	1.123,16	1.347,24	49,11	486,14
Km	2.470,40		535,25	
%	82,19		17,81	

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki jembatan provinsi yang berjumlah 1.087 unit yang tersebar di kabupaten/ kota di Sumatera Utara dengan total panjang 14.820,85 M. Jumlah dan total panjang jembatan di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018, yaitu dengan jumlah 889 Unit dan total panjang 11.844,81 M. Hal tersebut dikarenakan perubahan status jalan provinsi, dimana banyak jalan kabupaten/kota serta jembatannya naik status menjadi jalan dan jembatan provinsi.

Pada RPJMD 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan jembatan dalam kondisi baik sebesar 82,39% dengan realisasi target sebesar 83,71%. Kondisi tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,83% bila dibandingkan dengan jembatan provinsi dalam kondisi baik pada tahun 2018, yaitu sebesar 81,88%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Kondisi Jembatan di Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Satuan	Kondisi Jembatan			Total
		Baik	Rusak Ringan	Rusak	
Tahun 2018	Jumlah (unit)	680	160	49	889
	Panjang (m)	9.698,81	1.835,7	310,3	11.844,81
	Persentase Kondisi (%)	81,88	15,50	2,62	100,00
Tahun 2019 (SK Baru)	Jumlah (unit)	862	168	57	1.087
	Panjang (m)	12.407,25	1.982,40	431,20	14.820,85
	Persentase Kondisi (%)	83,71	13,38	2,91	100,00

Sumber : Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provsu

3.2 Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Target dan realisasi Kegiatan Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong Tahun Anggaran 2019 dari target 255.275 meter, terealisasi mencapai 254.560 meter.

2) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Luas baku irigasi dan rawa di Provinsi Sumatera Utara seluas 1.430.212 Ha yang meliputi lahan irigasi seluas 418.207 Ha dan lahan rawa seluas 1.012.005 Ha. Berdasarkan pembagian kewenangan tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengelola daerah irigasi dan rawa yang sudah terbangun seluas 113.845 Ha dengan jaringan irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan rawa seluas 26.846 Ha. Program ini merupakan program untuk mempertahankan fungsi jaringan irigasi agar dapat melayani kebutuhan areal persawahan dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan nasional.

Target dan realisasi kegiatan program pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya pada tahun 2019 yaitu Untuk Rasio Jaringan Irigasi sebesar target 82,50%, terealisasi 82,43%. Untuk jaringan rawa rawa kondisi baik target 55,00%, terealisasi 53,48%, berfungsinya jaringan Irigasi seluas 86.999 Ha dan jaringan rawa seluas 26.846 Ha yang menjadi kewenangan Provinsi terealisasi 82,43%.

3) Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

Pembangunan dan pengelolaan air baku dan sumber air lainnya dari target 330.000 M³, terealisasi 357.000 M³.

4) Pembangunan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pada tahun 2019 cakupan layanan air minum layak dari target 89,23% terealisasi 76,94%, cakupan layanan air minum perpipaan dari target 33,18% terealisasi 32,26%, cakupan pelayanan air limbah perpipaan dari target 29.350 sambungan rumah, terealisasi 29.086 sambungan rumah.

4. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni menjadi tantangan bagi kita sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2018 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

- 1) Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi.
- 2) Sumber air minum layak.
- 3) Sanitasi layak.
- 4) Sumber penerangan listrik.
- 5) Jenis atap bukan dari daun atau lainnya.
- 6) Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya.
- 7) Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria tersebut, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni. Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat pada tahun 2013 sejumlah 86,12 % dan rilis terakhir BPS pada tahun 2019 menjadi 93,18 %. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni. Pada tahun 2019 melalui sumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 622 Unit. Untuk meningkatkan Rasio Rumah Layak Huni juga dilakukan rehabilitasi rumah melalui sumber dana APBN, DAK dan CSR badan usaha dengan total yang ditangani tahun 2019 sejumlah 14.215 Unit.

Penanganan permukiman kumuh khususnya di kawasan perkotaan dan di kantong - kantong kemiskinan memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Masalah urbanisasi, kemiskinan dan pengendalian pembangunan merupakan faktor-faktor yang mendorong semakin besarnya kawasan kumuh. Oleh karena itu penanganan kawasan kumuh menjadi pekerjaan rumah kita agar setiap penduduk tinggal di permukiman yang layak dengan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Dalam melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh berpedoman kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan kualitas terhadap Perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Penanganan yang telah dilakukan adalah melalui perbaikan dan atau peningkatan infrastruktur lingkungan permukiman, seperti jalan lingkungan, drainase permukiman. Penanganan kawasan kumuh tahun 2019 dilakukan di 8 kabupaten/kota dengan area tertangani 88 Ha.

Untuk mendukung penyediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikan bantuan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) permukiman pada 3.491 unit rumah MBR. PSU yang dibangun adalah jalan lingkungan dan drainase lingkungan pada kawasan permukiman perumahan bersubsidi sehingga masyarakat dapat menempati kawasan permukiman yang sehat dan aman yang didukung PSU.

Penyediaan rumah layak huni untuk korban bencana oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan membangun 26 unit rumah untuk korban bencana banjir dan longsor di Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal.

5. Urusan Wajib Trantibum dan Linmas

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya meliputi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat". Pada pasal 65 huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 juga disebutkan Kepala Daerah memiliki tugas memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sesuai dengan RPJMD Provsu Tahun 2019-2023, Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Provsu ada 3 dengan target dan realisasi capaian tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.11
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Sumatera Utara	Persentase Penegakan Perda	45 %	57 %	127 %
	Tingkat Penyelesaian Penyelenggaraan K3 (Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan)	65 %	97 %	149 %
	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	12.978 Orang	55.103 Orang	425 %

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

Dalam kaitan itu, maka capaian kinerja di bidang trantibum dan linmas pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

1) Penegakan Perda dan Perkada

- a. Melaksanakan penagihan pajak Air Permukaan Umum (APU) tertunggak dan penertiban izin APU di kabupaten/kota sebanyak 7 kali.

- b. Melaksanakan pendataan dan penertiban pemilik ternak babi terkait merebaknya wabah hog cholera di 18 kabupaten/kota.
 - c. Melaksanakan penertiban ASN Pemprovsu diluar jam dinas sebanyak 2 kali.
 - d. Melaksanakan pengawasan dan penertiban aset – aset pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari pengosongan rumah dinas 6 kali, penarikan kendaraan dinas 3 kali.
 - e. Melaksanakan sosialisasi dan penertiban izin galian C sebanyak 4 kali di Kabupaten Labuhanbatu, Langkat dan Kota Medan.
 - f. Melaksanakan Rapat Koordinasi PPNS Pemprovsu dengan Korwas Pengadilan Negeri Medan dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
 - g. Melaksanakan pengamanan eksekusi tanah areal Sport Center dan Bendung Serdang.
- 2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- a. Melaksanakan pengamanan dan penanganan unjuk rasa sebanyak 83 kali.
 - b. Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada saat kunjungan kerja Presiden RI, Bapak Ir. Joko Widodo ke Provinsi Sumatera Utara pada 14-16 Maret 2019.
 - c. Melaksanakan pengawalan pejabat dan tamu pejabat sebanyak 58 kali.
 - d. Melaksanakan deteksi dini ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebanyak 9 kali.
 - e. Melaksanakan rapat koordinasi, penertiban APK dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Utara di 14 kabupaten/kota.

3) Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat

- a. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada 100 peserta kabupaten/kota.
- b. Melaksanakan pembinaan potensi masyarakat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Samosir.
- c. Melaksanakan pendataan personil, sarana dan prasarana dan kondisi Pemadam Kebakaran (Damkar) di 33 kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan pendataan dan pembinaan anggota Sat Linmas di kabupaten/kota.

6. Urusan Wajib Sosial

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib sosial pada tahun 2019, dapat kami jelaskan sebagai berikut :

1) Sesuai dengan target kinerja pelayanan sosial terhadap PMKS di dalam panti pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.322 orang dan capaian realisasinya 2.522 orang terdiri dari :

- a. Penyandang Disabilitas (Tuna Netra, Rungu Wicara, Kusta, Tubuh, Mental Psikotik) : 1.293 Orang
- b. Anak Balita : 100 Orang
- c. Anak Terlantar : 377 Orang
- d. Tuna Sosial (WTS dan Gepeng) : 293 Orang
- e. Lansia Terlantar : 296 Orang
- f. Remaja Putus Sekolah : 163 Orang

2) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dapat diberdayakan.

Sebagai pilar pendukung terdepan atas kegiatan-kegiatan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Bukit Barisan Medan.
- b. Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BK3S).
- c. Pembinaan dan Pembentukan KUBE di lokasi PKK Terpadu.
- d. Pembinaan dan Penumbuhan Karang Taruna.

Realisasi dari pelaksanaan keempat kegiatan tersebut adalah :

- a. Kendaraan roda 3 (2 unit) dan mesin babat 3 unit untuk TMP Nasional Bukit Barisan Medan.
- b. Pelantikan BK3S Sumatera Utara : 340 Orang
- c. Pembentukan KUBE : 40 Orang
- d. Penumbuhan Karang Taruna : 60 Orang

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan urusan wajib tenaga kerja pada tahun 2019, kami jelaskan sebagai berikut :

- 1) Kabupaten/kota yang menyusun Rencana Tenaga Kerja sebanyak 32 Kabupaten/Kota. Kabupaten yang belum menyusun Rencana Tenaga Kerja yaitu Kabupaten Padang Lawas.
- 2) Jumlah tenaga kerja yang dilatih berbasis kompetensi tahun 2019 sebanyak 5.920 orang dari jumlah tenaga kerja sebanyak 6.681.000 orang atau 0,09 %.
- 3) Rata-rata produktivitas tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar Rp. 80.755.365,25, rata-rata produktivitas tenaga kerja per bulan adalah Rp 6.729.613,77 menunjukkan diatas UMP tahun 2019 sebesar Rp 2.303.403,43.
- 4) Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak yaitu 8,33%.

- 5) Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan Luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja antar lintas daerah dalam 1 daerah provinsi yaitu 2,52%.
- 6) Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan yaitu 8,33%.
- 7) Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama melalui mediator hubungan industrial yaitu 21,05%.
- 8) Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) yang mendapatkan ijin dari Pemerintah Provinsi yaitu 100%.

8. Urusan Wajib Pangan

Pengembangan cadangan pangan di Sumatera Utara yang telah dilaksanakan Tahun 2018 – 2019 yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 3.12
Ketersediaan Cadangan Pangan di Sumatera Utara
Tahun 2018 – 2019

No	Uraian	2018 (Ton)	2019 (Ton)
1	Cadangan Pangan Pemerintah (BULOG Divre Sumatera Utara)	64.548,71	65

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Perkembangan swasembada pangan di Sumatera Utara tahun 2018 – 2019 masih menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari hasil perimbangan swasembada beras Tahun 2019, Provinsi Sumatera Utara memperoleh angka Skor Swasembada Beras (SSB) sebesar 173,73 yang berarti bahwa produksi beras Sumatera Utara dapat memenuhi kebutuhan beras penduduk dan bahkan melebihi kebutuhan beras sebesar 743,73%. Begitu juga jika dilihat dari

ketersediaan beras untuk Sumatera Utara Tahun 2019 ada sebanyak 3.093.810 Ton atau setara dengan 207,61 Kg/kap/Tahun, bila dibandingkan dengan kebutuhan beras konsumsi dan penggunaan non pangan sebesar 119,5 Kg/Kap/Tahun dapat disimpulkan bahwa ketersediaan beras untuk Sumatera Utara sangat surplus. Hal ini sejalan dengan adanya program UPSUS PAJALE (Padi Jagung Kedele) Nasional termasuk Sumatera Utara. Di sisi lain Sumatera Utara juga terus mempromosikan pengurangan konsumsi beras sebesar 1,5% per Tahun dengan menggalakkan diversifikasi pangan melalui penggalan potensi pangan lokal dan penggalan kearifan lokal.

Tabel 3.13
Perkembangan Produksi, Kebutuhan dan Swasembada Beras
Sumatera Utara Tahun 2018 – 2019

Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019
Jumlah Penduduk (jiwa)	14.838.678	14.901.786
Kebutuhan Beras (ton)	1.801.416	1.780.763
Produksi Beras (ton)	3.372.628	3.093.810
Perimbangan Beras (surplus/minus) (ton)	1.398.739	1.313.047
% SSB	187,22	173,73

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Produksi beras di Sumatera Utara tahun 2019 mengalami sedikit penurunan di bandingkan dengan tahun 2018 yang dikarenakan menurunnya luas lahan sawah serta produktivitas padi, akan tetapi Provinsi Sumatera Utara tetap mengalami surplus beras yang di dukung dengan menurunnya konsumsi beras pada masyarakat dari 121,4 kg/kap/tahun pada tahun 2018 menjadi 119,5 kg/kap/tahun pada tahun 2019 (hasil Survey PPH dan Konsumsi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan PSU).

Tabel 3.14
Harga Bahan Pangan Pokok (Rp) di Tingkat Pengecer

No	Bahan Pangan Pokok	Harga Rata-Rata Terendah		Harga Rata-Rata Tertinggi		Harga Rata-Rata Pertahun
		Bulan	Harga	Bulan	Harga	
1	Beras Premium	Maret	12.304	Agustus	12.632	12.250
2	Beras Medium	Maret	11.113	November	11.592	11.410
3	Jagung	Maret	5.811	April	6.189	5.874
4	Kedelai	November	9.193	April	9.887	9.244
5	Bawang Merah	September	24.103	Juni	38.052	31.223
6	Cabai Merah	Februari	20.134	Juli	64.051	37.942
7	Daging Sapi	April	116.974	Juni	122.180	119.719
8	Daging Ayam	April	26.969	Juni	33.448	31.353
9	Telur Ayam	Maret	23.639	Januari	25.023	24.085

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provsu

Dari kesembilan jenis bahan pokok yang didata, mayoritas harga rata – rata pada tahun 2019 mengalami ketidakstabilan harga, hanya produk bawang merah, cabai merah serta telur ayam yang relative stabil.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan telah melaksanakan pemantauan harga pangan dengan harapan dapat diketahui gambaran dinamika perkembangan harga pangan dari waktu ke waktu dan hasil analisisnya dapat digunakan sebagai referensi dalam perumusan kebijakan pangan di Provinsi Sumatera Utara guna terwujudnya keseimbangan harga yang lebih proporsional saling menguntungkan bagi produsen maupun konsumen.

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melaksanakan kegiatan penanganan daerah rawan pangan di daerah-daerah terdampak bencana alam seperti erupsi Gunung Sinabung

serta bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Batu Bara dengan pemberian bantuan bahan pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan mie instan serta bantuan untuk pemulihan kondisi masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Mandailing Natal berupa bantuan ternak itik serta sarana pendukungnya.

Perkembangan ternak besar dan kecil dari Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Perkembangan Populasi Ternak Tahun 2018-2019 (per ekor)

No	TERNAK	TAHUN	
		2018	2019 ^{*)}
Ruminansia			
1	Sapi Potong	982.963	1.009.301
2	Sapi Perah	2.565	3.042
3	Kerbau	95.358	101.809
4	Kambing	873.025	888.596
5	Domba	696.854	701.999
Non Ruminansia			
1	Babi	1.229.741	1.274.904
2	Kuda	1.430	1.523
3	Kelinci	12.881	13.589
Unggas			
1	Ayam buras	16.256.553	16.561.883
2	Ayam Ras Petelur	26.089.192	25.897.487
3	Ayam Ras Pedaging	65.528.976	65.670.779
4	Itik	2.909.469	2.900.630
5	Puyuh	219.136	217.408
6	Merpati	28.393	30.935
7	Itik Manila	754.712	785.788

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat dilihat semua komoditi ternak menunjukkan peningkatan. Peningkatan populasi ternak sapi potong sebesar 2,68%, kerbau 6,77%, kambing 1,78%, domba 0,74%, babi 3,67%, ayam buras 1,88% dan ayam ras pedaging 0,22%.

9. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara berhasil menyalurkan/memberikan alat alat gotong royong pada 20 Desa/kelurahan se kecamatan Kotapinang, kegiatan pembangunan terpadu pada Desa Binaan BANGDESMADU menyalurkan bantuan kepada Desa Binaan (2 Desa Binaan), Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2019 juga terealisasi dengan mengikut sertakan 6 Kabupaten (TTG Terbaik tingkat provinsi sumatera utara), pelaksanaan kegiatan Pemasarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara di Kota Pinang diikuti oleh 23 kabupaten/kota dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Juara I Kabupaten Langkat (alat penyanggul multifungsi);
- 2) Juara II Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Alat pakat ternak otomatis tenaga surya);
- 3) Juara III Kabupaten Tapanuli Selatan (Alat penyanggul serai wangi);
- 4) Juara Harapan I Kabupaten Humbahas (Alat pemasang mulsa);
- 5) Juara Harapan II Kota Padang Sidempuan (alat mesin sortasi serbaguna);
- 6) Juara Harapan III Kabupaten Dairi (alat tenun manual).

Kegiatan penilaian desa kelurahan terbaik kabupaten/kota se Sumatera Utara dilaksanakan guna mendorong serta merupakan bentuk pembinaan Pemerintah provinsi Sumatera Utara kepada

Desa/Kelurahan di Sumatera Utara dengan melaksanakan penilaian desa/kelurahan ini diharapkan peningkatan mutu pemerintah desa baik itu administratif maupun dibidang inovasi, tahun 2019 hasil kegiatan ini adalah terpilihnya juara desa/kelurahan terbaik tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Juara I (Desa Pematang Johar Kabupaten Deli Serdang);
- 2) Juara II (Desa Buntu Pane Kabupaten Asahan);
- 3) Juara III (Desa pulo jantan Kabupaten Labuhan Batu Utara);
- 4) Juara Harapan I (Dolok Merawan Kabupaten Serdang bedagai);
- 5) Juara harapan II (Desa Bangun Kabupaten Dairi);
- 6) Juara Harapan III (Kampung Padang Kabupaten Labuhanbatu).

Kategori Kelurahan :

- 1) Juara I (Kel. Anggrung Kota Medan);
- 2) Juara II (Kel. Padang Merbau Kota Tebing Tinggi);
- 3) Juara III (Kel. Jati Utomo Kota Binjai);
- 4) Juara Harapan I (Kel. Sibolga Ilir Kota Sibolga).

Melalui kegiatan penilaian desa/kelurahan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfasilitasi desa/kelurahan terbaik di Sumatera Utara untuk menambah wawasan dan mengembangkan potensi melalui kegiatan temu karya dan wisata karya Kepala Desa dan Lurah Juara Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2019 telah difasilitasi 37 orang ke Lombok ke desa sasak dan desa tenun. Penataan administrasi desa serta publikasi melalui portal Profil Desa/Kelurahan dengan terus mengupayakan kabupaten/kota mengupdate data terbaru melalui kegiatan Pembinaan/Pelatihan Penyusunan dan Pemberdayaan Profil Desa/Kelurahan, ditahun 2019 sebanyak 3342 Desa/Kelurahan telah mengentri data profil terbaru.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga fokus mendorong desa dalam pengembangan ekonomi lokalnya melalui peningkatan kapasitas pengelola BUMDes dan Pembinaan BUMDes melalui Penilaian dan Lomba Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terbaik Tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2019 jumlah BUMDes di Sumatera Utara berjumlah 2.415 yang statusnya aktif, dari hasil penilaian ditentukan juara BUMDes terbaik tingkat Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :

- 1) Juara 1 (BUMDes Arih Ersada Kabupaten Karo);
- 2) Juara 2 (BUMDes Buduma Kabupaten Serdang Bedagai);
- 3) Juara 3 (BUMDes Sampuran Nauli Kabupaten Tapanuli Utara);
- 4) Juara Harapan 1 (BUMDes Hilugoduhoya Kabupaten Nias Utara);
- 5) Juara Harapan 2 (BUMDes Subur Makmur).

10. Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pemberdayaan Koperasi dan UMKM merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, tangguh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Hasil dari upaya - upaya pemberdayaan yang telah dilakukan dapat dilihat dari data koperasi dan UMKM.

Tabel 3.16
Perkembangan Keragaan Koperasi di Sumatera Utara

No	Uraian		Keadaan	
			2018	2019
1	Jumlah Koperasi		11.063	11.820
	Aktif	(Unit)	6.594	4.244
	Tidak Aktif	(Unit)	4.469	7.576
2	Anggota	(Orang)	990.641	922.185
3	RAT	(Unit)	1.155	1.426
4	Manajer	(Orang)	362	306
5	Karyawan	(Orang)	4.596	4.886
6	Modal Sendiri	(Rp.)	9.747.787.648	4.896.287.476.704
7	Modal Luar	(Rp.)	1.184.446.716	1.718.224.738.901
8	Volume Usaha	(Rp.)	4.091.365.461	5.435.091.295.824
9	SHU	(Rp.)	228.816.814	355.091.366.735

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provsu

Perkembangan jumlah koperasi di Sumatera Utara pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 6,84% tetapi dalam hal ini koperasi aktif mengalami penurunan sebesar 36% hal ini disebabkan karena berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan kondisi data koperasi aktif tidak sama dengan kondisi nyata. Oleh sebab itu maka koperasi aktif mengalami penurunan 36% dan koperasi tidak aktif mengalami kenaikan 70%. Tahun 2020 direncanakan untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif secara kelembagaan dan usaha. Sebanyak 3.000 unit koperasi akan masuk dalam data pembubaran oleh pemerintah.

Jumlah UMKM pada tahun 2018 sebesar 2.859.131 unit, mengalami pertumbuhan menjadi 2.860.248 pada tahun 2019. Pertumbuhan ini merupakan persemaian usaha baru dan penumbuhan semangat kewirausahaan dari masyarakat di berbagai lapisan.

B. URUSAN PILIHAN

1. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

Total Produksi Perikanan Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 787.330,15 ton atau 100,75% dari target 781.454,57 ton yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019. Kenaikan produksi perikanan Sumatera Utara Karena adanya peningkatan produksi pada sektor perikanan budidaya Sumatera Utara. Namun pada sektor perikanan tangkap tidak mencapai target yang ditetapkan karena adanya beberapa faktor alam dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah pusat yang berdampak pada produksi perikanan tangkap di Sumatera Utara.

Target produksi perikanan tangkap Sumatera Utara yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 544.232,57 ton dan target produksi perikanan budidaya pada tahun 2019 sebesar 237.222,0 ton. Selama tahun 2019, realisasi produksi perikanan tangkap 540.421.79 ton atau 99,29% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2018, produksi perikanan tangkap tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 37.189.59 ton atau naik 7,39%.

Realisasi produksi perikanan budidaya Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar 246.908,36 ton atau 104,08% dari target yang ditetapkan. Bila dibandingkan produksi perikanan budidaya tahun 2018, produksi perikanan budidaya tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 1,26 %. Peningkatan produksi budidaya disebabkan karena padat tebar produksi di kolam ditingkatkan. Dengan menggunakan teknologi-teknologi budidaya perikanan terbaru yang dapat

memaksimalkan hasil produksi. Penambahan lahan budidaya perikanan darat, payau dan laut serta bertambahnya rumah tangga perikanan budidaya menjadikan produksi budidaya meningkat. Selain itu, teknologi pembuatan pakan mandiri yang dicanangkan pemerintah pusat membantu pembudidaya untuk mengurangi biaya produksi budidaya. Dengan demikian, pembudidaya semakin bersemangat dan mendapat margin keuntungan yang besar.

2. Urusan Pilihan Pertanian

2.1 Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan berbagai program yang terus mendorong peningkatan produksi dan hasil usaha tani dengan menyediakan sarana dan prasarana subsektor tanaman pangan sebagai bahan dari sektor pertanian memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian nasional, sosial, politik dan keamanan serta ketahanan nasional.

Tabel 3.17
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Pertanian

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Realisasi
Produksi Tanaman Pangan				
1	Padi (ton GKG)	5,136,186.00	5,375,167.60	4.718.681,73
2	Jagung (ton pipilan kering)	1,741,258.00	1,829,409.19	1.961.363,32
3	Kedele (ton)	7,778.00	8,905.03	9.626,73
Produktivitas Tanaman Pangan				
1	Padi (ton/Ha)	5.20	5.22	4,68

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target	Realisasi
2	Jagung (ton/Ha)	6.19	6.24	6,14
3	Kedele (ton/ha)	1.30	1.30	1,73
Produksi Tanaman Holtikultura				
1	Bawang Merah (ton)	16,103.20	16,918.42	18.069,23
2	Cabe (ton)	159,131.00	168,822.08	148.523,40
3	Sayur-sayuran (ton)	988,612.30	998,498.42	1.114.829,73
4	Buah - buahan (ton)	1,154,687.60	1,180,230.44	1.107.134,95
Produktivitas Tanaman Holtikultura				
1	Bawang Merah (ton)	7.70	7.89	8,03
2	Cabe (ton)	9.70	9.91	9,72
Nilai Tukar Petani				
1	Peternakan	112.07	113.65	
2	Pangan	93.11	100.62	93,18
3	Hortikultura	94.22	100.98	92,86
4	Perikanan	103.17	101.12	98,09
5	Perkebunan	98.53	99.02	

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Nilai Tukar Petani (NTP) Sumatera Utara sub sektor tanaman pangan pada tahun 2019 berdasarkan data sementara Badan Pusat Statistik yang telah diolah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara sebesar 93,18 dan NTP sub sektor tanaman hortikultura sebesar 92,86. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit dimana kenaikan harga komoditas pertanian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang/jasa konsumsi dan biaya produksi. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode tahun dasar.

Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Perkembangan Nilai Tukar Petani Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

Uraian	2018	2019^{*)}
Nilai Tukar Petani (NTP)	97,98	98,09
- NTP sub sektor Tanaman Pangan	93,72	93,18
- NTP sub sektor Hortikultura	91,72	92,86

Sumber : BPS Sumut, diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Ket : ^{)} Data sementara*

Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 terdapat peningkatan dari produksi total tanaman pangan (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar) tahun 2018 sebesar 7.902.658 ton, maka pada tahun 2019 berdasarkan data sementara sebesar 9.224.721 ton atau terjadi peningkatan sebesar 16,73%. Pada Tahun 2018 produksi padi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 5.340.200 ton dan produksi Palawija (Jagung, Kedele, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar) sebesar 2.562.458 ton, sedangkan produksi padi tahun 2019 berdasarkan data sementara sebesar 4.718.682 ton dan produksi palawija sebesar 4.506.039 ton.

Peningkatan produksi pangan di Provinsi Sumatera Utara tidak terlepas oleh adanya dukungan kegiatan LTT Pajale (Luas Tambah Tanam) Padi, Jagung dan Kedele sebagai lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu UPSUS PAJALE (Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedele). Adapun secara

lebih rinci Perkembangan Produksi Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.19
Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Tahun 2018 – 2019 Provinsi Sumatera Utara

No	Uraian	2018	Data Sementara 2019	%-tase (5/4)
1	2	4	5	7
1	Padi			
	- Tanam (Ha)	1.248.679	968.960	(22,40)
	- Luas Panen (Ha)	1.125.496	1.007.683	(10,47)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	47,45	46,83	(1,31)
	- Produksi (Ton)	5.340.200	4.718.682	(11,64)
2	Jagung			
	- Tanam (Ha)	301.487	320.530	6,32
	- Luas Panen (Ha)	295.850	319.507	8,00
	- Produktivitas (Kw/Ha)	57,22	61,39	7,29
	- Produksi (Ton)	1.692.704	1.961.363	15,87
3	Kedelai			
	- Tanam (Ha)	29.859	2.838	(90,50)
	- Luas Panen (Ha)	25.850	5.563	(78,48)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	6,99	17,30	147,49
	- Produksi (Ton)	18.074	9.627	(46,74)
4	Kacang Tanah			
	- Tanam (Ha)	3396,6	3.612	6,34
	- Luas Panen (Ha)	3.379	3.837	13,55
	- Produktivitas (Kw/Ha)	12,26	12,78	4,24
	- Produksi (Ton)	4.144	4.906	18,37
5	Kacang Hijau			
	- Tanam (Ha)	1678,6	1.895	12,87
	- Luas Panen (Ha)	1.543	2.024	31,17
	- Produktivitas (Kw/Ha)	11,31	7,26	(35,82)
	- Produksi (Ton)	1.745	1.469	(15,82)
6	Ubi Kayu			

No	Uraian	2018	Data Sementara 2019	%-tase (5/4)
1	2	4	5	7
	- Tanam (Ha)	28358,8	968.960	3.316,79
	- Luas Panen (Ha)	22.945	31.466	37,14
	- Produktivitas (Kw/Ha)	328,31	401,81	22,39
	- Produksi (Ton)	753.327	1.264.337	67,83
7	Ubi Jalar			
	- Tanam (Ha)	4917,2	29.775	505,52
	- Luas Panen (Ha)	4.970	31.466	533,19
	- Produktivitas (Kw/Ha)	186,06	401,81	115,95
	- Produksi (Ton)	92.465	1.264.337	1.267,37
	Total Tanaman Pangan			
	- Tanam (Ha)	1.618.376	2.296.568	41,91
	- Luas Panen (Ha)	1.480.032	1.401.547	(5,30)
	- Produktivitas (Kw/Ha)	53,40	65,82	23,27
	- Produksi (Ton)	7.902.658	9.224.721	16,73

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar 20,48%, sedangkan PDRB Tahun 2018 sebesar 20,91%, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sangat terkait dengan seluruh aspek lingkup pertanian dan saat ini sektor industri yang berbasis pertanian pertumbuhannya cukup menggembirakan, sehingga kedepan pertanian harus didukung oleh industri hilir sehingga meningkatkan produksi dan pendapatan petani.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 99/KEP/23.3/X/2018 tentang Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional Tahun 2018, dimana luas baku lahan sawah Provinsi Sumatera Utara seluas 245.953 hektar sementara luas baku lahan sawah hasil

Sensus Pertanian oleh Badan Pusat Statistik pada Tahun 2013 seluas 423.266 hektar atau mengalami penurunan seluas 177.313 hektar. Hasil tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Surat Gubernur Sumatera Utara tentang verifikasi dan validasi Luas Baku Lahan Sawah Sumatera Utara dengan hasil validasi luas lahan sawah sebesar 397.947,02 hektar.

Terhadap Surat Gubernur Sumatera Utara tersebut, Kementerian Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap luas baku lahan sawah nasional dan pada tanggal 4 Februari 2020, disampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN No.686/SK-PG.03.03/XII/2019 tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan Luas Baku Lahan Sawah Nasional tahun 2019 dimana Luas Baku Lahan Sawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 308.668 hektar dengan rincian Kabupaten/Kota terlampir. Dengan demikian terdapat penambahan luas baku lahan sawah Provinsi Sumatera Utara sebesar 62.715 hektar dibandingkan dengan luas lahan tahun 2018 sebesar 245.953 hektar.

Tabel 3.20
Data Luas Baku lahan Sawah Tahun 2018 dan 2019
Provinsi Sumatera Utara

No	Kab/Kota/ Kecamatan	SK ATR/BPN		Pengurangan/ Penambahan (Ha)
		2018	2019	
1	Nias	4.858	5.903,82	1.046,18
2	Mandailing Natal	11.564	11.581,04	17,31
3	Tapanuli Selatan	10.995	12.377,26	1.382,70
4	Tapanuli Tengah	6.934	8.533,40	1.599,75
5	Tapanuli Utara	18.684	20.535,30	1.851,38
6	Toba Samosir	15.420	17.083,67	1.663,54

No	Kab/Kota/ Kecamatan	SK ATR/BPN		Pengurangan/ Penambahan (Ha)
		2018	2019	
7	Labuhanbatu	1.468	16.244,20	14.775,82
8	Asahan	5.738	6.538,78	800,38
9	Simalungun	24.797	25.342,69	545,89
10	Dairi	9.137	5.694,16	- 3.443,18
11	Karo	10.696	14.518,45	3.821,97
12	Deli Serdang	24.736	33.992,07	9.256,41
13	Langkat	14.835	19.442,61	4.607,31
14	Nias Selatan	4.104	8.603,21	4.499,52
15	H. Hasundutan	12.128	11.837,23	- 290,30
16	Pakpak Barat	976	1.121,32	145,44
17	Samosir	6.258	7.289,17	1.031,18
18	Serdang Bedagai	27.543	28.016,95	474,39
19	Batu Bara	11.504	12.059,67	555,65
20	Padang Lawas Utara	6.294	6.853,99	560,03
21	Padang Lawas	5.511	5.732,01	220,58
22	Lab. Batu Selatan	75	174,53	99,32
23	Lab. Batu Utara	713	11.992,59	11.279,82
24	Nias Utara	2.283	7.172,85	4.890,09
25	Nias Barat	1.137	1.812,82	676,03
26	Sibolga			-
27	Tanjungbalai	55	72,75	18,14
28	Pematangsiantar	1.675	1.519,73	- 155,44
29	Tebing Tinggi	272	255,64	- 16,19
30	Medan	806	927,55	121,94
31	Binjai	1.169	1.208,36	39,33
32	Padangsidempuan	2.649	3.066,21	417,34
33	Gunungsitoli	716,92	1.163,55	446,63
	Sumatera Utara	245.729	308.668	62.938,94

Sumber : BPS Provsu, diolah oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Penurunan luas baku lahan sawah sangat terkait dengan pertambahan jumlah penduduk serta alih fungsi lahan pertanian ke sektor lainnya. Hal ini sejalan dengan perekonomian Sumatera Utara yang mengalami transformasi dari sektor pertanian

ke sektor industri pengolahan. Distribusi angkatan kerja tidak lagi terkonsentrasi di sektor pertanian, namun mulai bergerak pada sektor non pertanian, sehingga sektor pertanian banyak yang beralih ke sektor non pertanian dan hal ini berdampak terhadap penggunaan lahan apalagi jika dilihat dari NTP tanaman pangan masih dibawah 100% yang artinya usaha tani tanaman pangan belum memberikan kesejahteraan yang memadai sehingga banyak lahan petani beralih fungsi ke perkebunan atau pemukiman. Dalam rangka mempertahankan luas baku lahan sawah maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2033 dan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan serta Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.

2.2 Dinas Perkebunan

Perkembangan total luas areal dan produksi komoditas perkebunan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.21
Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan

No	Jenis Komoditas		Tahun 2018		Tahun 2019 ^{*)}	
			Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)	Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)
1	Karet		485,864.50	466,826.84	485,868.50	467,042.84
2	Kelapa Sawit	TBS	1,308,190.74	21,849,168.79	1,358,225.03	22,280,102.14
		MS	-	4,839,893.71	-	4,901,622.47
		IS	-	705,703.96	-	668,403.06
3	Kopi Arabika		76,257.64	63,233.94	76,953.42	64,031.00
	Robusta		17,437.64	7,835.09	17,612.02	8,089.95
4	Kelapa		109,631.71	97,033.44	109,790.00	98,132.00

No	Jenis Komoditas	Tahun 2018		Tahun 2019 ^{*)}	
		Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)	Total Luas (Ha)	Total Produksi (Ton)
5	Kakao	57,193.30	35,430.38	57,469.75	36,154.06
6	Cengkeh	3,347.17	989.33	3,405.25	1,098.00
7	Kemenyan	23,068.90	8,332.78	23,118.85	8,481.10
8	Kulit Manis	5,780.83	3,680.83	5,806.99	3,791.25
9	Nilam	897.70	245.99	912.00	350.44
10	Kemiri	10,506.05	13,390.56	10,545.83	13,524.17
11	Tembakau	1,952.91	1,659.51	1,939.61	1,618.01
12	Tebu	5,721.33	18,162.04	5,724.98	18,173.32
13	Pala	184.30	88.05	185.18	90.00
14	Lada	195.50	87.04	198.00	87.04
15	Kapuk	515.60	191.66	517.60	191.66
16	Gambir	1,635.30	1,369.17	1,637.10	1,369.17
17	Teh	6,373.29	8,094.16	6,373.29	8,094.16
18	Aren	7,007.47	5,382.81	7,013.47	6,201.81
19	Pinang	6,175.57	4,089.77	6,161.57	4,109.77
20	Vanili	166.45	83.41	170.00	84.34
21	Jarak	25.00	16.50	25.73	18.00
22	Kapulaga	18.25	11.78	19.20	13.00
23	Jambu Mete	-	-	-	-
24	Wangi Sereh	-	-	527.61	33,507.50
Jumlah		2.128.147,15	22.585.403,86	2.180.200,96	23.154.354,73

Sumber : Dinas Perkebunan Provsu

Keterangan : ^{*)} Angka Sementara

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total luas areal perkebunan Sumatera Utara tahun 2018 mencapai 2.128.147,15 ha dengan total produksi sebesar 22.585.403,86 ton. Sedangkan untuk tahun 2019 (angka sementara) total luas areal perkebunan Sumatera Utara mencapai 2.180.200,96 ha atau naik sebesar 2,44% dan dengan total produksi sebesar 23.154.354,73 ton atau naik sebesar 2,51% dari tahun 2018.

Tabel 3.22
Rasio Luas Areal dan Produksi Komoditas Perkebunan yang Dikelola

No	Pengelolaan	Rasio Luas Areal		Rasio Produksi	
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Perkebunan Rakyat	52,27	40,14	35,57	36,34
2	PTPN	17,22	20,23	23,89	23,13
3	PBSN	30,06	39,63	40,54	40,53
Total		100	100	100	100

Sumber : Dinas Perkebunan Provsu

Dari tabel diatas dapat di ketahui bahwa rasio luas areal perkebunan rakyat menempati posisi yang tinggi dari total luas areal perkebunan di Sumatera Utara yaitu mencapai 52,72% pada Tahun 2018 dan 40,14% pada Tahun 2019.

Namun apabila dilihat dari rasio produksi, dari total produksi komoditi perkebunan di Perkebunan Besar Swasta (PBS) memiliki rasio tertinggi yakni 40,54% pada tahun 2018 dan 40,53% pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan rakyat secara umum masih dibawah rata-rata produktivitas Perkebunan Besar Swasta (PBS) sehingga masih perlu dilakukan upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi Good Agriculture Paractise (GAP).

Upaya untuk penyediaan bahan tanaman/benih yang bersertifikat bagi petani/masyarakat secara swadaya telah dibina penangkar benih dengan ketersediaan benih tahun 2019 sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan benih kopi varietas sigararutang sebanyak 2.220.000 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang, Simalungun dan Mandailing Natal.
- 2) Ketersediaan benih kakao dengan klon Hybrid F1 sebanyak 630.000 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang, Binjai dan Langkat.
- 3) Ketersediaan benih karet klon PB 260 sebanyak 725.000 biji pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang.
- 4) Ketersediaan benih aren klon aren genjah kutai timur sebanyak 100.000 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang.
- 5) Ketersediaan benih kelapa dalam sebanyak 68.000 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang dan Kota Binjai
- 6) Ketersediaan benih kelapa sawit sebanyak 300.000 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Simalungun.
- 7) Ketersediaan benih cengkeh sebanyak 45.750 batang pada lokasi pembibitan/produsen benih di Kabupaten Deli Serdang.

3. Urusan Pilihan Kehutanan

Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan bagian dari sistem pengelolaan hutan dan lahan, yang dialokasikan pada daerah aliran sungai. Rehabilitasi hutan dan lahan disosialisasikan sebagai program pemulihan lingkungan hidup yang telah rusak dan sudah menjadi lahan kritis. Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan melalui kegiatan penghijauan, reboisasi, pemeliharaan, dan penerapan teknik konservasi tanah secara sipil teknis pada lahan

kritis tidak produktif. Kegiatan reboisasi dan penghijauan pada umumnya dilakukan pada tanah kritis dan areal bekas penebangan liar atau pembalakan.

Total lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 adalah 658.851,556 hektar dan total lahan kritis yang direhabilitasi yaitu 37 hektar. Sementara pada tahun 2019 total lahan kritis di Provinsi Sumatera Utara adalah 633.736,306 hektar dan total lahan kritis yang direhabilitasi adalah seluas 25.115,25 hektar dengan dana yang bersumber dari DBH-DR, DAK dan PAD. Luas lahan kritis yang direhabilitasi dengan sumber dana dari DBH DR dan diserahkan langsung ke KPH untuk dilaksanakan adalah seluas 110 hektar dan dam penahan 10 unit. Rehabilitasi hutan dan lahan seluas 110 hektar terdiri dari hutan rakyat yang dilaksanakan di KPH Wilayah I Stabat seluas 15 hektar dan di KPH Wilayah IV Balige seluas 15 hektar, Mangrove dilaksanakan di KPH Wilayah I Stabat seluas 20 hektar, dan Reboisasi dilaksanakan di KPH wilayah II Pematang siantar seluas 30 hektar dan di KPH Wilayah IV Balige seluas 30 hektar. Rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Wampu Ular seluas 4.024 hektar, sementara rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh BPDAS Asahan Barumon berupa kegiatan penanaman seluas 13.200 hektar, dam penahan sebanyak 40 unit seluas 400 hektar. Reboisasi yang bersumber dari DAK seluas 430 hektar, Dam penahan 20 unit seluas 200 hektar, Gully Plug 65 Unit dan Sumur resapan sebanyak 6 unit. Reboisasi seluas 430 hektar dilaksanakan di beberapa KPH antara lain di KPH Wilayah I Stabat seluas 90 hektar, KPH Wilayah II Pematang Siantar seluas 90 hektar, KPH Wilayah III Kisaran seluas 45 hektar, KPH Wilayah VIII Kotanopan seluas 45 hektar, KPH wilayah XI Pandan seluas 90 hektar, KPH wilayah XV Kabanjahe seluas 25 hektar dan UPT.Tahura seluas 45 hektar.

Pada tahun 2019 penghijauan melalui penyediaan bibit yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provsu sebanyak 54.850 batang didistribusikan ke masyarakat di Kabupaten Karo, Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Labuhanbatu Utara dan Kota Medan sebanyak 8.200 batang, penanaman pada acara Pencanaan Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (Bangdes-Madu) sebanyak 21.650 batang yang dilaksanakan di Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Desa Panjang, Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, penanaman mangrove oleh KTH Bakti Nyata sebanyak 25.000 batang yang dilaksanakan di Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga memfasilitasi terjaminnya ketersediaan bibit untuk reboisasi dan penghijauan yakni melalui kegiatan: a) pengadaan bibit untuk penghijauan dan mangrove sebanyak 59.000 batang; b) penyediaan bibit kayu-kayuan dan MPTS sebanyak 59.000 batang yang terdiri dari Asam Gelugur (7.000 batang), Jengkol (7.500 batang), Kemiri (3.000 batang), Mahoni (2.500 batang), Petai (7.500 batang), Pulai (3.000 batang), Sengon (3.000 batang), Beringin (500 batang) dan Mangrove; c) kegiatan Kampanye Indonesia Menanam dan Memelihara Pohon dilakukan dengan pemberian bantuan bibit tanaman sebanyak 28.200 batang yang terdiri dari Durian (6.000 batang), Petai (6.000 batang), Mahoni (8.000 batang), Asam Gelugur (5.000 batang), jengkol (1.000 batang), Gaharu (1.000 batang) dan Kemiri (1.200 batang). Pemberian bibit ini dilaksanakan di desa Sisumut Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Desa Panjang Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara.

Dalam rangka pengembangan perbenihan dan peredaran benih/bibit yang berkualitas maka sudah dilaksanakan monitoring dan evaluasi peredaran benih/bibit yang bersertifikat di 6 kabupaten/kota yaitu di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Simalungun, Toba Samosir, Labuhanbatu Selatan dan Padang Lawas. Dengan adanya peredaran benih/bibit yang bersertifikat maka diharapkan pada tahun-tahun yang akan datang bibit yang diproduksi dan dimanfaatkan oleh masyarakat adalah bibit yang berkualitas baik.

Pada tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebanyak 14 izin. Luas total IUPHH di Provinsi Sumatera Utara adalah 670.557,11 ha. Produksi kayu dari IUPHHK-HA pada tahun 2018 sebesar 49.121 m3 dan tahun 2019 menurun menjadi 45.247,26 m3. Sementara produksi IUPHHK HT pada tahun 2018 sebesar 1.301.141,96 m3 dan tahun 2019 menurun menjadi 1.194.214,70 m3. Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu pada tahun 2018 antara lain Getah pinus sebanyak 1.856.341,21 Kg. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah produksi Hasil Hutan Bukan Kayu antara lain Getah pinus sebanyak 649.797,00 Kg, Rotan Cacing 20.000 Kg, Rotan Manau 10.000 kg, Rotan Segi 20.000 Kg, Rotan Semambu 10.000 btg.

Pada tahun 2018 kebakaran hutan seluas 3.138,88 hektar, luas kebakaran hutan mengalami penurunan menjadi 843,75 hektar pada tahun 2019. Titik Hotspot mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebanyak 393 titik dan pada tahun 2019 menjadi 330 titik atau 0,88%. Lokasi titik Hotspot yang terpantau pada tahun 2019 berada di Kecamatan Merek Kabupaten Karo seluas 160 Ha, Kabupaten Labuhanbatu Selatan seluas 51,5 Ha, Kabupaten Padang Lawas Utara seluas 263 Ha, Kabupaten Padang Lawas seluas 15 Ha,

Kabupaten Simalungun seluas 15 Ha, Kabupaten Labuhanbatu seluas 120 Ha, Kabupaten Labuhanbatu Utara seluas 104,5 Ha, Kabupaten Toba Samosir seluas 10 Ha, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 8 Ha, Kabupaten Tapanuli Tengah seluas 3 Ha, di Kabupaten Samosir seluas 14,5 Ha, dan di Kabupaten Asahan seluas 15 Ha.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi titik api tersebut adalah dengan melakukan patroli pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan yang dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara wilayah kerja UPT KPH Wilayah V Aek Kanopan, di Kabupaten Tapanuli Selatan wilayah kerja UPT KPH Wilayah X Padangsidimpuan, di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah wilayah kerja UPT KPH Wilayah XII Tarutung.

Luas data perambahan kawasan hutan pada tahun 2019 adalah seluas 5.199,7 Ha. Sedangkan upaya penanganan untuk pencegahan dan pembatasan kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan di lakukan di beberapa lokasi antara lain : (a) Kab. Simalungun Wilayah Kerja UPT KPH Wil. II Pematangsiantar dilakukan pengamanan kayu sebanyak 1 unit truk beserta kayu pacakan sebanyak 99 batang dengan volume 2,6795 m³ beserta 1 orang tersangka dan telah diproses hukum P.21 dengan hukuman 1 tahun penjara; (b) Kab. Tobasa Wilayah Kerja UPT KPH Wil. IV Balige yaitu mengamankan kayu 1 unit truk beserta kayu pacakan sebanyak 99 batang dengan volume 2,6795 m³ dengan 1 orang tersangka dan telah di serahkan kepada Kepolisian Resort Tobasa; (c) mengamankan barang bukti HHBK getah pinus sebanyak 100 Kg di kantor UPT. KPH Wil. IV balige dan menghentikan penyadapan getah pinus sebelum terbit Perda yang mengatur penyadapan getah pinus; (d) Kab. Tobasa Wilayah Kerja UPT KPH Wil. IV Balige yaitu mengamankan 10 truk

yang mengangkut kayu bulat jenis pinus dan eucalyptus beserta tersangka 10 orang dan diserahkan ke Polres Tobasa untuk proses penyelidikan setelah olah TKP lokasi penebangan berada di APL. Penyidik melimpahkan perkara tersebut ke Dinas Kehutanan Provsu untuk diberikan sanksi administrasi pembayaran PSDH/DR; (e) Kab.Tapanuli Utara Wilayah Kerja UPT KPH Wil. XII Tarutung yaitu mengamankan 1 unit truk yang mengangkut kayu olahan sebanyak 24,1600 m³ dan dilakukan proses penyelidikan oleh PPNS dan diberikan sanksi administrasi pembayaran PSDH/DR; (f) Kab. Tapanuli Utara Wilayah Kerja UPT KPH Wil. XII Tarutung yaitu mengamankan 1 unit truk yang mengangkut kayu bulat jenis pinus sebanyak 101 batang dengan volume 11,35 m³ dan menyerahkan ke Polres Tarutung untuk proses hukum; (g) Kab. Samosir Wilayah Kerja UPT KPH Wil. XIII Doloksanggul yaitu mengamankan pelaku penyadapan getah pinus sebanyak 9 orang dan di serahkan ke Polres Samosir untuk diproses hukum.

Dinas Kehutanan Provsu juga melakukan penindakan sanksi administrasi berupa denda PSDH DR terhadap pelaku tindak pidana kehutanan yaitu : (a) Kab. Tobasa Wilayah Kerja UPT KPH Wil. IV Balige atas tangkapan 10 truk mengangkut kayu bulat jenis pinus dan eucalyptus; (b) Kab. Tapanuli Utara Wil. Kerja UPT KPH Wil. XII Tarutung, atas tangkapan 1 unit truk kayu olahan 24,1600 m³.

4. Urusan Pilihan Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional mengamanatkan bahwa kebijakan energi nasional merupakan kebijakan pengelolaan energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya diperlukan Program dan Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Sampai dengan periode TW III tahun 2019 akumulasi lifting minyak bumi Provinsi Sumatera Utara mencapai 205,29 ribu barel minyak atau 46,18% dari prognosa lifting minyak bumi Sumatera Utara, sedangkan akumulasi gas bumi lifting gas bumi Sumatera Utara hingga TW III tahun 2019 adalah mencapai 1.763 ribu MMBTU atau 82,19% dari prognosa lifting gas bumi Sumatera Utara.

Tabel 3.23
Lifting Minyak Bumi s/d Triwulan III Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota Penghasil	Lifting		
		Prognosa APBNP 2019 (Ribu Barel)	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2019 (Ribu Barel)	Pencapaian %
1	Kab. Langkat	239,92	132,81	55,36%
2	Kab. Padang Lawas	204,04	72,26	35,41%
3	Kab. Deli Serdang	0,56	0,225	40,63%
Jumlah		444,51	205,29	46,18%

Sumber : Berita Acara perhitungan Realisasi Lifting Migas kumulatif s.d Triwulan III 2019 Provinsi Sumatera Utara Nomor : 02/lifting-TW III/DMBP/2019

Tabel 3.24
Lifting Gas Alam s/d Triwulan III Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota Penghasil	Lifting		
		Prognosa APBNP 2019 (Ribu MMBTU)	Realisasi Kumulatif s/d TW III 2018 (Ribu MMBTU)	Pencapaian (%)
1	Kab. Langkat	1.982,32	1.672,91	4,39%
2	Kab. Deli Serdang	162,65	90,13	5,42%
Jumlah		2.144,97	1.763,04	2,19%

Sumber : Berita Acara perhitungan Realisasi Lifting Migas kumulatif s.d Triwulan III 2019 Provinsi Sumatera Utara Nomor : 02/lifting-TW III/DMBP/2019

Berdasarkan hasil-hasil rapat yang dilaksanakan bersama dengan Asosiasi Daerah Penghasil, Ditjen Minyak dan Gas beserta kontraktor kontrak kerjasama dan hasil kunjungan ke lokasi wilayah

kerja Migas beberapa permasalahan dalam lifting Minyak bumi tidak mencapai target adalah :

- 1) Kabupaten Langkat yang dikerjakan oleh PT Pertamina EP II beberapa permasalahan adalah sumur baru yang di harapkan tidak sesuai dengan perkiraan awal, berapa sumur low produksi dikarenakan kadar air yang tinggi dan explorasi beberapa sumur baru tidak berhasil.
- 2) Kabupaten Padang Lawas yang dikerjakan oleh EMP Tonga beberapa permasalahan adalah sumur yang sudah shut-in dan lapangan tonga sudah mengalami decline.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dan 2019 melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan kegiatan pembangunan listrik pedesaan yang bersumber dari energi baru terbarukan, kegiatan dimaksud adalah :

- 1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
Pembangkit Listrik yang memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber energi untuk membangkitkan listrik. PLTMH bersifat Sustainable Energi yaitu energi baru terbarukan yang berkelanjutan dengan tidak membahayakan lingkungan. Pada tahun 2019 telah dibangun PLTMH di 2 lokasi di Kab. Tapanuli Selatan dan Kab. Mandailing Natal. PLTMH Angkola Sangkunur di Kab. Tapanuli Selatan sebanyak 1 Unit berlokasi di Desa Malombu Kecamatan Angkola Sangkunur mempunyai Kapasitas Pembangkit Sebesar 20 kVA melayani 130 Rumah Tangga. PLTMH Ranto Panjang di Kab. Mandailing Natal berlokasi di Dusun Tagilang Julu Desa Tagilang Julu Kecamatan Muara Batang Gadis mempunyai kapasitas Pembangkit sebesar 15 kVA melayani 130 rumah tangga.

2) Pembangunan SHS/PLTS di Desa Terpencil di Sumatera Utara.

PLTS adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang memanfaatkan panas matahari sebagai sumber energi listrik untuk penerangan. Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membangun PLTS/SHS sebanyak 204 Unit di 6 Kabupaten 9 Kecamatan, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.25
Pembangunan PLTS Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Kelurahan/Desa	JlhPLTS/SHS
1	Kab. Dairi	Kec. Parbuluan	Desa Parbuluan VI	20 Unit
2	Kab. Samosir	Kec. Nainggolan	Huta Rihit	16 Unit
			Desa Toguan Galung	1 Unit
		Kec. Onanrunggu	Desa Sipira	3 Unit
3	Kab. Nias	Kec. Ma'u	Desa Sihare'o III Hilibadalu	20 Unit
4	Kab. Nias Barat	Kec. Sirombu	Desa Balowondrate	26 Unit
		Kec. Mandrehe	Desa Lasarabaene	24 Unit
5	Kab. Nias Utara	Kec. Tugala Oyo	Desa Gunungtua	23 Unit
6	Kab. Nias Selatan	Kec. Lolomatua	Desa Tumari	33 Unit
		Kec. Ulususua	Desa Hilinifaoso	38 Unit
	Jumlah			204 Unit

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provsu

3) Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya

Tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah membangun sebanyak 35 unit dialokasikan di :

- a. Jalan menuju lokasi pariwisata Lompat Batu Desa Bawofanayama Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan sebanyak 8 Unit.
- b. Jalan menuju lokasi pariwisata Pantai Onolimbu-Tagaule Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias sebanyak 9 unit.

- c. Jalan menuju lokasi pariwisata Pantai Indah Tureloto Desa Balefadorotuhu Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara sebanyak 9 unit.
- d. Jalan dan sekitar Lapangan Tetesua Desa Tegide'u Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat sebanyak 9 unit.

Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan sekitar 300 Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di seluruh wilayah Sumatera Utara. Komoditas IUP yang paling dominan adalah mineral bukan logam dan batuan. Pada saat ini, jumlah IUP OP logam hanya 2 yaitu PT. Jalaan Bukit Batu Bara (Labuhanbatu Utara) dan PT. Madina Mining (Mandailing Natal). Kontribusi pertambangan dan penggalian terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 1,29%.

Pemegang IUP mineral dan batu bara tersebar di Provinsi Sumatera Utara. Sepanjang tahun 2019, jumlah IUP yang telah diterbitkan sekitar 132 IUP yang terdiri dari IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi (IUP OP), IUP OP khusus Pengolahan dan IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan. Semua IUP yang diterbitkan telah mendapatkan persetujuan teknis dari Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara. IUP OP yang diterbitkan memiliki komoditas mineral bukan logam dan batuan. Selain IUP OP yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, terdapat 3 (tiga) izin pertambangan mineral logam yang merupakan kewenangan pemerintah pusat terdiri dari PT. Sorikmas Mining, PT. Agincourt Resources dan PT. Dairi Prima Mineral. Ketiga badan usaha tersebut telah melaksanakan kewajiban penyampaian RKAB di Ditjen Minerba, Kementerian ESDM RI. Kewajiban keuangan ketiga badan usaha tersebut dalam bentuk iuran tetap dan iuran produksi yang disetorkan ke pemerintah pusat.

Upaya penertiban pertambangan tanpa izin dilakukan di Kabupaten Mandailing Natal dan Langkat, kegiatan melibatkan pemangku kebijakan terkait seperti penegak hukum, satuan polisi pamong praja dan organisasi perangkat daerah provinsi dan kabupaten. Upaya penertiban dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Kegiatan penertiban meliputi inventarisasi, sosialisasi dan pelarangan aktivitas penambangan tanpa izin. Kegiatan penertiban meliputi rapat bersama tokoh masyarakat dan menyepakati pelarangan kegiatan penambangan tanpa izin. Sebagai tindak lanjut konkritnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan surat Nomor 540/5218/2019 tanggal 20 Mei 2019 telah menyurati PT. Sinar Batang Natal untuk menghentikan kegiatan penambangan di sungai Aek Pohon, Kelurahan Pidoli, Kec. Panyabungan, Mandailing Natal dengan tembusan kepada pihak kepolisian. Upaya penertiban di Kabupaten Langkat melibatkan penegak hukum dari Polres Langkat. Pemerintah berupaya menjelaskan kepada penambang tanpa izin untuk menghentikan kegiatan karena menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

5. Urusan Pilihan Pariwisata

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pariwisata, antara lain sebagai berikut :

- 1) Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018 adalah 231.465 orang dan pada tahun 2019 hingga bulan November berjumlah 236.198 orang. Pada tahun 2018 jumlah wisatawan nusantara di Sumatera Utara berjumlah 10.345.256.

- 2) Rata rata lama menginap wisatawan domestik tahun 2018 adalah 1,5 hari, sedangkan rata rata menginap wisatawan mancanegara tahun 2018 adalah 1,85 hari. Hal ini mengalami penurunan dari tahun tahun sebelumnya sebesar 0.36 point (sumber BPS). Untuk tahun 2019 BPS belum merilis data.
- 3) Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018 adalah 2,3% sedangkan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 0,1% menjadi 2,4%.
- 4) Tingkat hunian kamar hotel untuk tahun 2018 sebesar 44,21%, sedangkan tingkat hunian kamar tahun 2019 sebesar 52,10%, mengalami peningkatan sebesar 7,89%.

6. Urusan Pilihan Perindustrian

Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2018 sebesar 20,03% dan tahun 2019 sebesar 18,98%. Pertumbuhan industri besar dan sedang di Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 4,01% dan tahun 2019 sebesar -5,11%, sedangkan pertumbuhan industri kecil di Sumatera Utara Tahun 2018 sebesar 7,90% dan tahun 2019 sebesar 9,01%.

Hal lain yang menyangkut pencapaian kinerja di bidang perindustrian pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Meraih Dekranasda Award Tahun 2019 untuk Kategori Serat Alam.
- 2) Meraih Juara 1 saat mengikuti Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) XIX Provinsi Sumatera Utara.
- 3) Mengadakan pelatihan, bantuan sertifikasi, izin usaha dan pelaratan kepada 745 IKM.
- 4) Memfasilitasi IKM untuk mengikuti 34 pameran di dalam dan luar negeri.

7. Urusan Pilihan Perdagangan

Komoditi ekspor unggulan Sumatera Utara tahun 2018 – 2019 masih sama yaitu lemak dan minyak hewan/nabati, karet dan barang dari karet, berbagai produk kimia, kopi, teh, rempah-rempah, bahan kimia organik, tembakau, sabun dan preparat pembersih, ikan dan udang, kayu, barang dari kayu. Perbedaan antara tahun 2018 dengan tahun 2019 yaitu pada tahun 2018 komoditi Mesin-mesin/pesawat mekanik masih masuk ke dalam komoditi unggulan sedangkan pada tahun 2019 komoditi tersebut tidak masuk komoditi unggulan dan digantikan oleh komoditi Buah-buahan.

Volume ekspor Sumatera Utara tahun 2018 (dalam ton) yaitu sebesar 9.645.281 dan tahun 2019 sebesar 9.553.937. Nilai ekspor Sumatera Utara tahun 2018 (dalam US\$) yaitu sebesar 8.784.934 dan tahun 2019 sebesar 7.678.558. Volume impor Sumatera Utara Tahun 2018 (dalam ton) yaitu sebesar 7.215.593 dan Tahun 2019 sebesar 6.324.826. Nilai import Sumatera Utara tahun 2018 (dalam US\$) yaitu sebesar 5.652.590 dan tahun 2019 sebesar 4.525.950.

Surplus/minus neraca perdagangan internasional tahun 2018 (dalam US\$) yaitu surplus sebesar 3.992.692 dan Tahun 2019 surplus sebesar 3.152.771. Kinerja pada tahun 2019 di urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 443.500.000 atau sebesar 138,59% dari target PAD yang ditetapkan.
- 2) Jumlah sertifikat mutu yang diterbitkan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi sebanyak 5.932 dokumen, naik sebesar 38,83% dibandingkan tahun sebelumnya.

- 3) Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan Laboratorium dengan menambah 18 ruang lingkup baru, dan membeli 17 alat instrumentasi dengan nilai kurang lebih 4 Milyar.
- 4) Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan sebanyak 57.476 dokumen atau naik sebesar 2,78% dibandingkan tahun sebelumnya.
- 5) Menangani 61 kasus sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang menghasilkan 46 putusan.
- 6) Melaksanakan 16 kali pasar murah dalam menyambut hari-hari besar keagamaan/nasional.
- 7) Menerbitkan 8 rekomendasi pasar tradisional/pasar rakyat untuk kabupaten/kota.

C. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan menjadi kewenangan Provinsi. Bappeda Provinsi Sumatera Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- 2) Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan sumber daya manusia dan sosial budaya, perencanaan ekonomi, kemaritiman dan sumber daya alam, perencanaan sarana dan prasarana kewilayahan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;

- 3) Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang perencanaan pembangunan daerah;
- 4) Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Penyelenggaraan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
- 6) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2005 – 2025, Bappeda Provinsi Sumatera Utara memiliki target kinerja yang hendak dicapai. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilai kualitatif dan atau kuantitatif yang harus dicapai dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi dalam upaya pencapaian visi misinya serta tujuan dan sasarannya.

2. Inspektorat

Dalam rangka menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan, baik temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, Inspektorat Provsu, maupun Inspektorat Jenderal Kemendagri, Inspektorat Provsu telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong OPD terkait dengan temuan agar melaksanakan tindaklanjut temuan-temuan di OPD nya masing-masing. Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Penyelesaian Tindak Lanjut sebanyak 6 kali, yaitu 3 kali dengan kabupaten/kota dan 3 kali dengan seluruh OPD/BUMD Pemprovsu.

Adapun hasil tindak lanjut yang dilakukan terhadap temuan-temuan Tahun 2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

1) Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu

a. OPD dan BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Persentase penyelesaian tindak lanjut OPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar 83,18%. Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2019 sebanyak 682 rekomendasi dengan nilai Rp. 24.175.367.849,31,- yang terdiri dari :

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 474 dengan nilai Rp.249.322.662,00,-
- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 208 dengan nilai Rp.23.881.045.187,31,-

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD yang masih dalam proses sampai dengan tahun 2019 sebanyak 314 rekomendasi dengan nilai Rp.20.551.418.831,40,- yang terdiri dari:

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 215 dengan nilai Rp.200.389.142,00,-
- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 99 dengan nilai Rp.20.551.418.831,40,-

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 53 OPD/BUMD yang belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 368 rekomendasi dengan nilai Rp.3.623.949.017,91, yang terdiri dari :

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 259 dengan nilai Rp.93.933.520,00,-

- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 109 dengan nilai Rp.3.623.949,027,91,-

b. Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

Persentase penyelesaian tindak lanjut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 sebesar 73,56%. Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada 33 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1622 rekomendasi dengan nilai Rp. 122.917.905.646,86,- yang terdiri dari :

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 1256 dengan nilai Rp.30.456.394.088,71,-
- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 366 dengan nilai Rp.92.461.511.558,15,-

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada kabupaten/kota yang masih dalam proses sampai dengan tahun 2019 sebanyak 1151 rekomendasi dengan nilai Rp.108.351.345.499,04,- yang terdiri dari:

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 878 dengan nilai Rp.29.878.962.729,71,-
- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 273 dengan nilai Rp.78.472.382.769,33,-

Status tindak lanjut rekomendasi hasil Pemeriksaan Reguler Inspektorat Provsu pada kabupaten/kota yang belum ditindak lanjuti sampai dengan tahun 2019 sebanyak 471 rekomendasi dengan nilai Rp.14.566.560.147,82,- yang terdiri dari :

- Rekomendasi bersifat administrasi sebanyak 378 dengan nilai Rp.577.431.359,00,-
- Rekomendasi bersifat kerugian daerah sebanyak 93 dengan nilai Rp.13.989.128.788,82,-

2) Pemeriksaan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Jenderal kementerian dalam negeri Tahun 2019 sebesar 100%. Dari hasil pemeriksaan reguler yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada 14 OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019 terdapat 33 temuan dan 47 rekomendasi. Dari rekomendasi tersebut, seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti.

3) Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu

a. LKPD Pemprovsu TA. 2018

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu atas LKPD Pemprovsu TA.2018 terdapat temuan atas Sistem Pengendalian Intern sebanyak 10 temuan dan 32 rekomendasi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.5.027.988.818,-

Dari jumlah temuan di atas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (selesai) sebanyak 29 rekomendasi (91%) dengan nilai kerugian sebesar Rp. 3.441.846.058,- sedangkan yang masih dalam proses penyelesaian tindak lanjut sebanyak 2 rekomendasi (6%) dengan nilai kerugian sebesar Rp.1.586.142.760,- dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi (3%).

- b. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 7 temuan dan 37 rekomendasi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp.27.105.983.289,5,-.

Dari jumlah temuan di atas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (selesai) sebanyak 29 rekomendasi (78%) dengan nilai kerugian sebesar Rp.9.813.893.001,25,- sedangkan yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 8 rekomendasi (22%) dengan nilai kerugian sebesar Rp.17.292.090.287,8,-

- c. Belanja Daerah TA. 2018

Dari hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provsu atas Belanja Daerah TA.2018 terdapat sebanyak 7 temuan dan 56 rekomendasi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp. 10.612.997.176,53,- Dari jumlah temuan di atas telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi (selesai) sebanyak 51 rekomendasi (91%) dengan nilai kerugian sebesar Rp.10.247.829.546,32,- sedangkan yang belum sesuai dan dalam proses tindak lanjut sebanyak 4 rekomendasi (7%) dengan nilai kerugian sebesar Rp. 180.501.428,12,- dan yang belum ditindaklanjuti sebanyak 1 rekomendasi (2%) dengan nilai kerugian sebesar Rp 184.666.202,09,-

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, belanja menurut kelompok belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer.

Tabel 3.26
Realisasi Belanja Tahun 2019

Belanja	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja Operasi	9.778.812.733.865,21	8.814.406.385.427,85	90,14	9.375.598.176.840
Belanja Modal	1.577.381.473.349,98	1.335.258.895.237,40	84,65	1.564.903.232.653
Belanja Tak Terduga	25.000.000.000,00	21.299.175.711	85,20	53.155.528.758
Jumlah	11.381.194.207.215,19	10.170.964.456.376,25	89,37	10.993.656.938.251

Sumber : BPKAD Provsu

Pada APBD Tahun Anggaran 2018, realisasi belanja daerah sebesar Rp. 10.993.656.938.251,00 dan tahun 2019 sebesar Rp. 10.170.964.456.376,25 atau 89.37%. Kelompok Belanja yang paling besar adalah belanja operasi sebesar 90,14%.

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Adapun realisasi Belanja Bagi Hasil dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27
Belanja Bagi Hasil Provinsi Kepada Kabupaten/Kota

TAHUN	PAGU	REALISASI	PERSEN
Tahun 2018	1.577.209.028.427,00	1.569.730.611.414,00	99,53%
Tahun 2019	3.345.467.946.191,00	3.269.478.492.542,00	97,73%

Sumber : BPKAD Provsu

Realisasi Belanja Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.569.730.611.414,00 atau 99,53% dan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 3.269.478.492.542,00 atau 97,73%, ada penurunan sebesar 1,8%. Bagi Hasil Provinsi kepada Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Rokok. Daerah yang menerima Dana Bagi Hasil Provinsi ada 33 Kabupaten/Kota.

Untuk anggaran sektor pendidikan dan kesehatan yang ditetapkan dapat dirinci yaitu :

Tabel 3.28
Anggaran Sektor Pendidikan dan Kesehatan

TAHUN	PAGU	REALISASI
Tahun 2018	2.766.681.318.875,66	615.448.240.232,00
Tahun 2019	3.172.405.252.251.33	526.943.188.521.00

Sumber : BPKAD Provsu

Pada urusan pendidikan pada tahun anggaran 2019 ada kenaikan jumlah anggaran atau kenaikan sebesar 14.66% dibanding tahun anggaran 2018, ini dikarenakan ada kenaikan pada belanja langsung. Sedangkan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2019 ada penurunan anggaran atau penurunan sebesar 16.79% dibandingkan Tahun Anggaran 2018, ini dikarenakan adanya penurunan pada belanja langsung.

4. Badan Penelitian dan Pengembangan

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Forum Organisasi Perangkat Daerah (Forum OPD), maksud dan tujuan pelaksanaan adalah :
 - a. Menyepakati program dan kegiatan prioritas, dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan, yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari forum SKPD Kabupaten/Kota.
 - b. Menyepakati rancangan Renja PD Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu Tahun 2019 sebagaimana yang tercantum dalam lampiran II berita acara ini.
 - c. Menyepakati daftar usulan program dan kegiatan lintas PD dan lintas wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran berita acara ini.
 - d. Menyepakati berita acara beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Forum OPD Balitbang Provsu.
 - e. Berita acara dimaksud dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan RKPD Provsu Tahun 2019.

2) Penerbitan Jurnal INOVASI

Balitbang Provsu secara rutin menerbitkan jurnal penelitian yang bernama “INOVASI” yang telah terakreditasi oleh LIPI. Jurnal tersebut terbit setiap semester atau 2 kali dalam 1 tahun.

3) Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Balitbang Provsu memiliki Sentra HKI yang bertugas memfasilitasi peneliti, inventor, inovator, UMKM dalam mendaftarkan perolehan hak kekayaan intelektualnya. Sentra HKI Lotus Balitbang Provsu juga bertugas mensosialisasikan HKI pada masyarakat Sumatera Utara. Untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas penemuan inventor, telah difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui kegiatan pendaftaran yang

dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provsu Tahun 2019 sebanyak 3 buah, yaitu :

- a. Rumah Jamur Kurnia, Makanan ringan berbahan dasar jamur dengan inventor Kusnur Rofik.
- b. Blue Poda Coffee, minuman dengan bahan dasar kopi, kopi, minuman kopi dengan susu, kopi yang tidak di sangria, minuman dengan bahan dasar kopi inventor Samuel H. Sihombing.
- c. Bandrek Madina, minujman dengan bahan dasar rempah-rempah dengan inventor Zulkifli Nasution.

4) DRD (Dewan Riset Daerah)

Dewan Riset Daerah Sumatera Utara (DRD) telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Menyusun Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu pengetahuan dan teknologi Provinsi Sumatera Utara (Jakstrada IPTEK- SU) Tahun 2011-2015 (Pergub No. 73 Tahun 2011).
- b. Menyusun Agenda Riset Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017(Pergub No. 6 Tahun 2013)
- c. Secara periodik memberi masukan dan saran kepada Gubernur Sumatera Utara dalam bentuk kajian isu aktual.
- d. Mensosialisasikan peran dan fungsi DRD di Kabupaten/Kota
- e. Mensosialisasikan Jakstrada ke SKPD Pemropvsu dan Kab/Kota
- f. Mensosialisasikan Agenda Riset Daerah ke SKPD Pemropvsu dan Kab/Kota
- g. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan DRD ke DRN di Jakarta.
- h. Melaksanakan study banding ke provinsi yang dianggap perlu untuk meningkatkan pembangunan daerah Sumatera Utara
- i. Meningkatkan kemitraan lembaga DRD ke perguruan Tinggi dan stakeholder lainnya

5. Badan Kepegawaian Daerah

Capaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2019 antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.29
Data Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Berdasarkan Jumlah Pegawai Terhadap Kualifikasi Pendidikan dan
Golongan Tahun 2018 s.d Tahun 2019

No	URAIAN	JUMLAH	
		Tahun 2018	Tahun 2019
1	Jumlah Pegawai	27.448	27.234
2	Kualifikasi menurut Pendidikan		
	SD	130	116
	SMP	2.850	193
	SMA	6.858	3.401
	D-I	1.560	1.355
	D-II		
	D-III		
	S-1	13.413	19.692
	S-2	2.527	2.450
	S-3	110	27
	Jumlah	27.448	27.234
3	Kualifikasi menurut Golongan		
	I	207	158
	II	3.142	2.490
	III	15.786	16.902
	IV	8.313	7.584
	Jumlah	27.448	27.234
4	Kualifikasi menurut Jabatan		
	I	1	1
	II	52	44
	III	379	391
	IV	1.110	1.034
	Jumlah	1.542	1.430

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provsu
Tahun 2018 – 2019

No	URAIAN	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Purna Tugas/ Purna Bakti	1.162	1.081
2	Kenaikan Pangkat	6.600	10.209
3	Pelanggaran Disiplin	25	22

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provsu

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah melaksanakan kegiatan dalam Penanggulangan Bencana, antara lain :

- 1) Melaksanakan Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Utara yang digelar di Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai.
- 2) Pelatihan Bimbingan Mental, Fisik dan Disiplin (Bintalfisdis) bagi BPBD se Sumatera Utara (Kerjasama dengan TNI/Polri), yang dilatih oleh Resimen Induk Daerah Militer (Rindam) I/BB Pematangsiantar.
- 3) Pelatihan *Incident Command System for Incident Commander* bagi Sekda Provinsi, Sekda Kabupaten/Kota se Sumatera Utara dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/ Kota se Sumatera Utara (Kerjasama dengan Rindam I BB);
- 4) Menempatkan tenaga fasilitator daerah (Desa/Kelurahan) Tangguh Bencana Provinsi Sumatera Utara di 16 Kabupaten/Kota, Provinsi Sumatera Utara 52 desa kelurahan;
- 5) Operasional updating data kebencanaan (DIMS dan Command Center) BPBD Sumut Tahun 2019.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melauli Badan Penanggulangan Bencana Daerah menempatkan Fasilitator Daerah di 16 Kabupaten/Kota dengan 52 Desa/ Kelurahan untuk membentuk desa/kelurahan tangguh bencana sesuai dengan Visi Misi Gubernur Sumatera Utara untuk Membangun Desa Menata Kota. Perkembangan Data Kebencanaan di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 terdapat 393 kejadian bencana seperti banjir, tanah longsor, gunungapi, kebakaran hutan dan lahan, banjir bandang, angin puting beliung, kekeringan. Kejadian bencana yang terjadi di Sumatera Utara ditangani oleh Satgas Penanggulangan Bencana BPBD dengan mendirikan tenda pengungsi dan memberikan bantuan logistik kepada korban bencana alam.

Penanganan banjir bandang di Mandailing Natal, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membangun Sekolah SMK Pertanian Kopi 1 unit, telah terbangun 26 unit rumah untuk pengungsi, telah tersedia lahan 3 hektar untuk pembangunan 143 unit rumah di Kecamatan Lingga Bayu. Sebelumnya BPBD telah memberikan bantuan logistik dan membuat dapur umum untuk korban bencana alam banjir bandang. Korban bom teroris dan kebakaran di Sibolga telah diberikan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah.

Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan di Wamena, Papua Barat sehingga Gubernur Sumatera Utara memerintahkan Kepala BPBD Provsu dan Tim untuk memulangkan warga Sumatera Utara yang berada di Wamena untuk kembali ke Sumatera Utara. Dalam hal penanganan pengungsi wamena warga Sumatera Utara BPBD bekerjasama dengan OPD lain. Pengungsi dari wamena sebanyak 766 orang yang berhasil dipulangkan ke Sumatera Utara dan diantar kembali ke daerahnya masing-masing.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga telah melakukan pembangunan hunian tetap untuk relokasi tahap III di Siosar, Kabupaten Karo dengan dana hibah dari Pemerintah Pusat. Pembangunan hunian tetap sementara dilaksanakan di Hamparan Mardinding I 170 unit rumah 83,2%, Hamparan Mardinding II 88 unit rumah 45,03%, Hamparan Sukanulu I 192 unit rumah 47,71%, Hamparan Sukanulu II 56 unit rumah 57,69%, Hamparan Lau Kawar 18 unit rumah 15,39%, Hamparan Sigarang-garang I 200 unit rumah 21,89%, Hamparan Sigarang-garang II 168 unit rumah 9,82%, luas keseluruhan 30 Ha dilanjutkan pada tahun 2020. Di daerah aliran lahar gunung Sinabung dibangun Sabo Dam Pengendalian Lahar Gunung Sinabung sehingga aliran lahar tersebut tidak mengarah ke permukiman penduduk. Pembangunan Sabo Dam dilakukan oleh Kementerian PU PR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) II sebanyak 24 unit.

Tim Reaksi Cepat (TRC) melakukan pencegahan dan penanganan Virus Hog Cholera Babi di Sumatera Utara di 15 Kabupaten/ Kota, Provinsi Sumatera Utara. Sebanyak 25.656 ekor per tanggal 10 Desember 2019 BPBD Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Provsu. Tim Reaksi Cepat (TRC) terus melakukan monitoring perkembangan wabah epidemik Virus Hog Cholera Babi di Kabupaten/Kota, Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerjasama dengan Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang untuk pengendalian banjir Medan dan sekitarnya tahun 2019-2022. Dokumen blue print dan rencana aksi banjir medan dan sekitarnya tahun 2019-2022 telah diserahkan ke Gubernur Sumatera dan Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Diharapkan Medan dan sekitarnya bebas banjir pada tahun 2022.

D. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat 3 pembagian urusan, yakni : Absolute (Kewenangan Pusat), Konkuren (yang diserahkan ke daerah) dan Pemerintahan Umum yang merupakan kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Instansi Vertikal di daerah. Adapun Kewenangan Presiden dimaksud adalah :

- 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dlm rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 3) Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama , ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.
- 4) Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dgn memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan Instansi Vertikal.

Mengingat sampai saat ini regulasi terkait pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah belum dikeluarkan maka untuk sementara pembiayaannya dilaksanakan melalui APBD dan dilaksanakan oleh OPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB IV

REALISASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

TAHUN 2019

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 yang berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 diwujudkan melalui sinergitas prioritas pembangunan, program dan kegiatan dengan memperhatikan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, pelaksanaan Tugas Pembantuan, urusan pemerintahan umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Tahun 2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019. Untuk itu RKP 2019 difokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta, perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN. Berdasarkan hal tersebut ditetapkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk Tahun 2019, ditetapkan **“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS”**, dengan 5 (lima) prioritas nasional yaitu :

1. Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan Dan Peningkatan Pelayanan Dasar;

2. Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah Melalui Penguatan Konektivitas Dan Kemaritiman;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, Dan Jasa Produktif;
4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan Dan Sumberdaya Air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Dengan target makro yang ingin dicapai yaitu penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,5 - 9,5 %; pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 – 5,8 %; Rasio Gini menjadi 0,38 – 0,39 %;Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,8 – 5,2 %; dan Indeks Pembangunan Manusia meningkat menjadi 71,98.

1. Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Prioritas Nasional untuk Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar diimplementasikan kedalam 5 Program Prioritas dan 20 Kegiatan Prioritas yaitu :

1.1 Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Program Prioritas Percepatan Pengurangan Kemiskinan, dilaksanakan dengan 5 Kegiatan Prioritas yaitu :

- 1) Penguatan pelaksanaan bantuan sosial tepat sasaran;
- 2) Penguatan sistem jaminan sosial;
- 3) Penguatan literasi untuk kesejahteraan;
- 4) Pelaksanaan reforma agraria;
- 5) Pengelolaan sumber daya alam melalui perhutanan sosial.

Dalam rangka pelaksanaan Program Prioritas Nasional dan Kegiatan Prioritas Nasional tersebut Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan Program Prioritas Provinsi yaitu Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dengan 3 Kegiatan Prioritas yaitu :

- 1) Penguatan Basis Data Terpadu, Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran, Penanganan Fakir Miskin dan Pemanfaatan Data Terpadu PMKS.
- 2) Penguatan Fungsi Kelembagaan Penyelenggara Kegiatan Sosial dan Pemberdayaan Sosial.
- 3) Penguatan Sistem Jaminan Sosial melalui Rehabilitasi Sosial, Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran dan Pengaduan Masyarakat berbasis Online.

Capaian terhadap pelaksanaan Program Prioritas ini dapat dilihat dari keberhasilan pengurangan persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara dimana pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 9,3% tercapai menjadi 8,63%, Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara antara lain adalah :

- 1) Inflasi Sumatera Utara cukup terkendali dan harga eceran komoditas penting relatif stabil.
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka menurun.
- 3) Pertumbuhan Ekonomi cukup stabil.
- 4) Nilai Tukar Petani di Sumatera Utara selama beberapa periode terakhir menunjukkan peningkatan meskipun belum signifikan.
- 5) Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk penduduk yang berada pada Desil 1 secara total tumbuh 4,26%, dan di perkotaan tumbuh 5,69% lebih tinggi dibandingkan kenaikan Garis Kemiskinan.

1.2 Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Program prioritas nasional ini dilaksanakan dengan 5 kegiatan prioritas nasional yaitu :

- 1) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan;
- 2) Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi;
- 3) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Pengendalian Penyakit;
- 4) Percepatan Penurunan Stunting;
- 5) Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Nasional ini oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan dengan Program Prioritas Provinsi Program Meningkatkan pelayanan kesehatan dan Gizi Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak dan Keluarga Berencana
- 2) Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- 3) Kegiatan Percepatan penurunan *stunting*
- 4) Kegiatan Penguatan Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan
- 5) Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 6) Jaminan Kesehatan Masyarakat

1.3 Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Dibidang Pendidikan dalam rangka pelaksanaan Prioritas Nasional Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas yang dilaksanakan dengan 4 kegiatan prioritas yaitu :

- 1) Kegiatan Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan serta pengembangan jurusan sesuai berbasis kewilayahan;
- 2) Kegiatan Penguatan kelembagaan satuan Pendidikan;
- 3) Kegiatan Pengembangan Kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha;
- 4) Kegiatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;
- 5) Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana dan sistim perpustakaan digital.

Terkait dengan program dan kegiatan prioritas nasional dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan Program Prioritas Provinsi yaitu Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas, yang dilaksanakan dengan 5 kegiatan prioritas yaitu :

- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah Kejuruan serta pengembangan jurusan sesuai berbasis kewilayahan
- 2) Penguatan kelembagaan satuan pendidikan
- 3) pengembangan Kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha
- 4) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- 5) Pengembangan sarana dan prasarana dan sistim perpustakaan digital

1.4 Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Program Prioritas Nasional ini dilaksanakan dengan tiga prioritas nasional yaitu :

- 1) Penyediaan Akses Hunian Layak dan Terjangkau;

- 2) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak;
- 3) Peningkatan Kualitas Lingkungan di Permukiman.

Dukungan pelaksanaan Program dan Kegiatan Nasional dimaksud dilaksanakan dengan Program Prioritas Provinsi yaitu Percepatan pemenuhan Infrastruktur Pelayanan Dasar (Rumah layak huni, Air minum, Sanitasi dan Listrik Rumah Tangga) dengan kegiatan prioritas :

- 1) Peningkatan akses air minum perpipaan
- 2) Perencanaan pembangunan TPA Regional
- 3) Perencanaan pembangunan IPAL Kawasan Startegis Provinsi (KSP)
- 4) Peningkatan jaringan drainase yang menuju saluran pembuangan
- 5) Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- 6) Pembangunan Prasarana Sarana Umum (PSU) perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

1.5 Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Prioritas nasional ini dilaksanakan dengan 3 kegiatan prioritas nasional yaitu :

- 1) Penguatan Layanan dan Rujukan Satu Pintu;
- 2) Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 3) Percepatan Pencapaian SPM di Daerah.

Hal ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan program prioritas provinsi meningkatkan tata kelola layanan dasar yang dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) Peningkatan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- 2) Penguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil (Penataan Administrasi Kependudukan).

Pelaksanaan program kegiatan ini dapat dilihat dari realisasi ijin yang diterbitkan melebihi target yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2018, setelah terbitnya PP nomor 24 Tahun 2018 pada 21 Juni 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yaitu Online System Submission (OSS), dimana pelaku usaha diberikan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha secara elektronik untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha), berdasarkan hal tersebut realisasi jumlah ijin dan non ijin yang diterbitkan DISPMPTSP Provsu telah melebihi target yang ditetapkan sekitar 200% untuk ijin dan 1500% untuk non ijin, sedangkan lama proses perizinan di Provinsi Sumatera Utara untuk proses perizinan PMDN hanya 3 hari kerja sedangkan lama proses perizinan sektoral diproses 3 – 40 hari kerja.

Pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keberhasilan dapat dilihat dari indikator Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) sudah tercapai 93 %, Cakupan Akte Anak Usia 0-18 Tahun sebesar 71 %, Cakupan Akte Perkawinan sebanyak 12 Kab/Kota, Persentase Kab/Kota yang sudah melaksanakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebanyak 4 sektor dan Persentase PD Provsu yang sudah melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Database Kependudukan sebanyak 26 OPD).

2. Pengurangan Kesenjangan Antar Wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Prioritas Nasional untuk Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman diimplementasikan kedalam 5 Program Prioritas dan 22 Kegiatan Prioritas yaitu :

2.1 Peningkatan Konektivitas dan TIK

Dilaksanakan dengan 3 kegiatan prioritas yaitu :

- 1) Peningkatan dan Penyediaan Fasilitas Keselamatan Transportasi;
- 2) Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK;
- 3) Pengembangan Ekosistem TIK Menuju Ekonomi Digital;
- 4) Pengembangan Pelabuhan Hub dan *Feeder* Jalur Utama Dan Subsidi Tol Laut;
- 5) Pembangunan dan Pengembangan Transportasi Multimoda Dan Perkotaan;
- 6) Pembangunan dan Pengembangan Bandara Pada Jalur Utama Transportasi

Program Prioritas Daerah dalam rangka mendukung program dan kegiatan prioritas nasional ini adalah

- 1) Peningkatan konektivitas dengan pelaksanaan kegiatan : Pembangunan Transportasi Multimoda; Peningkatan Transportasi Perkotaan; dan Keselamatan Transportasi.
- 2) Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika dengan pelaksanaan kegiatan : Pemenuhan layanan telekomunikasi pada wilayah pulau terluar dan terdepan di Sumatera Utara; dan Penyediaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

2.2 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa

Dilakukan dengan pelaksanaan 3 kegiatan prioritas nasional yaitu:

- 1) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan;
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi;
- 3) Percepatan Pembangunan Desa.

Hal ini disikapi Pemerintah Daerah dengan menetapkan 2 program prioritas yaitu :

- 1) Peningkatan aksesibilitas pada daerah tertinggal, terdepan dan terluar, dengan kegiatan peningkatan jalan kondisi mantap baik kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota dan peningkatan sarana dan prasarana transportasi.
- 2) Pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi pada Kawasan Strategis Provinsi Sumatera Utara dengan kegiatan prioritas pengembangan Pusat Kegiatan Ekonomi di KSN dan KSP/KSPN dan percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Nasional Kepulauan Nias.
- 3) Pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat dari capaian persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 82,19% dan persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 83,71% serta capaian kondisi konektivitas jalan menuju tempat wisata dan industri di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
 - a. KSPN Danau Toba, terdapat 19 ruas jalan provinsi di 8 Kabupaten sepanjang 385,55 Km yang memiliki akses langsung ke Kawasan Strategis Pariwisata Danau Toba.

- b. Bahorok dan Tangkahan, terdapat 2 ruas jalan provinsi di Kabupaten Langkat sepanjang 41,50 Km yang menjadi akses langsung ke daerah wisata Bahorok Bukit Lawang dan Tangkahan.
- c. Berastagi, terdapat 2 ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Karo sepanjang 36,30 Km yang menjadi akses langsung ke Berastagi.
- d. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, terdapat 2 ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Simalungun dan Batubara sepanjang 30,93 Km dalam rangka mendukung akses langsung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
- e. Kawasan Industri Kuala Tanjung, terdapat 2 ruas Jalan Provinsi sepanjang 37,40 Km yang berada di Kabupaten Batubara yang mendukung akses langsung menuju Kawasan Industri Kuala Tanjung.
- f. Kawasan Agropolitan, terdapat 7 ruas Jalan Provinsi sepanjang 195,78 Km yang menuju langsung ke Kawasan Agropolitan di Sumatera Utara.

Indikator pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Persentase Kelompok Binaan PKK dan Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat dengan rata-rata capaian sudah 95 %.

2.3 Penanggulangan Bencana

Dilaksanakan dengan kegiatan prioritas Penguatan Kapasitas Penanggulangan Bencana, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan, Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana Manajemen Kebencanaan.

Hal ini disikapi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan program prioritas adaptasi iklim dan mitigasi bencana dengan kegiatan prioritas Pengendalian Adaptasi Perubahan Iklim (*Climate Change*) dan Pembinaan SPM Penanggulangan Bencana. Pada tahun 2019 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Sumatera Utara mencapai 68,2 sedangkan indikator keberhasilan penanggulangan bencana dapat dilihat dari indikator Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sudah mencakup 33 Kabupaten/Kota, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Kab/Kota) serta Indeks Resiko Bencana sebesar 145.

2.4 Peningkatan Sistem Logistik

Yang dilakukan dengan pelaksanaan kegiatan prioritas nasional antara lain Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian, Penyediaan Sarana Angkut Produk Perikanan, Kelautan, dan Pertanian, Penguatan Industri Pendukung Sistem Logistik dan Penyediaan Infrastruktur Energi dan Transportasi Pendukung Sistem Logistik

Dukungan Provinsi Sumatera Utara terhadap program dan kegiatan prioritas nasional diatas adalah :

- 1) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan, dengan kegiatan prioritas pengadaan sarana dan prasarana penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan, diversifikasi produk olahan, optimalisasi rumah kemasan

- 2) Peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan peternakan dengan kegiatan prioritas pengadaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perikanan.

3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Prioritas Nasional untuk Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif diimplementasikan kedalam 5 Program Prioritas dan 22 Kegiatan Prioritas yaitu :

3.1 Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Program prioritas nasional ini dijalankan dengan menetapkan 5 kegiatan prioritas nasional yaitu :

- 1) Peningkatan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- 2) Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- 3) Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Usaha Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- 5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Nilai Tambah Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional ini sejalan dengan pelaksanaan prioritas nasional Peningkatan Sistem Logistik yang oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara disikapi dengan menetapkan program peningkatan nilai tambah produk pertanian, perikanan, perkebunan dan kehutanan, yang dilakukan dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan hasil pertanian, perikanan, perkebunan & kehutanan;
- 2) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, perkebunan & kehutanan;
- 3) Peningkatan mutu, sertifikasi & standarisasi hasil pertanian, perikanan, perkebunan & kehutanan;
- 4) Peningkatan sarana & prasarana pendukung nilai tambah pertanian, perikanan, perkebunan & kehutanan.

3.2 Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Prioritas nasional ini dilakukan dengan perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, pengembangan dan peningkatan investasi industri hulu non agro dan pendukung, peningkatan daya saing industri andalan non pangan, pengembangan 7 kawasan industri dan 6 KEK industri/logistic.

Prioritas dan kegiatan nasional ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan program peningkatan daya saing produk industri bernilai tambah yang diterapkan dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan produktifitas industri bernilai tambah (hilirisasi industri);
- 2) Pengembangan Pusat Industri Baru;
- 3) Promosi KEK Sei Mangei;
- 4) Pengembangan Kawasan IKM dan Penguatan Nilai Tambah Industri Kecil dan Menengah;
- 5) Penguatan Produk Unggulan Daerah;
- 6) Pengembangan Digitalisasi IKM.

Keberhasilan program dan kegiatan ini dapat dilihat dari Tahun 2019 (Data Sementara Nov 2019) Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK adalah sebesar 1,20%, Kondisi ini menurun Jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 3,66%. Untuk nilai Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang Pada Tahun 2019 (Data Sementara), Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Utara turun menjadi 1,26% jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 4,01%. Untuk nilai Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2019 (Data Sementara) turun menjadi 6,45% jika dibandingkan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 7,90%. Laju pertumbuhan Industri Terhadap PDRB ADHK, Pertumbuhan Industri Besar dan Sedang serta Pertumbuhan Industri Mikro Kecil mengalami penurunan pada Tahun 2019 (Data Sementara) jika dibandingkan Tahun 2018. Kondisi tersebut diasumsikan terjadi karena :

- 1) Sarana dan prasarana produk IKM yang belum menggunakan technology terbaru (*up to date*);
- 2) Masih rendahnya daya saing produk IKM dibanding barang impor;
- 3) Peningkatan produktivitas dan kompetensi SDM Industri masih belum optimal;
- 4) Promosi dan pemasaran produk IKM dan industri yang belum optimal.

3.3 Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

Kegiatan prioritas nasional yang mendukung program ini adalah :

- 1) Percepatan Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata dan Destinasi Unggulan;
- 2) Penguatan Struktur Ekonomi Kreatif;

- 3) Pengembangan Kemitraan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan Usaha Menengah dan Besar (UMB);
- 4) Peningkatan Perdagangan Dalam dan Luar Negeri; dan
- 5) Perluasan Akses Keuangan/Pembiayaan.

Dukungan daerah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional ini adalah dengan menetapkan program :

- 1) Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif yang dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Ekonomi Kreatif (Ekraf), Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Bernilai Tambah, Peningkatan Produktifitas Ekspor Bernilai Tambah dan Peningkatan *Branding* dan *Design* Produk.
- 2) Pengelolaan KUR dan Penguatan Pembinaan Koperasi dan UMKM yang dilaksanakan dengan kegiatan Peningkatan Pelayanan Akses KUR, Peningkatan Akses Pembinaan UMKM, Peningkatan Produktifitas UMKM dan Pengembangan Digitalisasi Koperasi dan UKM.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat pada tahun 2019 Nilai Neraca Perdagangan Provinsi Sumatera Utara mengalami penurunan yaitu menjadi \$ 2,9 Juta jika dibandingkan dengan Tahun 2018 yang tercatat sebesar \$ 3,99 Juta. Kondisi tersebut terjadi diasumsikankarena :

- 1) Nilai Ekspor Komoditas Utama Provinsi Sumatera mengalami penurunan.
- 2) Belum Optimalnya Kinerja Ekspor Sumatera Utara.
- 3) Ekspor Sumatera Utara masih Bergantung pada Komoditas Kelapa Sawit, Karet, dan Kopi.

Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi sebesar 8,00% jika dibanding dengan Tahun 2018 yang tercatat sebesar 6,11%.

Peningkatan tersebut diasumsikan terjadi karena meningkatnya konsumsi pemerintah dan nilai inflasi yang terjaga.

Sedangkan dari jumlah Usaha Mikro dan Kecil, mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebanyak 2.857.124 unit menjadi 2.860.248 unit pada tahun 2019. Sementara dari indikator persentase koperasi aktif pada tahun 2019 sebesar 35,91%, kondisi ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 57,26% pada tahun 2018. Kondisi ini diasumsikan disebabkan oleh :

- 1) Rendahnya daya saing produk Koperasi.
- 2) Masih rendahnya Modal Koperasi (simpanan pokok dan wajib anggota koperasi).
- 3) Belum optimalnya Kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola/Pengurus Koperasi.

3.4 Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Program prioritas nasional ini dilaksanakan dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Kerja Sama dengan Dunia Usaha;
- 2) Penguatan Penyelenggaraan Diklat Vokasi;
- 3) Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi;
- 4) Peningkatan Keterampilan Wirausaha.

Dalam rangka peningkatan keahlian tenaga kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan program prioritas provinsi yaitu Peningkatan produktivitas dan keahlian tenaga kerja dengan kegiatan prioritas Peningkatan Skill Tenaga Kerja, Peningkatan Keterampilan Wirausaha, Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Usaha (link and match) serta Pengembangan Sarana dan Prasarana Balai Latihan Kerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan. Namun, kondisi ini masih belum baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Pada tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Sumatera Utara tercatat sebesar 5,41% lebih tinggi jika dibandingkan dengan capaian Nasional yang tercatat sebesar 5,28%. Masih belum signifikannya capaian penurunan pengangguran antara lain disebabkan belum terpenuhinya skill tenaga kerja kompeten yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dapat pula terjadi jika investasi yang masuk tidak menyerap banyak tenaga kerja daerah.

3.5 Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Program prioritas nasional untuk pengembangan IPTEK dan inovasi ini didukung dengan kegiatan prioritas antara lain :

- 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Keilmuan Strategis Penunjang Produktivitas;
- 2) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pengungkit Produktivitas;
- 3) Penyiapan SDM Iptek (Peneliti, Perekayasa);
- 4) Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier.

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan prioritas nasional ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerapkan kegiatan kelitbangan dan inovasi daerah dimana berdasarkan data persentase Implementasi Rencana Kelitbangan di Provinsi Sumatera Utara, diharapkan setiap tahunnya mencapai 20%, dan persentase pemanfaatan hasil kelitbangan juga diharapkan

mencapai 20%. Persentase Perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah perbandingan jumlah perangkat daerah yang difasilitasi dibagi dengan total perangkat daerah ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 15% dan Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah ditargetkan pada tahun 2019 sebesar 50%.

4. Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumberdaya Air

Prioritas Nasional untuk Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumberdaya Air diimplementasikan kedalam 4 Program Prioritas dan 18 Kegiatan Prioritas yaitu :

4.1 Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Program prioritas nasional ini dilaksanakan dengan 5 kegiatan prioritas yaitu :

- 1) Peningkatan Produksi dan Cadangan Minyak, Gas Bumi, dan Energi Lainnya;
- 2) Pembangunan Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik;
- 3) Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT);
- 4) Peningkatan Pemanfaatan Batubara dan Gas Bumi Dalam Negeri;
- 5) Peningkatan Efisiensi Energi.

Dalam menyikapi hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan Pengembangan pelayanan ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan sebagai program prioritas provinsi yang didukung dengan 3 kegiatan utama yaitu :

- 1) Pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan;
- 2) Pemasangan Sambungan Listrik Baru Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu;
- 3) Pemasangan Jaringan Listrik Desa.

Keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat dilihat dari Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1
Capaian Indikator Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Indikator	2017	2018	2019
1	Daya Listrik terpasang	4.189,88 MW	4.552,44 MW	4.814,4 MW
2	Rasio Elektrifikasi	97.80	99,99	99.99

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- 1) Kondisi tahun 2019 kapasitas mampu pembangkit sebesar 3.400 MW merupakan Kapasitas Mampu Pembangkit Tenaga Listrik PT. PLN (persero) Wilayah Sumatera Bagian Utara berdasarkan RUPTL PT. PLN (persero) tahun 2019-2028 dengan Daya Listrik Terpasang 4.552,445 MW ($\cos \theta = 0,8$).

Tahun 2019 PT. PLN (persero) merencanakan pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas 550 MW yang direncanakan beroperasi pada tahun 2019 sehingga dapat menambah Kapasitas Mampu Pembangkit di Wilayah Sumatera bagian Utara menjadi 3.950 MW.

- 2) Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 direncanakan sebesar 99,90%. Berdasarkan statistik PT. PLN Unit Induk Wilayah Sumatera Utara, rasio elektrifikasi pada

tahun 2018 sebesar 100,73 % jika memperhatikan RE = Jumlah Pelanggan PLN/Jumlah Rumah Tangga.

4.2 Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional ini Pemerintah Pusat menetapkan 5 kegiatan prioritas yang mendukungnya yaitu :

- 1) Peningkatan Penyediaan Pangan Hasil Pertanian dan Perikanan;
- 2) Penguatan Kelembagaan dan Layanan Pertanian dan Perikanan;
- 3) Peningkatan Kualitas Konsumsi pangan;
- 4) Penyediaan Sarana Prasarana Pertanian dan Perikanan;
- 5) Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan.

Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas nasional ini, dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui penetapan program :

- 1) Peningkatan penerapan teknologi pertanian, perikanan dan peternakan, dengan kegiatan prioritas pengadaan sarana dan prasarana penerapan teknologi pertanian, peternakan dan perikanan, diversifikasi produk olahan, optimalisasi rumah kemasan.
- 2) Peningkatan produksi hasil pertanian, perikanan dan peternakan dengan kegiatan prioritas pengadaan sarana dan prasarana pertanian, peternakan dan perikanan serta pembangunan infrastruktur pendukung pertanian, peternakan dan perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan ini dapat dilihat dari terus meningkatnya produksi pangan baik dari sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan, Hal ini juga didukung indikator Pola Pangan Harapan (PPH) di Sumatera Utara mengalami peningkatan hingga 2019 sebesar 89,2 poin.

4.3 Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air

Implementasi pelaksanaan program prioritas nasional ini dilakukan dengan beberapa kegiatan prioritas yaitu :

- 1) Pemeliharaan dan Pemulihan Sumber Air dan Ekosistem.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Air untuk Sosial dan Ekonomi Produktif.
- 3) Ketangguhan Masyarakat dalam Mengurangi Daya Rusak Air.
- 4) Peningkatan Regulasi dan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air.

4.4 Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Pemerintah menetapkan 4 kegiatan prioritas nasional dalam rangka mendukung kegiatan prioritas ini yaitu :

- 1) Pencegahan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 2) Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- 3) Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
- 4) Penguatan Kelembagaan dan Pemantapan Regulasi di Bidang Lingkungan Hidup.

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- 1) Urusan absolut;
- 2) Urusan konkuren; dan
- 3) Urusan pemerintahan umum.

Ketiga urusan pemerintahan tersebut terpilah menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan umum meliputi pembinaan ketahanan Nasional, kerukunan antar umat beragama, persatuan dan kesatuan bangsa, penanganan konflik sosial, pembinaan kerukunan antar ataupun intra suku, koordinasi pelaksanaan tugas antara instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan kabupaten/kota, pengembangan kehidupan demokrasi dan pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan daerah.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawaban pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

pemberian tugas pembantuan pada dasarnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum.

A. TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA

Tugas pembantuan yang diterima dari Pemerintah melalui Kementerian terkait kepada Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yaitu :

1. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi

1.1 Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Dekonstruksi dan Tugas Pembantuan.
- 2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-033.04.4.079333/2019.

1.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga.

1.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Penyelenggaraan Jalan, dengan kegiatan :Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.

1.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 16.311.539.000,- dan realisasi Rp. 15.050.578.000,- atau sekitar 92,27%.

2. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang

2.1 Dasar Hukum

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang merupakan kewenangan Pemerintah dan dilaksanakan melalui Delonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor DIPA – 033.06.4.079330/2019.

2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi Pemberi Tugas Pembantuan adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Marga.

2.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara.

2.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Peningkatan Kinerja Layanan Irigasi, dengan kegiatan :

- 1) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi.
- 2) Layanan Internal.
- 3) Pelaporan Emon.

2.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.327.973.000,- dan realisasi sebesar Rp. 17.845.692.000,- atau sekitar 97,37%.

3. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

3.1 Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.
- 3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA. 2019.
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA Nomor 018.06.4.079127/2019
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA Nomor 018.08.4.079131/2019
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA Nomor 018.11.3.079318/2019

3.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI.
- 2) Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian Kementerian Pertanian RI.
- 3) Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI.

3.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara.

3.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Pemenuhan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Produksi Pakan Ternak.
- 2) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

- 3) Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak.
- 4) Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal.
- 5) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan.

Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.
- 2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan.
- 3) Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Ketahanan Pangan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

- 1) Pengeloaan air irigasi untuk pertanian.
- 2) Dukungan manajemen dan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 3) Fasilitasi pembiayaan pertanian.

3.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 36.066.484.000,- dan realisasi sebesar Rp. 33.742.839.230,- atau 93,56%.

4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.1 Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111/2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114/2014 tentang pedoman pembangunan desa.
- 3) Permendes Nomor 1/2015 tentang pedoman kewenangan lokal berskala desa.
- 4) Permendes Nomor 3/2015 tentang pendamping desa.
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-067-03.3.350144/2018 tanggal 05 Desember 2018.

4.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

4.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara.

4.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), dengan kegiatan : Rapat Koordinasi Provinsi.

4.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari APBN dengan jumlah anggaran sebesar Rp.108.864.935.000,- dan realisasi Rp.104.039.722.495,- atau 95,57%.

5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

5.1 Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA. 2019
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA - 040.01.3.070118/2019

5.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

5.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.

5.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya, dengan kegiatan : Pengembangan Perencanaan keuangan.

Program Pengembangan Kepariwisata, dengan kegiatan :

- 1) Pengembangan Pemasaran Pariwisata di Wilayah Eropa.
- 2) Pengembangan Pemasaran Pariwisata Wilayah Indonesia Barat, Singapore, Thailand dan Indocina.
- 3) Pengembangan Pemasaran Wilayah Indonesia Tengah, Malaysia dan Brunei.
- 4) Pengembangan SDM Pariwisata dan Hubungan Antar Lembaga.

5.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 1.655.744.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.516.244.900,- atau 91,57%.

6. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

6.1 Dasar Hukum

- 1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

- 3) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019.
- 4) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA - 018.03.4.079124/2019 Revisi ke-07 Tanggal 27 November 2019
- 5) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 018.04.4.079125/2019 Revisi ke-10 Tanggal 27 November 2019
- 6) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA- 018.08.4.079132/2018 Revisi ke-07 Tanggal 27 November 2019

6.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

- 1) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 2) Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia
- 3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

6.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara.

6.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, dengan kegiatan :

- 1) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi.
- 2) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal.

- 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan.
- 4) Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Tanaman Pangan.
- 5) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura, dengan kegiatan :

- 1) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat.
- 2) Peningkatan Usaha Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura.
- 3) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- 4) Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura.

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan kegiatan :

- 1) Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian.
- 2) Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian.
- 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian.
- 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
- 5) Fasilitasi Pupuk dan Pestisida.
- 6) Fasilitasi Pembiayaan Pertanian.

6.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

- 1) Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jumlah anggaran Rp. 50.168.130.000,- realisasiRp. 40.035.174.639,- atau 80,04%.

- 2) Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jumlah anggaran Rp. 40.579.250.000,-dengan realisasi Rp. 33.854.260.120,- atau 83,43%.
- 3) Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, jumlah anggaran Rp. 47.020.560.000,- dengan realisasi Rp. 42.955.848.490,- atau 91,36%.

7. Dinas Perkebunan

7.1 Dasar Hukum

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.05.04.079126/2019

7.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Instansi pemberi tugas pembantuan adalah Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

7.3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Melaksanakan

Tugas pembantuan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara.

7.4 Program dan kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan, dengan kegiatan :

- 1) Perluasan tanaman kopi arabika di Kabupaten Tapanuli Utara 150 Ha.
- 2) Perluasan tanaman kopi arabika di Kabupaten Toba Samosir 150 Ha.

- 3) Perluasan tanaman kopi arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan 526 Ha.
- 4) Peremajaan tanaman kopi arabika Kabupaten Karo (100 Ha).
- 5) Peremajaan tanaman kopi arabika Mandailing Natal (100 Ha).
- 6) Peremajaan tanaman kopi arabika Kabupaten Humbang Hasundutan (274 Ha).
- 7) Peremajaan tanaman kopi arabika Kabupaten Dairi (100 Ha).
- 8) Pengawalan dan pendampingan kegiatan peremajaan tanaman kopi arabika di Provinsi.
- 9) Pengawalan dan pendampingan kegiatan peremajaan tanaman kopi arabika di Kabupaten Karo.
- 10) Pengawalan dan pendampingan peremajaan tanaman kopi arabika di Kabupaten Mandailing Natal.
- 11) Pengawalan dan pendampingan peremajaan tanaman kopi arabika di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 12) Pengawalan dan pendampingan peremajaan tanaman kopi arabika di Kabupaten Dairi.
- 13) Pengawalan dan pendampingan perluasan tanaman kopi arabika di Kabupaten Tapanuli Utara.
- 14) Pengawalan dan pendampingan perluasan tanaman kopi arabika di Kabupaten Toba Samosir.
- 15) Pengawalan dan pendampingan perluasan kopi arabika di Provinsi.
- 16) Penilaian Kebun Revitalisasi Perkebunan.
- 17) Fasilitasi, inventarisasi, identifikasi, serta penanganan kasus gangguan usaha perkebunan.
- 18) Administrasi kegiatan dana Tugas Pembantuan (TP).
- 19) Pengelola kegiatan kabupaten/kota.
- 20) Dukungan pengadaan barang dan jasa.
- 21) TKP/PLP-TKP fasilitasi pembangunan perkebunan.

- 22) Kegiatan obor pangan lestari 4 Unit (OPAL).
- 23) Program petani milenial 83 KT.
- 24) Pengelola Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- 25) Penanaman tanaman tembakau di Kabupaten Karo (20 Ha).
- 26) Penanaman tanaman tembakau di Kabupaten Dairi (16 Ha).
- 27) Penanaman tanaman tembakau di Kabupaten Humbang Hasundutan (10 Ha).
- 28) Pengawalan dan pendampingan penanaman tanaman tembakau di provinsi.
- 29) Pengawalan dan pendampingan penanaman tanaman tembakau di Kabupaten Karo.
- 30) Pengawalan dan pendampingan tanaman tembakau di Kabupaten Dairi.
- 31) Pengawalan dan pendampingan penanaman tanaman tembakau di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 32) Penanganan pascapanen kopi di Kabupaten Toba Samosir (2 KT)
- 33) Pertemuan teknis petani kopi di Kabupaten Toba Samosir.
- 34) Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar (PIP) komoditas tanaman perkebunan.
- 35) Fasilitasi pertemuan dan koordinasi penetapan harga TBS.
- 36) Fasilitasi pengolahan kopi di Kabupaten Simalungun (4 Unit).
- 37) Fasilitasi pengolahan kopi di Kabupaten Toba Samosir (5 Unit).
- 38) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Deli Serdang (5 Ha).
- 39) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Simalungun (1 Ha).
- 40) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Serdang Bedagai (1 Ha).

- 41) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Langkat (2 Ha).
- 42) Pemeliharaan kebun induk tanaman kopi tahun 3 Kabupaten Tapanuli Utara 2 Ha.
- 43) Pemeliharaan kebun induk kopi yang telah ditetapkan Kabupaten Tapanuli Utara (1 Ha).
- 44) Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan Kabupaten Serdang Bedagai (1 Ha).
- 45) Pemeliharaan kebun sumber benih unggul cengkeh Kabupaten Karo (1 Ha).
- 46) Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan di provinsi 57 Ha.
- 47) Pemeliharaan kebun induk tanaman kopi tahun 1 Kabupaten Toba Samosir (5 Ha).
- 48) Pemeliharaan kebun induk tanaman kopi tahun 1 Kabupaten Simalungun (2 Ha).
- 49) Pemeliharaan kebun entres kakao yang telah ditetapkan di provinsi 3 Ha.
- 50) Sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.
- 51) Rintisan model pengembangan desa mandiri benih kopi di Kabupaten Samosir.
- 52) Fasilitasi kegiatan bedah kemiskinan rakyat sejahtera tahun 2019.
- 53) Penanganan BMN dan tindaklanjut penyelesaian temuan BPK-RI.
- 54) Penanaman tembakau Kabupaten Karo (75 Ha).
- 55) Pengawasan dan pendampingan tanaman tembakau Kabupaten Karo.
- 56) Pengawasan dan pendampingan tanaman tembakau di Provinsi Sumatera Utara.

- 57) Rehabilitasi tanaman cengkeh (450 Ha) Kabupaten Simalungun.
- 58) Pengawasan dan pendampingan rehabilitasi tanaman cengkeh di provinsi.
- 59) Pengawasan dan pendampingan rehabilitasi tanaman cengkeh di Kabupaten Simalungun.
- 60) Pengadaan alat pascapanen kopi Kabupaten Humbang Hasundutan (1 KT).
- 61) Pertemuan teknis petani kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 62) Pengadaan alat pascapanen kopi Kabupaten Toba Samosir (1 KT).
- 63) Pengadaan alat pascapanen kopi Kabupaten Samosir (1 KT).
- 64) Pengadaan alat pascapanen kopi Kabupaten Simalungun (1 KT).
- 65) Pengadaan alat pascapanen kopi Kabupaten Tapanuli Selatan (1 KT).
- 66) Pertemuan teknis petani kopi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 67) Fasilitasi pengolahan karet Kabupaten Serdang Bedagai (1 unit).
- 68) Fasilitasi pengolahan kopi Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 69) Fasilitasi pengolahan kopi Kabupaten Toba Samosir.
- 70) Fasilitasi pengolahan kopi Kabupaten Samosir.
- 71) Fasilitasi pengolahan karet Kabupaten Langkat.
- 72) Fasilitasi pengolahan kopi Kabupaten Humbang Hasundutan (PP).
- 73) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pengolahan hasil perkebunan (pengembangan agroindustri perkebunan).
- 74) Bimbingan teknis pengolahan hasil perkebunan (pengembangan agroindustri perkebunan).

- 75) Pemutakhiran data base UPH (pengembangan agroindustri perkebunan).
- 76) Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan.
- 77) Monitoring perusahaan perkebunan.
- 78) Monitoring dan surveilan penjamin mutu dan keamanan produk perkebunan.
- 79) Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditi perkebunan (provinsi).
- 80) Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas perkebunan Kabupaten Deli Serdang.
- 81) Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas perkebunan Kabupaten Langkat.
- 82) Pengembangan pelayanan informasi pasar komoditas perkebunan Kabupaten Asahan.
- 83) Fasilitasi pengembangan usaha produk perkebunan unggulan.
- 84) Fasilitasi pertemuan dan koordinasi penetapan harga TBS.
- 85) Fasilitasi pemasaran karet melalui UPBB.
- 86) Fasilitasi pengembangan agrowisata Kabupaten Samosir.
- 87) Pengembangan akses produk perkebunan unggulan di pasar internasional.
- 88) Fasilitasi pengembangan produk perkebunan berbasis IG (Indikasi Geografis).
- 89) Pembangunan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
- 90) Pembangunan kebun induk tanaman kopi di Kabupaten Simalungun (2 Ha).
- 91) Pembinaan dan pengawalan kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kopi di Kabupaten Simalungun.
- 92) Pembangunan kebun induk tanaman kopi di Kabupaten Toba Samosir.

- 93) Pembinaan dan pengawalan kegiatan pembangunan kebun induk tanaman kopi di Kabupaten Tobasa.
- 94) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Deli Serdang (5 Ha).
- 95) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Simalungun (1 Ha).
- 96) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Serdang Bedagai (1 Ha).
- 97) Pemeliharaan kebun entres karet yang telah ditetapkan Kabupaten Langkat (2 Ha).
- 98) Pemeliharaan kebun induk tanaman kopi tahun 2 Kabupaten Tapanuli Utara.
- 99) Pemeliharaan kebun induk kopi yang telah ditetapkan Kabupaten Tapanuli Utara (1 Ha).
- 100) Pemeliharaan BPT dan PIT Kelapa yang telah ditetapkan Kabupaten Serdang Bedagai (1 Ha).
- 101) Pemeliharaan BPT dan PIT Cengkeh yang telah ditetapkan di Kabupaten Karo 1 Ha.
- 102) Evaluasi kelayakan kebun sumber benih tanaman perkebunan di provinsi 40 Ha.
- 103) Pemeliharaan kebun induk kopi yang telah dilepas di provinsi 2 Ha.
- 104) Identifikasi, penilaian, pemurnian dan penetapan kebun sumber benih tanaman perkebunan.
- 105) Penetapan kebun sumber benih varietas yang telah dilepas.
- 106) Identifikasi calon kebun sumber benih tanaman tahunan dan penyegar.
- 107) Penyediaan benih kopi arabika siap tanam (821.700 batang).
- 108) Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih kopi siap tanam.

- 109) Penyediaan benih kakao siap tanam (547.800 batang).
- 110) Pembinaan dan pengawalan penyediaan benih kakao siap tanam.
- 111) Penyediaan benih kelapa siap tanam (35.200 btg).
- 112) Pengawalan penyediaan benih kelapa siap tanam.
- 113) Pemeliharaan produksi/perbanyak benih kopi siap tanam.
- 114) Pengawalan pemeliharaan produksi/perbanyak benih kopi siap tanam.
- 115) Bimtek pembangunan kebun sumber penyediaan benih tanaman tahunan dan penyegar.
- 116) Bimbingan teknis perbenihan tanaman kakao.
- 117) Bimbingan teknis perbenihan tanaman kopi.
- 118) Fasilitasi penilaian varietas tanaman perkebunan.
- 119) Sertifikasi dan pengawasan mutu benih tanaman perkebunan.
- 120) Fasilitasi pembinaan kelembagaan usaha produksi.
- 121) Fasilitasi pembinaan kelembagaan pengawasan benih.
- 122) Rintisan model pengembangan desa mandiri benih di Kabupaten Humbang Hasundutan.
- 123) Fasilitasi kegiatan bedah kemiskinan rakyat sejahtera di Kabupaten Langkat.

7.5 Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pendanaan berasal dari APBN Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 18.254.514.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.742.667.243,- atau 97,20%.

BAB VI

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dimana dibutuhkan suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan penegakan hukum dan menciptakan ketertiban, serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, meliputi :

- 1) Kerjasama Antar Daerah.
- 2) Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- 3) Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah.
- 4) Pembinaan Batas Wilayah.
- 5) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.
- 6) Pengelolaan Kawasan Khusus yang menjadi Kewenangan Daerah.
- 7) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu : efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan Nasional serta keutuhan wilayah NKRI.

A. KERJASAMA ANTAR DAERAH

1. Daerah yang Diajak Kerjasama

Daerah yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Kabupaten Karo;
- 3) Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Kabupaten Humbang Hasundutan;
- 5) Kabupaten Toba Samosir;
- 6) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 7) Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 8) Kabupaten Tapanuli Selatan;
- 9) Kabupaten Nias;
- 10) Kabupaten Langkat;
- 11) Kabupaten Simalungun;
- 12) Kabupaten Asahan;
- 13) Kabupaten Labuhanbatu;
- 14) Kabupaten Nias Selatan;
- 15) Kabupaten Mandailing Natal;
- 16) Kabupaten Padang Lawas;
- 17) Kabupaten Padang Lawas Utara;
- 18) Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 19) Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 20) Kabupaten Nias Utara;
- 21) Kabupaten Nias Barat;
- 22) Kabupaten BatuBara;
- 23) Kabupaten Samosir;
- 24) Kabupaten Tapanuli Utara;
- 25) Kabupaten Dairi;

- 26) Kabupaten Pakpak Bharat ;
- 27) Kota Medan;
- 28) Kota Binjai;
- 29) Kota Tanjungbalai;
- 30) Kota Tebing Tinggi;
- 31) Kota Pematangsiantar;
- 32) Kota Sibolga;
- 33) Kota Padangsidimpuan;
- 34) Kota Gunungsitoli;
- 35) Kota Pemerintah Kota Bandung;
- 36) Kota Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama antara daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama antar daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara meliputi beberapa bidang kerjasama, yaitu :

- 1) Bidang pertanian.
- 2) Bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 3) Bidang pekerjaan umum.
- 4) Bidang perhubungan.

4. Nama Kegiatan

Kegiatan kerjasama antar daerah yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Medan dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk dengan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tanggal 1 Maret 2019 tentang Kerjasama Pembangunan Jalan Tol dalam Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kota Bandung tanggal 8 Juli 2019 tentang Kerjasama Antar Daerah.
- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tanggal 9 Juli 2019 tentang Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.

4) Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak di Provinsi Sumatera Utara.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah

Organisasi Perangkat Daerah yang memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar daerah adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.1
Data PNS Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu

No	Perangkat Daerah	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Pangkat/Gol	Jumlah
1	Biro Otda dan Kerjasama Setdaprovsu	S3 S2 S1 D3	- 11 12 1	Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina TK I (IV/b) Pembina (IV/a)	- 1 3 6
		SLTA SLTP SD	11 - -	Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda TK I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur TK I (II/d) Pengatur (II/c)	8 2 9 2 2 2
Jumlah			35		35

Sumber : Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pembiayaan kerjasama antar daerah berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 230.376.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 210.462.769,-.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka setiap kesepakatan bersama mempunyai jangka waktu selama 1 tahun sedangkan perjanjian kerjasama mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.

9. Hasil (Output) Kerjasama

Hasil kerjasama antar daerah dapat berupa uang, aset atau non material berupa keuntungan. Hak daerah yang berupa uang disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sedangkan hak daerah yang berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah yang melakukan kerjasama antar daerah secara proporsional.

10. Permasalahan dan Solusi

Apabila kerjasama antar daerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah atau melalui Keputusan Gubernur yang bersifat final dan mengikat. Apabila kerjasama daerah Provinsi dengan Provinsi lain atau antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antara daerah Kabupaten/Kota dengan daerah Kabupaten atau daerah Kota dari Provinsi yang berbeda apabila terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan musyawarah atau melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri yang bersifat final dan mengikat.

B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

1. Mitra yang Diajak Kerjasama

Mitra yang diajak kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia.
- 3) Universitas Pertahanan.
- 4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.
- 6) Perhimpunan Advokat Indonesia.
- 7) Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Sumatera Utara.
- 8) PT. Hanlim Power Indonesia – Hanlim Corporation.
- 9) Yayasan Pusaka Nias.
- 10) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara.
- 11) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- 12) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh.
- 13) USAID Jalin.
- 14) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- 15) PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah.

3. Bidang Kerjasama

Bidang kerjasama yang dilaksanakan dengan Pihak Ketiga, adalah sebagai berikut:

- 1) Pembinaan dan bantuan hukum.
- 2) Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/CSR di kawasan permukiman Sumatera Utara.
- 3) Pendaftaran tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah.
- 4) Pelaksanaan pencegahan terkait larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Pengembangan tanaman macadamia dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada daerah tangkapan air Danau Toba.
- 6) Pendidikan.
- 7) Infrastruktur ketenagalistrikan.

- 8) Pelaksanaan pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan kabupaten/kota layak anak.
- 9) Pengelolaan Museum Pusaka Nias.
- 10) Perencanaan, pembangunan dan pengoperasian angkutan umum perkotaan di Kota Medan.
- 11) BPJS Kesehatan.
- 12) Layanan perlindungan saksi dan/atau korban tindak pidana di Provisni Sumatera Utara.
- 13) Infrastruktur jalan.

4. Nama Kegiatan

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Perhimpunan Advokat Indonesia tanggal 16 Januari 2019 tentang Pembinaan dan Bantuan Hukum untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia Sumatera Utara tanggal 5 April 2019 tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/Corporate Social Responsibility Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Real Estat Provinsi Sumatera Utara di Kawasan Permukiman Sumatera Utara.
- 3) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara tanggal 14 Mei 2019 tentang Pendaftaran Tanah,

Penanganan Permasalahan Aset Tanah dan Pengintegrasian Data Pertanahan dengan Perpajakan Daerah.

- 4) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2019 tentang Pelaksanaan Pencegahan Terkait Larangan Praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Provinsi Sumatera Utara.
- 5) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Juni 2019 tentang Pengembangan Tanaman Macadamia dalam Rangka Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis pada Daerah Tangkapan Air Danau Toba.
- 6) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Universitas Pertahanan tanggal 18 Juli 2019 tentang Kerjasama Tri dharma Perguruan Tinggi.
- 7) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT. Hanlim Power Indonesia - Hanlim Corporation, CO, LTD tanggal 2 Agustus 2019 tentang Kerjasama Penyediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 8) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Utara tanggal 4 September 2019 tentang Sinergi Program dan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik di Desa se Sumatera Utara.
- 9) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Yayasan Pusaka Nias tanggal 14 September 2019 tentang Kerjasama Pengelolaan Museum Pusaka Nias di Kota Gunungsitoli.

- 10) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara tanggal 19 November 2019 tentang Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Penyaluran Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- 11) Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kota Medan tanggal 6 Desember 2019 tentang Perencanaan, Pembangunan dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan di Kota Medan.
- 12) Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kedeputan Wilayah Sumatera Utara dan Aceh tanggal 12 Desember 2019 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Wilayah Provinsi Sumatera Utara.
- 13) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan USAID Jalin tanggal 17 Desember 2019 tentang Penurunan Jumlah Kematian Ibu dan Bayi Baru Lahir yang dapat dicegah di Provinsi Sumatera Utara.
- 14) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tanggal 20 Desember 2019 tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Layanan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Utara.
- 15) Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan PT.Indonesia Asahan Inalum (Persero) tanggal 20 Desember 2019 tentang Pemanfaatan dan Pemeliharaan Jalan dan Ruang Milik Jalan Ruas Jalan Provinsi Jurusan Porsea – Batas

Asahan di Zona Khusus Simangkok–Batas Asahan Kabupaten Toba
Samosir Provinsi Sumatera Utara.

5. Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah
Dengan Pihak Ketiga

Organisasi Perangkat Daerah yang memfasilitasi penyelenggara bidang kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Jumlah PNS Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Setdaprovsu sebagaimana terlihat pada tabel 6.1.

7. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber pembiayaan kerjasama daerah dengan pihak ketigaberasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 223.785.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 202.114.683,-.

8. Jangka Waktu Kerjasama

Sesuai peraturan perundangan yang berlaku maka setiap kesepakatan bersama mempunyai jangka waktu selama 1 tahun sedangkan Perjanjian Kerjasama mempunyai jangka waktu sesuai kesepakatan para pihak.

C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Pada tahun 2019 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal yang ada di daerah. Adapun dasar hukum atau kebijakan yang melatarbelakangi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terkait koordinasi dengan instansi vertikal ini adalah :

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 3 tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Utara.

1. Kebijakan dan Kegiatan

Untuk melakukan koordinasi dengan Instansi vertikal pada tahun 2019, Kesbangpol melaksanakan pertemuan/rapat dengan instansi vertikal di daerah. Pelaksanaan pertemuan ini dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ada di Kesbangpol, adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan kegiatan :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial.
- 2) Penggalangan Cipta Kondisi Keamanan Sumatera Utara.
- 3) Diskusi Publik dalam rangka pemecahan isu-isu aktual.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Keseluruhan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan instansi vertikal dalam pelaksanaannya, guna terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Sumatera Utara. Untuk realisasi pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1 Penggalangan Cipta Kondisi Sumatera Utara dan Diskusi Publik dalam rangka pemecahan isu - isu aktual

Kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kondusivitas wilayah Sumatera Utara, bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah melalui Rapat Bersama Instansi Vertikal untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas wilayah Sumatera Utara.

2.2 Pelaksanaan Koordinasi Konflik Sosial

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 dan Permendagri No. 42 Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Sosial. Adapun ruang lingkup penanganan konflik dalam peraturan ini adalah Pencegahan konflik, Penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Disamping itu kegiatan ini juga bertujuan sebagai bentuk pencegahan dan deteksi dini terhadap konflik sosial di daerah serta pemetaan terhadap potensi konflik sosial yang ada di daerah. Dalam kegiatan penanganan konflik sosial ini ada 3 tahapan penanganan konflik yakni : Pencegahan, Penindakan dan Pemulihan Pasca Konflik. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan seperti Rapat, Monitoring maupun pengumpulan data dan bahan untuk pengambilan kebijakan.

3. Permasalahan dan Solusi

Diharapkan adanya payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang melibatkan instansi vertikal sehingga pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal.

D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, dimana dibutuhkan suatu pemerintahan yang mampu melaksanakan penegakan hukum dan menciptakan ketertiban, serta dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan diantaranya pembinaan batas wilayah.

1. Kebijakan dan Kegiatan

- 1) Fasilitasi permasalahan batas daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Penataan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau.
- 3) Penataan batas wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Aceh.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

2.1 Batas Antar Kabupaten/Kota

Pada tahun 2019 capaian kinerja yang dicapai adalah sebesar 98,3%. Capaian pada tahun 2019 tidak mencapai target, dimana target yang akan diselesaikan pada tahun 2019 sebanyak 11

segmen namun yang terealisasi adalah 8 segmen. Hal tersebut disebabkan 3 segmen batas saat ini sedang dalam tahap harmonisasi pada Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka proses penerbitan Permendagri. Sedangkan Permendagri penetapan batas antara Sumatera Utara dengan Aceh belum terealisasi pada tahun 2019.

Adapun segmen batas yang telah diselesaikan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Permendagri Nomor 23 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Langkat dengan Kabupaten Karo;
- 2) Permendagri Nomor 24 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Pakpak Bharat dengan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- 3) Permendagri Nomor 26 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Batubara dengan Kabupaten Serdang Bedagai;
- 4) Permendagri Nomor 27 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Karo;
- 5) Permendagri Nomor 28 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Dairi dengan Kabupaten Pakpak Bharat
- 6) Permendagri Nomor 29 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Simalungun dengan Kabupaten Batubara
- 7) Permendagri Nomor 64 Tahun 2019 batas antara Kabupaten Tapanuli Selatan dengan Kabupaten Padang Sidempuan
- 8) Permendagri Nomor 68 Tahun 2018 batas antara Kabupaten Mandailing Natal dengan Kabupaten Padang Lawas.

Penyelesaian sengketa konflik-konflik pertanahan pada tahun 2019 sedang dilaksanakan adalah penyelesaian terhadap sengketa tanah eks.HGU PTPN II yang terletak di Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Kota Binjai yang sampai

saat ini belum dapat diselesaikan. Penyelesaian sengketa konflik pertanahan tersebut merupakan kewenangan Gubernur sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Kepala BPN RI Nomor 42/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002, Nomor 43/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002, Nomor 44/HGU/BPN/2002 tanggal 29 November 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004 tanggal 6 Februari 2004.

PemprovSU dalam penyelesaian konflik pertanahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi adalah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota sedangkan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota. Pada saat ini kasus dan konflik yang muncul dan ditangani Provinsi baik melalui surat-surat maupun unjuk rasa/demonstrasi masyarakat atau kelompok masyarakat, objek perkaranya berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 6.2
Segmen Batas Kabupaten/Kota yang Telah Terbit Permendagri

No	Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Deli Serdang dengan Kab. Serdang Bedagai	Permendagri No. 29 Tahun 2007
2	Kab. Asahan dengan Kab. Batu Bara	Permendagri No. 45 Tahun 2014
3	Kab. Asahan dengan Kab. Labuhanbatu Utara	Permendagri No. 42 Tahun 2014
4	Kab. Asahan dengan Kab. Toba Samosir	Permendagri No. 44 Tahun 2014
5	Kab. Langkat dengan Kota Binjai	Permendagri No. 47 Tahun 2014
6	Kab. Deli Serdang dengan Kota Binjai	Permendagri No. 47 Tahun 2014

No	Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota	Keterangan
7	Kab. Langkat dengan Kab. Deli Serdang	Permendagri No. 49 Tahun 2014
8	Kab. Asahan dengan Kab. Simalungun	Permendagri No. 23 Tahun 2015
9	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Tapanuli Tengah	Permendagri No. 77 Tahun 2016
10	Kab. Asahan dengan Tanjungbalai	Permendagri No. 78 Tahun 2016
11	Kab. Karo dengan Kab. Simalungun	Permendagri No. 79 Tahun 2016
12	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Tapanuli Utara	Permendagri No. 20 Tahun 2017
13	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Samosir	Permendagri No. 21 Tahun 2017
14	Kab. Humbang Hasundutan dengan Kab. Pakpak Bharat	Permendagri No. 27 Tahun 2017
15	Kab. Langkat dengan Kab. Karo	Permendagri No. 27 Tahun 2017
16	Kab. Pakpak Barat dengan Kab. Tapteng	Permendagri No. 24 Tahun 2019
17	Kab. Batu Bara dengan Kab. Sergai	Permendagri No. 26 Tahun 2019
18	Kab. Dairi dengan Kab. Karo	Permendagri No. 27 Tahun 2019
19	Kab. Dairi dengan Kab. Pakpak Bharat	Permendagri No. 28 Tahun 2019
20	Kab. Simalungun dengan Kab. Batu Bara	Permendagri No. 29 Tahun 2019
21	Kab. Tapanuli Selatan dengan Kota Padangsidimpuan	Permendagri No. 64 Tahun 2019
22	Kab. Mandailing Natal dengan Kab. Palas	Permendagri No. 68 Tahun 2019
23	Kab. Langkat dengan Kab. Karo	Permendagri No. 23 Tahun 2019

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

Tabel 6.3
Segmen Batas Kabupaten/Kota yang Dalam Proses Permendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Padang Lawas dengan Kab. Tapanuli Selatan	Dalam proses Biro Hukum Kemendagri
2	Kota Padangsidimpuan dengan kab. Tapanuli Selatan	Dalam proses Biro Hukum Kemendagri
3	Kab. Padang Lawas Utara dengan Kab. Tapanuli Selatan	Dalam proses Biro Hukum Kemendagri

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

Tabel 6.4
Segmen Batas Kabupaten/Kota yang Telah Diajukan ke Kemendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Tapanuli Utara dengan Kab. Toba Samosir	Diajukan
2	Kota Tapanuli utara dengan kab. Tapanuli Tengah	Diajukan
3	Kab. Tapanuli Utara Utara dengan Kab. Labuhanbatu Utara	Diajukan

Tabel 6.5
Segmen Batas Kabupaten/Kota yang Telah Diusulkan Pemprovsu ke
Kemendagri

No	Segmen batas antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Karo dengan Kab. Deli Serdang	Diusulkan
2	Kota Samosir dengan Kab. Dairi	Diusulkan
3	Kab. Samosir dengan Kab. Pakpak Barat	Diusulkan

Tabel 6.6
Segmen batas Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara yang Belum Selesai

No	Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota	Keterangan
1	Kab. Labuhanbatu dengan Kab. Padang lawas	Dalam tahap fasilitasi
2	Kab. Tapanuli Tengah dengan Kab. Sibolga	-
3	Kab. Mandailing Natal dengan Kab. Tapanuli Selatan	-
4	Kab. Labuhanbatu Selatan Padang Lawas Utara	-
5	Kab. Labuhanbatu Selatan Padang Lawas	-
6	Kab. Tapanuli Selatan dengan Kab. Tapanuli Utara	-
7	Kab. Labuhanbatu Selatan dengan Kab. Labuhanbatu	-
8	Kab. Serdang Bedagai dengan Kota Tebing Tinggi	-
9	Kab. Toba Samosir dengan Kab. Labuhanbatu Utara	-
10	Kab. Simalungun dengan Kab. Serdang Bedagai	-
11	Kab. Simalungun dengan Kab. Toba Samosir	-
12	Kab. Labuhanbatu dengan Kab. Labuhanbatu Utara.	-
13	Kab. Nias Barat dengan Kab. Nias Selatan	-
14	Kab. Nias Barat dengan Kab. Nias Utara	-
15	Kab. Nias dengan Kab. Nias Utara	-
16	Kab. Nias dengan Kota Gunung Sitoli	-

No	Segmen Batas Antar Kabupaten/Kota	Keterangan
17	Kab. Nias Utara dengan Kota Gunung Sitoli	-
18	Kab. Nias dengan Kab. Nias Barat	-
19	Kab. Nias dengan Kab. Nias Selatan	-
20	Kab. Tapanuli Selatan dengan Kab. Tapanuli Tengah	-
21	Kab. Simalungun dengan Kota Pematangsiantar	-
22	Kab. Simalungun dengan Kab. Deli Serdang	-
23	Kab. Labuhanbatu Utara dengan Kab. Padang Lawas	-
24	Kota Medan dengan Kab. Deli Serdang	-

Sumber : Biro Pemerintahan Setdaprovsu

2.2 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau

Dalam Penegasan Penyelesaian Segmen Batas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/611/BAK Tanggal 6 Februari 2020 telah selesai.

2.3 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat

Dalam Penegasan Penyelesaian Segmen Batas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Sumatera Barat dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/611/BAK tanggal 6 Februari 2020 telah selesai.

2.4 Batas Antara Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh

Dalam Penegasan Penyelesaian Segmen Batas Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh dalam Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri No. 135/611/BAK Tanggal 6 Februari 2020 ada pada tahap Penegasan Pusat (selesai, dalam proses Permendagri).

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Terdapat konflik tanah masyarakat di daerah perbatasan.
- 2) Terlalu terlibatnya tokoh adat dan sejarah, sehingga penetapan lokasi pilar semakin lama.
- 3) Masih sulitnya kabupaten/kota dan provinsi yang berbatasan dalam mencapai suatu kesepakatan.
- 4) Adanya perebutan hak pengelolaan terhadap sumberdaya alam yang ada di daerah yang berbatasan.
- 5) Kurangnya pemahaman dari masing Pemerintah Daerah tentang pentingnya penegasan batas daerah (belum terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pilar/tapal batas antar kabupaten/kota dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran)
- 6) Kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, khususnya pada Pemerintah Daerah yang berkompeten terutama di bidang pemetaan untuk mendukung penyelesaian penegasan batas daerah.
- 7) Kurangnya dukungan anggaran baik di Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat untuk kegiatan penegasan batas daerah.

Solusi :

- 1) Perlu adanya kesadaran baik dari Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat bahwa penataan batas daerah sangat penting dan memiliki arti strategis.
- 2) Penerbitan Surat Edaran Mendagri No. 125.4/3618/SJ dan Surat Edaran No. 125.4/3619/SJ tanggal 11 Agustus 2017 tentang Sinergi Program dan Kegiatan Bidang Pembakuan Nama Rupabumi dan Penegasan Batas Daerah TA. 2018 untuk mendorong pengangggaran di tingkat Pemerintah Daerah.

- 3) Optimalisasi peran para gubernur untuk memfasilitasi penyelesaian batas daerah di wilayah provinsi masing-masing.
- 4) Sinkronisasi kegiatan penegasan batas di daerah dan pusat.

E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

1. Bencana Yang Terjadi dan Penanggulangannya

1.1 Bencana Yang Terjadi

Kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik terutama geologis dan topografis yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Bencana yang terjadi di wilayah Sumatera Utara pada tahun 2019 merupakan bencana alam yang meliputi : Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Gelombang Ekstrem, Kegagalan Teknologi, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Banjir Bandang, Epidemi dan Wadah Penyakit. Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni Bencana Kebakaran Permukiman.

Pada tahun 2019 Gunung Sinabung kembali meletus dengan mengeluarkan awan panas. Awan panas ini menyelimuti Desa Gamber, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo.

Bencana Banjir sebanyak 16 kasus juga dialami di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu wilayah, Kota Medan, Tebing Tinggi, Padangsidimpuan, Kabupaten Langkat, Asahan, Batu Bara, Padang Lawas Utara, Mandailing Natal dan Nias.

Bencana Angin Puting Beliung sebanyak 35 kasus pada tahun 2019 melanda di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara yaitu : Kota Medan, Binjai, Sibolga, Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, Labuhanbatu Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Dairi dan Batu Bara.

Bencana Kebakaran Lahan sebanyak 190 kasus terjadi pada daerah Kota Medan, Binjai, Tebing Tinggi, Sibolga, Kabupaten Langkat, Karo, Simalungun, Deli Serdang, Asahan, Dairi, Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Samosir, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan.

Bencana Tanah Longsor sebanyak 28 kasus juga menimpa beberapa daerah di Provinsi Sumatera Utara yaitu : Kota Padangsidimpuan, Medan, Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Simalungun, Dairi, Mandailing Natal, Samosir, Labuhanbatu Selatan, Langkat dan Batu Bara.

Bencana Gempa Bumi sebanyak 189 kasus terjadi di Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba Samosir, Kab, Humbang Hasundutan, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Humbang

Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kota Sibolga, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Utara.

Bencana Kekeringan sebanyak 1 kasus juga melanda di dua kabupaten/kota pada tahun 2016 yaitu Kabupaten Langkat. Bencana Banjir Bandang sebanyak 10 kasus terjadi di Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Karo, Kabupaten Samosir dan Kab Batu Bara. Bencana Gunung Api Sebanyak 18 Kasus di Kabupaten Karo. Bencana Gelombang Ekstrem sebanyak 59 kasus di Kota Sibolga, Kabupaten Nias, Pantai Barat dan Pantai Timur. Bencana Kegagalan Teknologi sebanyak 1 kasus di Kabupaten Langkat.

1.2 Penanggulangannya

Dalam pelaksanaan penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara, adapun langkah-langkah yang telah ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah :

- 1) Melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana kepada masyarakat;
- 2) Melaksanakan bimbingan teknis/pelatihan-pelatihan kebencanaan kepada apratur desa dan kecamatan rawan bencana di Sumatera Utara;
- 3) Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, dalam mengupayakan penanggulangan bencana;
- 4) Melakukan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah rawan bencana;
- 5) Menyalurkan bantuan logistik kepada Korban bencana;

- 6) Melakukan penguatan terhadap desa-desa daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana dengan pelatihan dan pengembangan desa tangguh bencana;
- 7) Menyiapkan Tim Reaksi Cepat (satuan tugas) dalam penanggulangan bencana di Provinsi Sumatera Utara;
- 8) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

2. Sumber dan Jumlah Anggaran

2.1 Sumber Anggaran

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 30.347.545.612,- dalam bentuk kegiatan seperti :

2.2 Jumlah Anggaran

Pada tahun 2019 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui BPBD Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan bencana sebesar Rp. 30.347.545.612,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 25.852.528.957,-.

3. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana

Menghadapi kemungkinan terjadinya bencana telah dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan sektor terkait Penanggulangan Bencana dalam mengupayakan pencegahan bencana serta upaya-upaya dalam penanganan bencana.

- 2) Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang penanggulangan bencana kepada masyarakat terutama pada wilayah potensi bencana.
- 3) Melaksanakan monitoring daerah potensi bencana terutama pada daerah-daerah yang sering terkena bencana.
- 4) Melakukan pendataan hasil dari laporan masyarakat yang terkena bencana sebagai rujukan upaya pencegahan selanjutnya.
- 5) Persediaan stock logistik.
- 6) Penyiapan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (Satgas).
- 7) Melaporkan kejadian-kejadian bencana ke tingkat Pusat (BNPB) di Jakarta.

4. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi

Sampai dengan tahun 2019 perkiraan potensi bencana masih sering terjadi di sebahagian besar wilayah Sumatera Utara. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa kawasan rawan bencana merupakan wilayah dengan kondisi fisik (terutama geologis dan topografis) yang sangat memungkinkan terjadinya bencana alam. Potensi bencana yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Utara berupa bencana alam yang meliputi : Gunung Api, Gempa Bumi, Banjir, Tsunami, Epidemi dan Wabah Penyakit, Kegagalan Teknologi, Tanah Longsor, Angin Puting Beliung, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Gelombang Ekstrem dan Banjir Bandang. Selain terjadinya bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera Utara juga terjadi bencana non alam yakni Bencana Kebakaran Permukiman.

F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS

Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2012 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei telah menetapkan Kawasan Sei Mangkei sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang diajukan oleh PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) sekaligus menjadikan Kawasan Ekonomi Khusus pertama di Indonesia, terletak di Wilayah Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara hal ini didorong dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di Wilayah Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Selain itu, sebagai amanat peraturan tersebut, PT.Perkebunan Nusantara III telah membentuk anak perusahaan yaitu PT. Kawasan Industri Nusantara (PT. Kinra) sebagai pengelola KEK Sei Mangkei.

Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu, yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus disebutkan pada Pasal 2 bahwa fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi :

- 1) Perpajakan, kepabeanan dan cukai;
- 2) Lalu lintas barang;
- 3) Ketenagakerjaan;
- 4) Keimigrasian;
- 5) Pertanahan;
- 6) Perizinan dan Non Perizinan.

Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei berlokasi di Kabupaten Simalungun, dengan total areal seluas 1.933,82 Ha, dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang resmi beroperasi pada tanggal 27 Januari 2015. Untuk mendukung pembangunan di KEK Sei Mangkei, maka diformulasikan kawasan pengembangan yang kemudian dikenal dengan Kawasan Pengembangan Sei Mangkei, yang mencakup area KEK itu sendiri sebagai wilayah inti dan lingkungan sekitarnya sebagai area yang terpengaruh. Kegiatan utama KEK Sei Mangkei mencakup industri pengolahan kelapa sawit dan industri pengolahan karet.

KEK Sei Mangkei diresmikan operasionalnya oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada tanggal 27 Januari 2015 yang lalu, dan sebagai komitmen kelanjutan pembangunannya, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018.

Selain itu juga KEK Sei Mangkei membantu pemerintah dalam penyediaan lapangan pekerjaan untuk masyarakat, hingga saat ini sudah sebanyak 1.042 jumlah tenaga kerja yang terserap dimana 50% nya merupakan tenaga kerja di PT Unilever Oleochemical Indonesia (UOI) belum termasuk usaha mikro kecil yang ikut tumbuh seperti warung makan, ojek, jasa sewa rumah dan lain sebagainya. Dan diharapkan jika KEK Sei Mangkei telah full beroperasi, nilai investasi diprediksi bisa mencapai 134,1 triliun dan akan mampu menyerap \pm 83.304 tenaga kerja hingga tahun 2031.

Gambar 6.1
Profil Umum Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

	Penetapan : Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2012 Operasional: 27 01 2015	Lahan: <ul style="list-style-type: none"> • Luas Total KEK : 1933,8 Ha • Luas Tahap I Pembangunan: 104 Ha • Luas dikuasai : 1933,8 Ha • Sertifikasi/Status: HPL : 1933,8 Ha • Utilisasi (oleh Tenant) : 15,8Ha 	
	Lokasi : Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara	Rencana Investasi (Perenc s/d Thn 2031) : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kawasan: Rp 5,14 Triliun • Investasi pelaku usaha: Rp 129 Triliun Rencana Investasi (Tahap IIs/d Thn 2025) : <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan kawasan: Rp 2,5 Triliun • Investasi pelaku usaha: Rp 65 Triliun 	
	Pengusul : PT Perkebunan Nusantara III	Penyerapan Tenaga Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Proyeksi s/d Thn .2031 = 83.304 Orang • Realisasi s/d Thn 2018 = 1.672 Orang 	
	Kegiatan Utama : Pembangunan & Pengelolaan Kawasan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Industri Pengolahan Karet Logistik dan Pariwisata Penyediaan Infrastruktur Kawasan	Proyeksi Dampak Perekonomian: Perencanaan s/d Tahun 2031: Sumbangan <i>devisa</i> Rp 92,1Triliun/tahun & peningkatan <i>PDB</i> (Kab/Prov) menjadi Rp_____ Triliun pada Tahun 2031 (saat beroperasi penuh)	

Sumber : PT. Kinra, diolah oleh Bappeda Provsu

Rencana pengembangan KEK Sei Mangkei sebagaimana terlihat pada gambar diatas, diadopsi dari Rencana Strategis Kementerian Perindustrian, terbagi dalam 3 tahapan, yaitu pengembangan Tahap I (tahun 2011-2015) didukung dengan pembangunan infrastruktur didalam dan luar kawasan; Tahap II (Tahun 2016-2020) pengembangan didukung denga sarana dan prasaran pengembangan infrastruktur didalam dan diluar Kawasan yang terintegrasi; dan Tahap III (Tahun 2021-2031) yang didukung dengan kelengkapan sarana prasarana infrastruktur terintegrasi untuk melayani operasional KEK Sei Mangkei.

Gambar 6.2
Rencana Pengembangan KEK Sei Mangkei 2011 – 2031



Diadaptasi dari Rencana Strategis Pengembangan KEK Sei Mangkei, Kementerian Perindustrian, 2011.

Sumber : PT. Kinra, diolah oleh Bappeda Provsu

Tabel berikut adalah progress penggunaan lahan di dalam KEK Sei Mangkei, yang hingga tahun 2018 sudah terpakai sebesar 14,63 persen dari total luas lahan seluas 1.933,80 Hektar lahan yang dimiliki KEK Sei Mangkei.

Tabel 6.7
Penggunaan Lahan di KEK Sei Mangkei Sampai Dengan Tahun 2018

No	Penggunaan Lahan di KEK Sei Mangkei	Kegiatan/Usaha	Luas (Ha)
1	PT Unilever Oleochemical Indonesia	Oleochemical Industries	27,28
2	PT PLN (Persero)	Gardu Induk 150 KV, 60 MVA	14,20
3	PT Pertamina Gas	Metering Gas Station	1,00
4	Kementerian Perindustrian	Gedung Pusat Inovasi	1,02
5	PTPN III (Persero)	Palm Oil Mill	13,40
6	PTPN III (Persero)	Palm Kernel Oil Mill	3,26
7	PTPN III (Persero)	PLTBm 2 x 3,5 MW	5,00

No	Penggunaan Lahan di KEK Sei Mangkei	Kegiatan/Usaha	Luas (Ha)
8	PTPN III (Persero)	Kantor Kawasan	6,40
9	PTPN III (Persero)	Perumahan Karyawan, Mess	45,01
10	PTPN III (Persero)	Jalan ROW 43	4,09
11	PTPN III (Persero)	Jalan ROW 28	3,36
12	PTPN III (Persero)	Saluran Drainase	6,45
13	Kementerian Perindustrian (PMN)	Tank Farm	9,03
14	Kementerian Perindustrian (PMN)	Dry Port	15,00
15	Kementerian Perindustrian (PMN)	Jalur Kereta Api	6,00
16	Kementerian Perindustrian (PMN)	Jalan Poros ROW 62	22,00
17	PT. Industri Nabati Lestari	Pabrik Minyak Goreng 600.000 MTPY	7,50
18	PTPN III (Persero), PT Pertamina (Persero), dan International Partner (Posco Energy)(Rencana)	IPP PLTG 250 MW	20,00
19	PTPN III (Persero) dan PT Pertamina (Persero)	PLTBg Kap. 2,11 MW	2,00
20	PT Alternative Protein Indonesia	Pengembangan Alternatif Protein	71,00
TOTAL AREAL TERPAKAI (Ha)			283,00

Sumber : PT. Kinra, diolah oleh Bappeda Provsu

KEK Sei Mangkei didukung dengan infrastruktur di dalam dan luar kawasan. Akses dari KEK Sei Mangkei ke jalan lintas Sumatera kurang lebih 10 km, jarak ke Pelabuhan Kuala Tanjung kurang lebih 40 km dan jarak ke Bandara Internasional Kualanamu kurang lebih 110 km yang segera didukung dengan jalan tol dan kereta api. Ketersediaan infrastruktur di dalam Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang telah rampung saat ini adalah :

- 1) Total pembangunan jalan beton yang telah dibangun pada tahun 2018 adalah 7.004 m dan pembangunan lanjutan di 2019 \pm 600 m serta diproyeksikan bertambah pada tahun 2020 sebesar \pm 2.829 m;
- 2) Jaringan Telekomunikasi dan IT (Fiber Optic) pada tahun 2019 bertambah \pm 1,5 Km;

- 3) Gardu distribusi listrik kapasitas 150 KV / 60 MVA dan telah digunakan sebesar 7 MVA dengan tarif Rp.1551/kWh;
- 4) *Dry Port* kapasitas 2300 TEUs dan telah digunakan sebesar 200 TEUs;
- 5) Tank Farm yang dibangun 2x3000 ton CPKO dan 5x5000 ton CPO;
- 6) Fasilitas pengolahan limbah yang telah dibangun saat ini \pm 250 m³/jam dan telah digunakan sebesar 20 m³/jam dengan tarif Rp. 6425/m³;
- 7) Fasilitas air bersih yang telah dibangun saat ini \pm 250 m³/jam dan telah digunakan sebesar 125 m³/jam dengan tarif Rp. 7500/m³;
- 8) Fasilitas pipa gas dengan kapasitas 75 MMSCFD dan telah digunakan sebesar 4MMSCFD;

Selain infrastruktur di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei terdapat pula ketersediaan infrastruktur di luar Kawasan yang meliputi :

- 1) Stasiun kereta api yang terdiri dari : Stasiun Kereta Api Perlanaan \pm 7,6km dari KEK Sei Mangkei;
- 2) Jalan Tol Sumatera meliputi : tol Medan – T. Tinggi, tol T. Tinggi – Kisaran dan tol T. Tinggi – P. Siantar (*on progress*);
- 3) Bandara Internasional Kuala Namu yang berjarak \pm 106 Km dari KEK Sei Mangkei;
- 4) Pelabuhan Kuala Tanjung 400.000 TEUs Kontainer dan 3.5 Juta curah cair yang berjarak \pm 40 Km dari KEK Sei Mangkei;
- 5) Pemprovsu juga saat ini sedang membangun Rusunawa di seputaran KEK Sei Mangkei secara bertahap dengan lahan seluas \pm 8 Ha dan saat ini lahan yang sudah bebas seluas 2 Ha;
- 6) Pemprovsu juga sedang menjajaki pembangunan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) untuk memenuhi kebutuhan KEK Sei Mangkei.

Hingga akhir 2019, aliran investasi pelaku usaha untuk aktivitas industri di KEK Sei Mangkei telah mencapai ± Rp. 10 triliun termasuk tanah dan bangunan serta seluruh fasilitas di dalam KEK Sei Mangkei (jaringan jalan, listrik dan telekomunikasi, gas, dryport dsb). Direncanakan aliran investasi pelaku usaha pada akhir 2025 akan mencapai Rp 65 triliun dan saat beroperasi penuh di tahun 2031, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp. 129 triliun serta memberikan kontribusi pada PDRB sebesar Rp 92,1 triliun per tahun untuk Sumatera Utara.

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Data potensi konflik yang ada di Sumatera Utara tahun 2019 sesuai data yang dimiliki kerjasama dengan Polda Sumatera Utara terdiri atas konflik berbasis politik, ekonomi, sosial budaya, sara, batas wilayah dan sumber daya alam. Adapun yang tercatat di tahun 2019 ada 373 jumlah potensi konflik yang ada dan selesai sebanyak 50 potensi konflik sedangkan masih ada 323 potensi konflik yang belum selesai. Adapun rincian potensi konflik tersebut dari aspek :

- 1) Politik sebanyak 31 potensi konflik;
- 2) Ekonomi sebanyak 169 potensi konflik;
- 3) Sosbud sebanyak 111 potensi konflik;
- 4) Sara sebanyak 10 potensi konflik;
- 5) Batas wilayah 6 potensi konflik;
- 6) Sumber daya alam 27 potensi konflik.

1. Gangguan yang Terjadi

Gangguan yang terjadi (konflik berbasisi SARA, Anarkisme, Separatisme, atau lainnya) yang tercatat dalam data Satpol PP Provsu :

- 1) Gangguan yang berbasis SARA : Tidak Ada
- 2) Gangguan yang berbasis Anarkisme : Tidak Ada
- 3) Gangguan yang berbasis Separatisme : Tidak Ada
- 4) Jumlah unjuk rasa di Kantor Gubsu pada tahun 2019 sebanyak 83 kali, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 15 kali dari tahun 2018, dimana pada tahun 2018, unjuk rasa terjadi sebanyak 98 kali.

2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani

Organisasi Perangkat Daerah yang menangani penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provsu.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

Tabel 6.8
Data PNS Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

No	Perangkat Daerah	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Satuan Polisi Pamong Praja Provsu	S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD	- 5 Orang 29 Orang 2 Orang 30 Orang 1 Orang 1 Orang	Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c) Pembina TK I (IV/b) Pembina (IV/a) Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda TK I (III/b) Penata Muda (III/a) Pengatur TK I (II/d) Pengatur (II/c) Pengatur Muda TK I (II/b) Pengatur Muda (II/a)	- 1 Orang 5 Orang - 11 Orang 6 Orang 10 Orang 6 Orang 2 Orang 26 Orang 2 Orang 1 Orang
Jumlah					

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

4. Penanggulangan dan Kendalanya

4.1 Penanggulangan

- 1) Meningkatkan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kemendagri, Satpol PP Kabupaten/Kota, OPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi terkait dan aparat keamanan.
- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) anggota Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dan Tenaga Bantu (Banpol) Polisi Pamong Praja melalui Pembinaan dalam Satuan (Pembinaan Fisik dan Mental) secara berkala dan berkesinambungan.
- 3) Mengadakan sarana dan prasarana pendukung Satpol PP Provsu berupa 2 truk dalmas (pengendali massa).
- 4) Mengupayakan peningkatan pendanaan program/kegiatan Satpol PP Provsu.

4.2 Kendala

- 1) Kendala di lapangan
Terbatasnya jumlah aparat Satpol PP Provsu sebagai unsur penegak Perda/Perkada, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, khususnya dalam menangani unjuk rasa, sehingga perlu pendampingan dengan aparat keamanan.
- 2) Kurangnya partisipasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menerima dan mengakomodir aspirasi unjuk rasa, sehingga menimbulkan suasana yang kurang kondusif di kalangan pengunjuk rasa.

5. Keikutsertaan aparat keamanan dan penanggulangannya

Unjuk rasa yang terjadi di Kantor Gubernur Sumatera Utara cenderung berjalan aman, kondusif dan terkendali, hal ini dikarenakan pola pengamanan dan penanganan unjuk rasa dilakukan secara bersama-sama antara Pemprovsu, dalam hal ini Satpol PP Provsu, instansi terkait dan aparat pengamanan, baik dari kepolisian maupun TNI.

Penanggulangan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Meminta izin yang dikeluarkan oleh Kepolisian atau instansi terkait lainnya;
- 2) Meminta statement;
- 3) Meminta petunjuk Pimpinan OPD terkait yang dapat menerima unjuk rasa;
- 4) Berkoordinasi dengan OPD terkait dalam menerima unjuk rasa;
- 5) Menerima perwakilan pengunjuk rasa bersama OPD terkait atau menerima langsung unjuk rasa di halaman kantor Gusbu;
- 6) Memfasilitasi delegasi (utusan) pengunjuk rasa dengan pejabat/OPD terkait;
- 7) Mengawal dan mengamankan jalannya aksi unjuk rasa di kantor Gusbu;
- 8) Pengamanan asset/gedung kantor Gusbu/kendaraan dinas/tamu/PNS serta kenyamanan di lingkungan Kantor Gusbu.

6. Sumber dan Jumlah Anggaran Penanganan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Sumber anggaran untuk penanganan ketenteraman dan ketertiban umum berasal dari APBD Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 27.241.181.781,- dan realisasi sebesar Rp. 24.782.994.846 ,- atau 90,98%.

BAB VII

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

A. BIDANG PENDIDIKAN

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.1
Target dan Realisasi SPM Bidang Pendidikan

1	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Penduduk Yang Mendapatkan Pelayanan Pendidikan	Capaian
1	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara Usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	71,49%	797.800 Org	643.137 Org	80,61%
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara Usia 4 – 18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan Khusus.		18.521 Org	5.110 Org	27,59%

Sumber : Dinas Pendidikan Provsu

2. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp. 1.168.838.213.757,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.113.576.286.272,- atau 95,27%.

3. Dukungan Personil

Dukungan personil untuk pencapaian SPM Bidang Pendidikan sebanyak 17.929 orang.

B. BIDANG KESEHATAN

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.2
Target dan Realisasi SPM Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	977.949 Org	97.949 Org	100%
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah Warga Negara pada kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	483.434 Org	483.434 Org	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Provsu

2. Alokasi Anggaran

Dalam mendukung kegiatan penyelidikan epidemiologi pada Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Krisis Kesehatan pada tahun 2019 dialokasikan anggaran bersumber dana APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2019 sebesar Rp. 332.120.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 177.788.000,- atau 53,53%.

3. Dukungan Personil

Untuk pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi maka Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara memiliki 2 tim yang berperan ketika terjadi bencana.

Saat ini Pusat Krisis Kesehatan memiliki paradigma penguatan kapasitas SDM local (*Local Capacity*) maksudnya adalah bagaimana merespon kejadian dengan cepat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tepat. Berikut adalah sarana dan prasarana yang tersedia di Pusat Krisis Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara :

- 1) Mobil Klinik untuk pelayanan kesehatan di lapangan;
- 2) Mobil Ambulance dengan spesifikasi 4 x 4 (Four Wheel);
- 3) Perahu karet dengan mesin 20 Pk;
- 4) Buffer stock obat dari Provinsi;
- 5) Genset dengan kapasitas 35 kVA;
- 6) Valbed untuk pelayanan kesehatan.

Selanjutnya untuk pelayanan kesehatan terkait penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB tersedia dukungan personil berupa tenaga kesehatan di seluruh kabupaten/kota meliputi dokter,

paramedis, dan analisis laboratorium yang ada di fasyankes yaitu puskesmas dan rumah sakit serta tenaga epidemiolog/ surveilans, sanitarian dan lainnya di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara serta kabupaten/kota yang tergabung dalam Tim Gerak Cepat (TGC) di masing masing kabupaten/kota.

Untuk rumah sakit rujukan dalam perawatan penderita tersedia di rumah sakit umum daerah yang tersebar di kabupaten/kota dan untuk kasus tertentu perawatan penderita kejadian luar biasa juga dilakukan di RSUP.Haji Adam Malik Medan. Dalam hal pengujian sampel, tersedia UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai laboratorium rujukan untuk provinsi serta bila diperlukan akan dikirimkan ke laboratorium rujukan nasional yaitu BBTCL PP Jakarta serta Litbangkes Kemenkes RI.

4. Permasalahan dan Solusi

- 1) Keterbatasan anggaran baik dalam hal penyelidikan epidemiologi, penanggulangan kejadian serta dana khusus untuk perawatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan/rumah sakit.
- 2) Informasi kejadian bencana di Kab/Kota tidak diperoleh dengan cepat di Provinsi, tapi dapat diatasi dengan memperoleh informasinya dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan, Jakarta.
- 3) Masih minimnya pelatihan terkait penyelidikan epidemiologi dan penanggulangan KLB.
- 4) Kemampuan tenaga kesehatan untuk mendeteksi sinyal kejadian luar biasa serta keterlambatan mengirimkan laporan/informasi bilamana terjadi kejadian luar biasa.
- 5) Keterbatasan SDM yang terlatih sebagai Tim Gerak Cepat KLB.

- 6) Kejadian bencana sering terjadi pada hari libur sehingga untuk dukungan bantuan buffer stock obat tidak dapat dibawa pada waktu memberangkatkan tim kesehatan ke kabupaten/kota.

C. BIDANG PEKERJAAN UMUM

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.3
Target dan Realisasi SPM Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kab/kota	100%	3.727.493	2.474.690	66,39%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kab/kota	100%	300.000	100.700	33,57%

Sumber : Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provsu

D. BIDANG PERUMAHAN RAKYAT

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.4
Target dan Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Orang Yang Berhak Mendapat Layanan	Jumlah Orang Yang Terlayani	Capaian
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	26	26	26	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0	-

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman

Uraian antara penetapan target dan realisasi yang didapatkan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.

Indikator ini dilakukan dengan Pembangunan Rumah Baru bagi korban bencana Banjir dan Longsor di Kecamatan Ulu Pungkut Kabupaten Mandailing Natal. Rumah yang dibangun sejumlah 26 Unit. Jumlah rumah sesuai dengan Proposal dan Peraturan Bupati

tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Mandailing Natal.

- 2) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Indikator ini belum dilakukan karena tidak terdata masyarakat yang harus difasilitasi.

2. Alokasi Anggaran

Alokasi yang khusus langsung pelaksanaan target SPM adalah sebesar Rp. 3.737.636.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 3.454.786.850,- atau 92,43%.

3. Dukungan Personil

Jumlah sumber daya aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebanyak 113 orang yang dibagi atas personil yang menduduki eselon dan staf, dimana PNS yang memiliki eselon terdiri atas 18 orang dan 95 orang staf. Personil yang langsung melaksanakan kegiatan SPM adalah personil Bidang Rumah Umum yang berjumlah 15 orang.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

Masalah atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran antara lain belum adanya lahan untuk melaksanakan pembangunan, sehingga banyak kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau membutuhkan tambahan waktu dalam pengerjaan.

Solusi :

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk pencapaian sasaran SPM.

E. BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.5

Target dan Realisasi SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Yang Berhak Mendapat Layanan	Yang Terlayani	Capaian
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum Provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi	100%	12.982.204 Org	12.982.204 Org	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provsu

2. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2019 sebesar Rp. 27.241.181.781,- dengan realisasi sebesar Rp. 24.782.994.846,- atau 90,98%.

3. Dukungan Personil

Dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Utara didukung oleh 68 ASN Satuan Polisi Pamong Praja Provsu.

4. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- 1) Belum terintegrasinya penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Sumatera Utara.
- 2) Belum intensifnya koordinasi OPD dalam penerapan SPM.
- 3) Kurangnya kuantitas dan kualitas personil dalam pelaksanaan SPM.
- 4) Minimnya sarana dan prasarana dalam mendukung penerapan SPM.

Solusi :

- 1) Mengintegrasikan program/kegiatan lintas perangkat daerah dalam penerapan SPM.
- 2) Akan melaksanakan rapat secara rutin dengan lintas perangkat daerah dalam penerapan SPM.
- 3) Akan mengirim pegawai mengikuti sosialisasi, bimtek dan sejenisnya yang berkaitan dengan SPM.
- 4) Akan mengusulkan peningkatan sarana dan prasarana penerapan SPM.

F. BIDANG SOSIAL

1. Target dan Realisasi SPM

Tabel 7.6
Target dan Realisasi SPM Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Pencapaian SPM	Yang Berhak Mendapat Layanan	Yang Terlayani	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantardidalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yg memperoleh rehabilitasi sosial di dalam panti	1.167	39.024 Org	1.293 Org	3,31%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di dalam panti	630	14.931 Org	377 Org	2,52%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlanter di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlanter yang memperoleh rehabilitasi sosial di dalam panti	293	80.591 Org	296 Org	0,36%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yg memperoleh rehabilitasi sosialdasar tuna sosial di dalam panti	255	3.966 Org	255 Org	6,42%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	2.000	4.974 Org	2.000 Org	40,2%

Sumber : Dinas Sosial Provsu

2. Alokasi Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial pada tahun 2019 sebesar Rp. 18.175.168.725,- dengan realisasi sebesar Rp. 16.836.966.184,- atau 92,63%.

3. Dukungan Personil

Dukungan personil sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1) ASN | : 421 Orang |
| 2) Pekerja Sosial | : 28 Orang |
| 3) Tenaga Medis | : 40 Orang |
| 4) Juru Masak | : 36 Orang |
| 5) Tukang Cuci | : 9 Orang |
| 6) Tenaga Keamanan | : 41 Orang |
| 7) Petugas Kebersihan | : 60 Orang |

BAB VIII

AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun 2019.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerjanya (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang (*performance improvement*).

Tabel 8.1
Pencapaian Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1	≥ 80	Sangat Baik
2	60 – 79,9	Baik
3	50 – 59,9	Sedang
4	0 – 49,9	Kurang

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 8.2
Capaian Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
I	Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09
2	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,16
3	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98
4	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100,29
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100
7	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,18	5,11	96,42
8	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29
9	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52
10	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04
	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21
11	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61
12	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60
13	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08
II	Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
	yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
1	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah - Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Opini Predikat	WT P B	- B	100
2	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127
III Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100
IV Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					
1	- Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131
	- Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,87	90,93	100,07
V Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab					
1	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,00	68,2	97,65
	- Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145	100
	- Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.067	492

B. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pengukuran kinerja sasaran strategis Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing –

masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD tahun 2019 – 2023 maupun RKPD tahun 2019.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/percepatan dan kegagalan/perlambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dan indikator kinerja utama (IKU) telah ditetapkan 20 sasaran strategis dengan 23 indikator kinerja (*outcome*) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.3
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 – 2023

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR
Sasaran 1	Meningkatnya kerukunan umat beragama	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama
Sasaran 2	Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan	1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Sasaran 3	Meningkatnya kesejahteraan petani	1	Nilai Tukar Petani (NTP)
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman	1	Rasio rumah layak huni
Sasaran 5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)
Sasaran 6	Menurunnya tingkat pengangguran	1	Tingkat pengangguran terbuka
Sasaran 7	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Pertumbuhan PDRB
Sasaran 8	Menurunnya angka kemiskinan	1	Persentase kemiskinan
Sasaran 9	Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan	1	Indeks Gini

SASARAN	URAIAN	JUMLAH	INDIKATOR
Sasaran 10	Meningkatnya infrastruktur dasar	2	- Tingkat kemantapan jalan Provinsi - Rasio Elektrifikasi
Sasaran 11	Terkendalnya inflasi	1	Inflasi
Sasaran 12	Terkendalnya Jumlah penduduk	1	Total Fertility Rate (TFR)
Sasaran 13	Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat	1	IPM
Sasaran 14	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas	2	- Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah - Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)
Sasaran 15	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	1	Persentase penegakan Perda
Sasaran 16	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Angka rata-rata lama sekolah
Sasaran 17	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan	1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat
Sasaran 18	Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	1	Indeks pembangunan gender
Sasaran 19	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	- Indeks kualitas lingkungan hidup - Indeks resiko bencana
Sasaran 20	Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

1. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019

Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019- 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 8.4
Pengukuran Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kerukunan umat beragama						
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan						
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,16	Sangat baik
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani						
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98	Sangat Baik
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman						
1	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46	Sangat Baik
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat						
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100,29	Sangat Baik
Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran						
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi						

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,18	5,11	96,42	Sangat Baik
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan						
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29	Sangat Baik
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan						
1	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52	Sangat Baik
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya infrastruktur dasar						
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04	Sangat Baik
Sasaran Strategis 11 : Terkendalinya inflasi						
1	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61	Sangat Baik
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21	Sangat Baik
Sasaran Strategis 12 : Terkendalinya Jumlah penduduk						
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60	Sangat Baik
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat						
1	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08	Sangat Baik
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas						
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	-		
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	100	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
1	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127	Sangat Baik
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berakarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan						

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2019		Capaian Kinerja (%)	Interpretasi
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100	Sangat Baik
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan						
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131	Sangat Baik
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan						
1	Indeks pembangunan gender	Poin	90,87	90,93	100,07	Sangat Baik
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab						
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	66	68,2	103,3	Sangat Baik
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,25		Tinggi
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata						
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.067	492	Sangat Baik

2. Penjelasan Capaian Kinerja Tahun 2019

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai sasaran strategis dan indikator kinerja utama akan dijelaskan berdasarkan capaian kinerja sesuai dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2019 – 2023.

Misi 1 :

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.

Misi I ini terdiri dari 13 Sasaran Strategis dan diukur melalui 16 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1:

Meningkatnya kerukunan umat beragama. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “baik”. Indikator dimaksud adalah :

Indeks Kerukunan Umat Beragama :

Survei untuk kerukunan umat beragama dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat) Kementerian Agama Republik Indonesia. Merujuk pada angka kerukunan umat beragama nasional (73,83) terdapat sejumlah provinsi yang berada di bawah rata-rata nasional. Indeks ini menarik beberapa rumusan, (salah satunya) adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing. Untuk provinsi Sumatera Utara skor indeks kerukunan umat beragama berada di atas rata-rata nasional yaitu 76,30 dengan kategori Baik.

Sasaran Strategis 2 :

Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*sangat baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Skor Pola Pangan Harapan (PPH) :

Pangan berperan sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Ketersediaan pangan yang cukup, seimbang, dan berkualitas akan meningkatkan kualitas hidup. Berbagai tantangan dan permasalahan harus dihadapi dan dipecahkan dalam melaksanakan pembangunan pangan. Kapasitas sumberdaya alam untuk memproduksi pangan akan semakin terbatas. Persaingan pemanfaatan sumberdaya lahan dan air untuk kegiatan sektor lain akan semakin tinggi. Beragamnya jenis pangan yang dikonsumsi dapat mempengaruhi konsumsi gizi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk mencukupi kebutuhan gizi, bahkan berbagai zat gizi tambahan lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan juga dapat diperoleh. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Indonesia diukur dengan menggunakan metode pengukuran Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola pangan harapan (PPH) Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 89,1 dan tahun 2019 meningkat menjadi 89,6 atau meningkat sebesar 0,56%. Peningkatan ini belum mencapai target yang ditetapkan, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk masih belum beragam, bergizi dan berimbang antar kelompok pangan yang menandakan konsumsi masyarakat terhadap kelompok bahan pangan masih belum bervariasi.

Sasaran Strategis 3 :

Nilai Tukar Petani (NTP). Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Nilai Tukar Petani (NTP) :

Nilai Tukar Petani (NTP) diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani yang juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan pemantauan harga-harga perdesaan di Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2019, NTP Provinsi Sumatera Utara mengalami kenaikan sebesar 0,18% dibanding November 2019, yaitu dari 98,91 menjadi 99,08. Terjadinya kenaikan NTP Desember 2019 disebabkan oleh naiknya NTP subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 1,86%, NTP subsektor Peternakan naik sebesar 0,02%, dan NTP subsektor perikanan naik sebesar 1,26%. Sedangkan NTP subsektor Tanaman Pangan turun sebesar 0,20% dan NTP sub sektor hortikultura turun sebesar 3,24%.

Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya kualitas hunian dan lingkungan kawasan permukiman. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Rasio Rumah Layak Huni :

Kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni juga menjadi tantangan sesuai dengan misi pembangunan Sumatera Utara periode 2019 – 2023 yaitu mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan. Kriteria rumah tangga layak huni menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dihitung melalui kriteria :

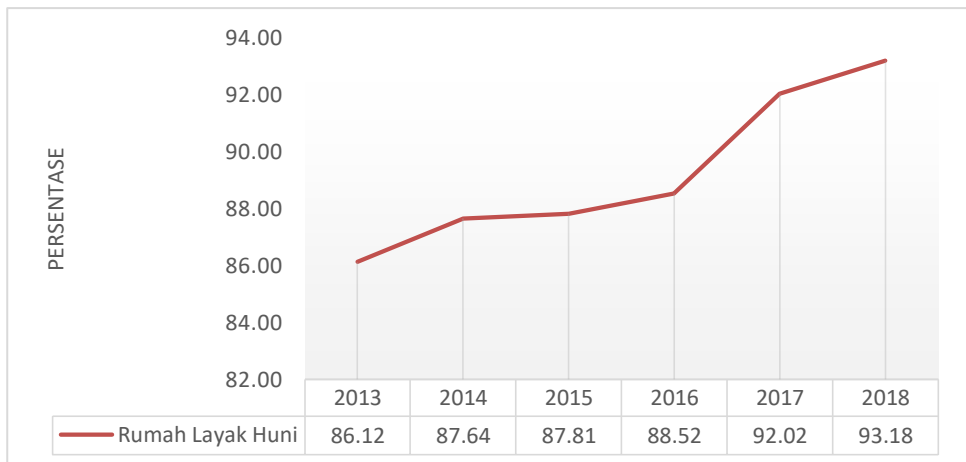
- 1) Luas lantai perkapita > 7,2 meter persegi;
- 2) Sumber air minum layak;

- 3) Sanitasi layak;
- 4) Sumber penerangan listrik;
- 5) Jenis atap bukan dari daun atau lainnya;
- 6) Jenis dinding bukan dari bambu atau lainnya;
- 7) Jenis lantai bukan lantai tanah.

Dari ketujuh kriteria diatas, rumah tangga yang memenuhi minimal 5 kriteria tersebut termasuk dalam kategori rumah tangga layak huni.

Dari catatan BPS sejak tahun 2013 hingga 2018 terlihat pertumbuhan rumah layak huni terus meningkat, dari 86,12 % tahun 2013 menjadi 93,18 % ditahun 2018. Artinya dari 3.332.796 rumah yang ada, masih terdapat sekitar 227.296 rumah yang membutuhkan penanganan agar menjadi rumah yang layak huni.

Gambar 8.1
Rumah Layak Huni



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Utara 2013-2018

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio rumah layak huni antara lain melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pendataan rehabilitasi rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten / kota, badan usaha dan pemerintah pusat. Rehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pembiayaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 dilaksanakan di Deli Serdang 110 unit, Langkat 110 unit, Padang Sidempuan 90 unit, Tapanuli Selatan 90 unit, Mandailing Natal 90 unit, Labuhan Batu 90 unit, Labuhanbatu Selatan 90 unit, Batubara 90 unit, Tapanuli Utara 90 unit dan Humbanghasundutan 90 unit.

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*sangat baik*”. Indikator dimaksud adalah:

Usia Harapan Hidup (UHH) :

UHH penduduk di Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dengan memperhitungkan trend kecenderungan peningkatan UHH kurun waktu 2010 – 2018 (9 tahun terakhir), dimana terjadi peningkatan usia harapan hidup penduduk sebesar 0,13 tahun setiap tahunnya, maka diperkirakan UHH Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 adalah 68,74 tahun. UHH ini merupakan data melalui perhitungan trend kecenderungan, kemungkinan terjadi perubahan UHH setelah hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) oleh BPS dirilis pada pertengahan tahun berjalan. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenasi) yang diterbitkan oleh BPS, terjadi peningkatan UHH penduduk Sumatera Utara dari tahun ke tahun yakni 68,61 tahun pada tahun 2018; 68,37 tahun pada tahun 2017; 68,29 tahun pada tahun 2016; 68,21 tahun

pada tahun 2015; 68,04 tahun pada tahun 2014 dan 67,46 tahun pada tahun 2010.

Sasaran Strategis 6 :

Menurunnya tingkat pengangguran. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Tingkat Pengangguran Terbuka :

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara menurun pada Februari 2019. Angka tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Utara turun 0,03 poin menjadi 5,56% pada Februari 2019. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sumatera Utara tahun 2018 sebesar 5,59%. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2019 sebanyak 7,45 juta orang, naik 224 ribu orang dibanding Februari 2018.

Sejalan dengan itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga naik 1,21 poin. Persentase lapangan pekerjaan utama penduduk bekerja yang mengalami peningkatan adalah Pertanian (1,51 poin), Penyediaan Akomodasi (1,14 poin) dan Transportasi (0,50 poin). Sedangkan yang mengalami penurunan pada Perdagangan (1,79 poin), Administrasi Pemerintahan (0,41 poin) dan Industri Pengolahan (0,35 poin).

Sasaran Strategis 7 :

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) :

Perekonomian Sumatera Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2019 mencapai Rp 204.398,35 milyar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 137.473,26 milyar.

Ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2019 terhadap triwulan III-2018 tumbuh 5,11 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 9,85 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen, dimana pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluarankonsumsi pemerintah (PK-P) sebesar 11,39%.

Ekonomi Sumatera Utara triwulan III-2019 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 3,06% (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 3,73%, sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi pada komponen impor barang dan jasa sebesar 15,33%.

Sasaran Strategis 8 :

Menurunnya angka kemiskinan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Persentase Kemiskinan

Angka kemiskinan Sumatera Utara mengalami penurunan sebesar 0,20 poin yaitu dari 8,83 persen pada Maret 2019 menjadi 8,63 persen pada September 2019. Angka kemiskinan ini setara dengan 1,26 juta jiwa pada September 2019, atau berkurang sekitar 22 ribu

jiwa dalam satu semester terakhir. Pada periode Maret 2019 – September 2019, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan peningkatan. P1 naik dari 1,371 pada Maret 2019 menjadi 1,480 pada September 2019, dan P2 naik dari 0,310 menjadi 0,372. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menurun dan semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin tinggi.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan pada bulan September 2019 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.260,50 ribu jiwa atau sebesar 8,63% terhadap total penduduk. Jumlah dan persentase penduduk miskin tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada bulan September 2018 setahun yang lalu, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.291,99 ribu jiwa atau sebesar 8,94%, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin dalam setahun sebesar 31,49 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,31 poin. Jika dibandingkan dengan keadaan semester lalu pada Maret 2019, dimana jumlah penduduk miskin sebanyak 1.282,04 ribu jiwa dengan persentase 8,83, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada September 2019 sebanyak 21,5 ribu jiwa dan penurunan persentase penduduk miskin sebesar 0,20 poin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2019 – September 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan pedesaan turun masing-masing sebanyak 10,3 ribu jiwa dan 11,3 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,56% menjadi 8,39%, dan di pedesaan turun dari 9,14% menjadi 8,93%.

Tabel 8.6
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Utara menurut Daerah
September 2018 – September 2019

Daerah	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Perkotaan		
September 2018	686,97	8,84
Maret 2019	675,74	8,56
September 2019	665,46	8,39
Perdesaan		
September 2018	605,02	9,05
Maret 2019	606,30	9,14
September 2019	595,04	8,93
Perkotaan + Perdesaan		
September 2018	1291,99	8,94
Maret 2019	1282,04	8,83
September 2019	1260,50	8,63

Sumber : diolah dari data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Sasaran Strategis 9 :

Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan dan pemerataan pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Indeks Gini

Pada Maret 2019, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Sumatera Utara yang diukur dengan Indeks Gini tercatat sebesar 0,317. Angka ini meningkat sebesar 0,006 poin jika dibandingkan dengan Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,311.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Indeks Gini. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Indeks Gini Sumatera Utara pada Maret 2018 tercatat sebesar 0,318 turun

menjadi 0,311 pada September 2018, dan mengalami peningkatan kembali menjadi 0,317 pada Maret 2019.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Indeks Gini di daerah perkotaan pada Maret 2019 tercatat sebesar 0,338. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibanding Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,330. Untuk daerah perdesaan Indeks Gini Maret 2019 tercatat sebesar 0,264. Angka ini meningkat sebesar 0,007 poin dibanding Indeks Gini September 2018 yang sebesar 0,257.

Sasaran Strategis 10 :

Meningkatnya infrastruktur dasar. Hasil pengukuran melalui 2 indikator kinerja dengan capaian "*Sangat Baik*". Indikator dimaksud adalah :

Tingkat kemantapan jalan Provinsi :

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara fokus meningkatkan kualitas infrastrukturnya mulai jalan, pelabuhan dan angkutan massal. Infrastruktur merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dan taraf ekonomi suatu daerah. Sepanjang tahun 2019, total pembangunan dan peningkatan jalan provinsi adalah 89,16 kilometer. Berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Sumatera Utara, dari 3.005,65 kilometer jalan provinsi, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melakukan pemeliharaan rutin jalan sepanjang 2.141 kilometer. Jalan yang dibangun di antaranya untuk mendukung kelancaran akses menuju kawasan wisata Tangkahan sepanjang 2 kilometer, jalan menuju Bukitlawang sepanjang 4 kilometer, dan jalan di kawasan Danau Toba melalui akses Rawasaring sepanjang 8,9 kilometer. Selain itu, Pemprov Sumut juga membuka kawasan akses terisolasi menuju

Danau Toba dengan membangun jalan pada ruas Jalan Aek Kotabatu – Batas Tobasa – Batas Labura – Parsoburan–Silimbat sepanjang 5,5 kilometer.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga akan meningkatkan akses jalan ke perbatasan antar provinsi seperti Provinsi Riau pada ruas Jalan Gunungtua – Binanga – Sibuhuan – Ujungbatu – Batas Riau sepanjang 5 kilometer. Perbatasan dengan Sumatera Barat pada ruas Jalan Muarapungkut – Simpangbanyak – Batas Sumatera Barat sepanjang 7,6 kilometer.

Rasio elektrifikasi

Kebutuhan tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara terus meningkat sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan industri serta penambahan penduduk. Listrik merupakan bentuk energi yang paling bermanfaat dan tepat bagi kehidupan manusia moderen seperti sekarang ini, dimana energi listrik mempunyai satu fungsi fundamental yang dapat memberikan suatu kebutuhan atau pelayanan daya listrik yang diperlukan oleh konsumen. Untuk mengatasi berkurangnya pasokan energi, maka Negara telah dan akan membangun pusat pembangkit listrik yang berdaya besar. Daya listrik tersebut akan disalurkan ke pusat beban melalui saluran transmisi dan saluran distribusi.

Ketersediaan energi listrik daerah dapat dilihat dari 2 sisi yang berbeda, yaitu :

1) Sisi Pasokan (*Supply side*) Energi Listrik

Sistem kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara terdiri dari sistem dengan transmisi 150 kV dan 275 kV serta distribusi 20 kV. Interkoneksi sistem tenaga listrik di Provinsi Sumatera Utara merupakan bagian dari sistem Sumatera Bagian Utara

(SUMBAGUT) PT. PLN (Persero) yang meliputi Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Interkoneksi Sumbagut dipasok dari beberapa pembangkit listrik yang pada umumnya berada di Sumatera Utara. Adapun kapasitas Pembangkit pada Tahun 2018 sebesar 3.274 MW dan pada Tahun 2019 di Sumatera Utara adalah sebesar 3.950,4MW dengan daerah pelayanan PLN Wilayah Sumatera Utara sebagai berikut:

Tabel 8.7
Sistem Kelistrikan di Provinsi Sumatera Utara

No	Area	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (KVA)	Panjang Jaringan Tegangan Menengah (Kms)	Panjang Jaringan Tegangan Rendah (Kms)	Kapasitas Trafo Terpasang (kva)	Jumlah ULP
1	Medan	702.151	2.108.161	2.499,47	3.416,49	993,141	9
2	Binjai	652.484	818.511	5.271,36	4.556,60	426,097	8
3	Sibolga	258.152	250.910	3.020,76	3.817,68	143,215	7
4	Nias	96.760	96.541	1.203,29	1.293,58	67,486	3
5	Lubuk Pakam	579.247	908.119	2.757,56	4.118,73	521,479	7
6	P. Siantar	639.369	762.191	5.258,71	6.370,88	388,141	12
7	Rantau Prapat	406.077	460.512	3.988,65	4.722,20	308,300	8
8	P. Sidimpuan	306.607	285.612	3.989,81	2.233,96	174,901	7
Jumlah		3.553.763	5.464.738	27.989,61	30.530,12	3.022.760	61

Sumber : PT. PLN Wilayah Sumatera Utara)

Cakupan Wilayah Kerja PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara meliputi seluruh daerah di Provinsi Sumatera Utara dengan luas 72.981 km². Pada wilayah kerja tersebut, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Utara melakukan kegiatan pendistribusian dan penjualan tenaga listrik untuk segmen pelanggan Sosial, Rumah Tangga, Bisnis, Industri, dan

Publik serta kegiatan pembangkitan pada daerah-daerah yang masih dilayani secara isolated dengan dipasok oleh PLTD.

Kapasitas terpasang pembangkit tenaga listrik pada interkoneksi Sumbagut pada tahun 2017 mengalami penambahan daya dikarenakan telah beroperasinya PLTG MPP Paya Pasir sebesar 3x25 MW dan MPP Nias 1x25 MW serta melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara telah memfasilitasi sampai dengan beroperasinya Marine Vessel Power Plant (MVPP) Belawan sebesar 240 MW.

Selain PT. PLN (Persero), pihak investor juga mempunyai peran dalam penyediaan kelistrikan di Sumatera Utara melalui wilayah usaha penyediaan tenaga listrik. Wilayah usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Wilayah Usaha PT. Mabar Elektrindo yang berlokasi di Kawasan Industri Medan;
- b. Wilayah Usaha PT. Perkebunan Nusantara III yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke Kabupaten Simalungun.

2) Sisi Kebutuhan (*Demand side*) Energi Listrik

Rasio Elektrifikasi Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2018 sebesar 100,73% dengan Daya listrik Terpasang 3.400 MW sedangkan pada Tahun 2019 Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara sebesar 99,11% dengan Daya Listrik Terpasang sebesar 3.950,40 MW. Penurunan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara pada tahun 2019 disebabkan oleh mekanisme perhitungan Rasio Elektrifikasi Sumatera Utara yang berbeda pada tahun 2018. Sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi, pemakaian daya listrik juga pasti

mengalami peningkatan. Untuk tahun 2018 beban puncak rata-rata sudah mencapai 1.731 MW dan daya pasok kurang lebih 2.103 MW, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 372 MW. Beban puncak sistem Sumatera bagian utara pada tahun 2019 rata-rata sudah mencapai sekitar 2224 MW dan daya mampu pasok kurang lebih 2.505,6 MW, sehingga mempunyai cadangan listrik sekitar 281,6 MW.

Untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah memberikan bantuan dengan pemasangan bantuan sambungan listrik kepada 800 rumah tangga yang tersebar di 29 Kecamatan dan 106 Desa di Provinsi Sumatera Utara dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 8.8
Bantuan Sambungan Listrik Bagi Masyarakat Tidak Mampu
Tahun Anggaran 2019

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Masyarakat
				(KK)
1	SAMOSIR	7	22	100
2	MANDAILING NATAL	3	14	100
3	TAPANULI SELATAN	7	34	100
4	NIAS	2	5	100
5	NIAS BARAT	4	7	100
6	NIAS UTARA	2	7	100
7	NIAS SELATAN	1	7	100
8	GUNUNG SITOLI	3	10	100
TOTAL		29	106	800

Sasaran Strategis 11 :

Terkendalinya inflasi. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Inflasi :

Provinsi Sumatera Utara pada Desember 2019 mengalami deflasi sebesar 0,19%. Secara kumulatif daerah ini sepanjang 2019 (Januari-Desember) mengalami inflasi 2,33%. Deflasi di Desember terjadi dampak turunnya harga cabai merah yang kerap menjadi pemicu inflasi. Akibat deflasi di Desember, inflasi kumulatif Provinsi Sumatera Utara tertekan atau menjadi 2,33% dari posisi November yang masih 2,53%. Inflasi Sumut di 2019 yang 2,33% itu masih berada pada sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang $3,5 \pm 1\%$.

Pada bulan Desember, dua daerah yang Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami deflasi yakni Medan 0,28% dan Padangsidempuan 0,13%. Sementara dua daerah lainnya mengalami inflasi yakni Kota Sibolga 0,51% dan Pematangsiantar 0,34%.

Sasaran Strategis 12 :

Terkendalinya Jumlah Penduduk. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian "*Sangat Baik*". Indikator dimaksud adalah :

Total Fertility Rate (TFR) :

Total Fertility Rate (TFR) adalah taksiran jumlah total anak yang dilahirkan oleh 1000 wanita bila para wanita tersebut secara terus menerus hamil pada saat mereka berada dalam tingkat fertilitas menurut usia mereka pada saat sekarang. Angka ini dapat menjawab pertanyaan : berapa rata-rata jumlah anak yang dapat dilahirkan seorang wanita selama masa hidupnya.

Pada tahun 2019 target Total Fertility Rate (TFR) sebesar 2.86% dan terealisasi 2,82%. Dapat diartikan bahwa setiap perempuan pada usia subur di Provinsi Sumatera Utara melahirkan tidak lebih dari 3 orang anak tapi belum cukup mencapai target program Keluarga Berencana (KB) yaitu 2 orang anak.

Jumlah angka kelahiran di Sumatera Utara sudah mengalami penurunan akan tetapi belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- 1) Penggunaan alat kontrasepsi masih rendah;
- 2) Tingginya angka putus pakai alat kontrasepsi;
- 3) Kurangnya tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB).

Sasaran Strategis 13 :

Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting yang mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat. Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memperlihatkan bagaimana penduduk mengakses hasil pembangunan. Memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) provinsi Sumatera Utara tahun 2019 sebesar 71,18 poin. Hal ini dipengaruhi oleh angka harapan hidup, angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta kemampuan daya beli di masyarakat semakin baik.

Misi 2 :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.

Misi II ini terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas. Hasil pengukuran melalui 2 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Kinerja Keuangan Daerah
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), hal ini terkait dengan target pemerintah untuk memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas 4 tahapan penilaian yaitu Laporan Keuangan harus sesuai standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal dan ketaatan perundang-undangan.

Ada 3 jenis pemeriksaan yang dilakukan sebelum dikeluarkannya opini, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan laporan keuangan untuk melihat apakah sudah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aturan ini menganut basis *accrual*, dimana aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan basis *accrual*.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan untuk Laporan Keuangan Tahun 2019 belum diterima, karena pelaksanaan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara baru dilaksanakan pada bulan Januari 2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan akan disampaikan pada bulan Mei tahun berjalan.

2) Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana target yang ditetapkan untuk Tahun 2019 adalah B. Hasil evaluasi yang diterima di tahun 2020 adalah merupakan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018. Sesuai Laporan Hasil Evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperoleh nilai 62,52 dengan Predikat “B”. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Tabel 8.9
Laporan Hasil Evaluasi AKIP

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2018	2019
1	Perencanaan Kinerja	35	19,42	20,42
2	Pengukuran Kinerja	20	11,09	14,59
3	Pelaporan Kinerja	15	9,44	11,64
4	Evaluasi Internal	10	6,30	5,88
5	Capaian Kinerja	20	9,87	9,99
6	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,12	62,52
7	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	B

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Persentase Penegakan Perda

Untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada dasarnya adalah persyaratan *absolute* yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan supaya dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan.

Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan indikator kinerja Persentase Penegakan Perda realisasi capaian sebesar 57%. Berdasarkan data yang telah dihimpun tahun 2019, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1) Jumlah pelanggaran perda yang dilaporkan dan / atau dipantau tahun 2019 sebanyak 35 kasus.
- 2) Jumlah pelanggaran perda yang diselesaikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provsu tahun 2019 sebanyak 20 kasus.

Adapun Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara Sebagai berikut:

- 1) Perda Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah;
- 2) Perda Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara;
- 3) Perda Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pemanfaatan Air Permukaan;
- 4) Pergub Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Tata Cara penggunaan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Misi 3 :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri. Misi III ini terdiri dari 1 Sasaran Strategis dan diukur melalui 1 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Angka Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas di Sumatera Utara tumbuh 1,22% pertahun selama periode 2010 hingga 2018. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Sumatera Utara yang lebih baik. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 25 tahun ke atas mencapai 9,34 tahun, atau telah menamatkan pendidikan tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP). Untuk tahun 2019, rata-rata lama sekolah mencapai target yang ditetapkan yaitu 9,79 tahun.

Misi 4 :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia. Misi IV ini terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan diukur melalui 2 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah :

Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan

tentram, tertib, dan teratur. Untuk melaksanakan itu maka dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat Sumatera Utara pada tahun 2019 lebih baik dari tahun 2018 dengan capaian 1,18 point, dimana pada tahun 2018 jumlah kasus pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan keindahan yang tertangani sebanyak 98 kali, sedangkan pada tahun 2019 menurun 15 kali menjadi 83 kali.

Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian *“Sangat Baik”*. Indikator dimaksud adalah :

Indeks Pembangunan Gender

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Capaian indeks pemberdayaan gender Provinsi Sumatera Utara tahun 2019 terealisasi 90,93% dari target yang direncanakan 90,87% yang dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu jumlah keterwakilan kaum perempuan dalam pembangunan dan akses

ekonomi serta keterwakilan perempuan di instansi pemerintahan, swasta, dan menjadi Pimpinan (pembuat keputusan) dan anggota parlemen mengalami peningkatan. Ini menunjukkan pembangunan manusia Indonesia menurut kesadaran gender menunjukkan trend perbaikan, yang tercermin dari indeks pembangunan gender yang mendekati angka 100 yang menunjukkan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Misi 5 :

Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab. Misi V ini terdiri dari 2 Sasaran Strategis dan diukur melalui 3 indikator kinerja yaitu :

Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Hasil pengukuran melalui 2 indikator kinerja dengan capaian “*Sangat Baik*”. Indikator dimaksud adalah:

1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Capaian kinerja untuk Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dipengaruhi dari capaian Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Namun capaian nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan Tahun 2019 masih rendah. Rendahnya nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi

perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya.

Tabel 8.10
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Target	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja (%)
Indeks Kualitas Udara (IKU)		86,6	
Indeks Kualitas Air (IKA)		78,80	
Indeks Tutupan Hutan (ITH)		46,45	
Total	68	68,2	102,4%

Capaian Kinerja untuk Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan dijelaskan sebagai berikut:

a. Indeks Kualitas Air

Meningkatnya kegiatan manusia akan memberikan kontribusi besar terhadap makin berkurangnya air yang layak untuk dimanfaatkan. Pembuangan limbah dari kegiatan manusia dapat menyebabkan pencemaran air sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali tanpa pengolahan lebih lanjut. Isu pencemaran, kelangkaan air bersih, banjir, merupakan keseharian yang sering kita dengarkan hampir di setiap wilayah di Indonesia. Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sampai saat ini masih belum optimal untuk mengatasi hal tersebut.

Untuk mengukur kualitas air digunakan suatu nilai yang disebut Indeks Kualitas Air (IKA). Indeks Kualitas Air adalah indikator yang menunjukkan tingkat kualitas air di suatu

wilayah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Baku mutu air yang digunakan untuk penghitungan ini adalah baku mutu air kelas 1 & 2 sesuai dengan Lampiran Kriteria Mutu Air Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran Air dan Pengelolaan Kualitas Air dengan 7 parameter yang dihitung yaitu BOD, COD, TSS, DO, fosfat, fecal coli, dan total coliform.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Air Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 :

- Metode perhitungan Indeks Kualitas Air didasarkan pada metode perhitungan Indeks Pencemar Air Sebagaimana terdapat pada Kepmenlh 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
- Parameter yang wajib dianalisa meliputi: TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform;
- Baku Mutu Acuan adalah Kelas I dan II PP No. 82 Tahun 2001;
- Badan air yang dinilai meliputi 1 Danau yaitu Danau Toba dan 8 sungai yaitu Sungai Asahan, Sungai Bah Bolon, Sungai Padang, Sungai Percut, Sungai Wampu, Sungai Deli, Sungai Belawan dan Sungai Batang Toru. Pada pemantauan Sungai parameter Fecal Coli tidak ikut dipantau sedangkan pada pemantauan Danau parameter Fecal Coli dan Total Coli tidak turut dipantau disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana.
- Nilai Indeks Kualitas Air Tahun 2019 adalah: 78,80
Nilai Indeks Kualitas Air dipengaruhi oleh berbagai variabel antara

b. Indeks Kualitas Udara

Pertambahan penduduk menjadi faktor utama penurunan kualitas udara. Selain lokasi, kualitas udara dipengaruhi oleh sumber pencemar, polutan, serta meteorologi dan topografi. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber, baik dari proses alam diantaranya letusan gunung berapi dan kebakaran hutan ataupun akibat aktivitas manusia yang menghasilkan polutan seperti transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil, industri, pembangkit listrik, timbunan sampah dan penebangan liar. Untuk melihat kondisi kualitas udara di Indonesia salah satunya dengan menghitung Indeks Kualitas Udara (IKU). Indeks Kualitas Udara merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual pencemar udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat umum.

Indeks Kualitas Udara Provinsi dihitung berdasarkan data konsentrasi rata-rata tahunan parameter pencemar udara berupa SO₂ dan NO₂ dari hasil pengukuran kualitas udara ambien kabupaten/kota. Pengukuran kualitas udara ambien dilakukan pada daerah yang mewakili wilayah industri, pemukiman, transportasi, dan perkantoran. Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan dengan menggabungkan hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara yaitu Dairi, Tapanuli Selatan, Tobasa, Langkat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tebing Tinggi, dan Padangsidimpuan dimana metoda pengukurannya adalah

passive sampler untuk mendapatkan nilai Indeks Kualitas Udara.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara adalah :

- Gambaran kualitas udara ambien diperoleh melalui analisa parameter SO₂ dan NO₂. Pengukuran parameter SO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran tentang emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar solar serta bahan bakar lain yang mengandung sulfur sedangkan parameter NO₂ dimaksudkan untuk memberi gambaran emisi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berbahan bakar bensin.
- Metode penghitungan Indeks Kualitas Udara dilakukan dengan *passive sampler*.
- Pengukuran dilakukan pada beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Utara seperti Dairi, Tapanuli Selatan, Tobasa, Langkat, Humbang Hasundutan, Samosir, Tebing Tinggi, dan Padangsidimpuan. Pengukuran dilakukan mewakili lokasi pemukiman, industri, transportasi serta perkantoran.
- Nilai Indeks Kualitas Udara adalah : 86,60.

c. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Kualitas tutupan lahan (*land cover*) mendeskripsikan kondisi kenampakan permukaan lahan secara fisik, baik kenampakan alami berupa vegetasi maupun kenampakan buatan manusia. Kualitas tutupan lahan saat ini diukur berdasarkan keberadaan hutan sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi

mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam klasifikasi penutupan lahan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan – KLHK, tutupan hutan meliputi hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa primer, hutan rawa sekunder dan hutan tanaman.

Metode yang dilakukan untuk menghitung Indeks Kualitas Udara :

- Perhitungan Indeks Kualitas Tutupan lahan (IKTL) dilakukan dengan mengakumulasi Luas Tutupan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada Kawasan Hutan, Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan sungai dengan kemiringan lereng >25% dan Luas Semak Belukar dan Semak Belukar Rawa pada sempadan danau dengan kemiringan lereng >25%.
- Berdasarkan Peta Tutupan Lahan Provinsi Sumatera Utara tahun 2018, yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara, yang diterima tahun 2019, diperoleh informasi sebagai berikut :
 - a) Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan hutan;
 - b) Jenis dan luas tutupan lahan pada kawasan budidaya;
 - c) Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan sungai;
 - d) Jenis dan luas tutupan lahan pada sempadan danau.
- Berdasarkan klasifikasi penjelasan kualitatif terhadap rentang nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018 (sumber: IKLH

Indonesia 2018), bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKTL) adalah 46,45 mengandung arti bahwa kualitas tutupan lahan Provinsi Sumatera Utara berada dalam kategori “Sangat Kurang Baik” ($40 \leq IKLH < 50$). Oleh karena itu, indeks kualitas tutupan lahan perlu difokuskan pada perbaikan dan peningkatan kualitas tutupan lahan pada tahun mendatang;

- Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya.
- Kualitas tutupan lahan dapat ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

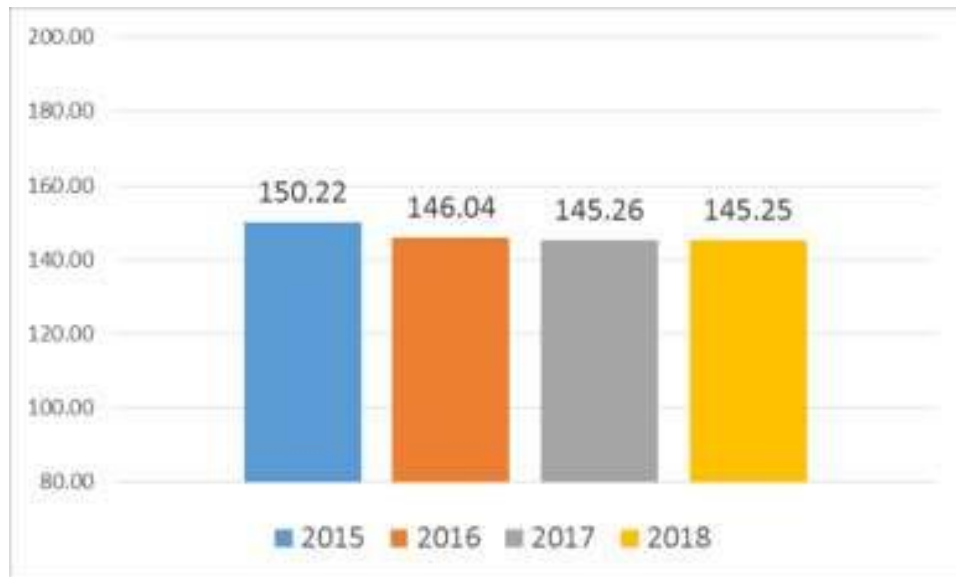
2) Indeks Resiko Bencana

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunungapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumon. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunungapi aktif. Salah satunya adalah

Gunung Sinabung yang meletus sejak tahun 2013 dan menyebabkan masyarakat mengungsi hingga saat ini.

Kajian risiko bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerabilities*), dan kapasitas (*capacities*). Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah : (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2018, Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks risiko tinggi yaitu 145,25.

Gambar 8.2
Indeks Risiko Bencana Sumatera Utara



Tabel 8.11
Indeks Resiko Bencana Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara

NO.	KABKOTA	2015	2016	2017	2018	KELAS RISIKO 2018
1	KOTA GUNUNGSITOLI	215.60	215.60	215.60	215.60	TINGGI
2	MANDAILING NATAL	214.80	214.80	214.80	214.80	TINGGI
3	NIAS	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
4	NIAS UTARA	214.00	214.00	214.00	214.00	TINGGI
5	NIAS BARAT	210.80	210.80	210.80	210.80	TINGGI
6	NIAS SELATAN	202.00	202.00	202.00	202.00	TINGGI
7	TAPANULI TENGAH	191.20	191.20	191.20	191.20	TINGGI
8	TAPANULI SELATAN	186.00	186.00	186.00	186.00	TINGGI
9	ASAHAN	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
10	KOTA SIBOLGA	167.20	167.20	167.20	167.20	TINGGI
11	LABUHANBATU UTARA	155.20	155.20	155.20	155.20	TINGGI
12	PADANG LAWAS	154.00	154.00	154.00	154.00	TINGGI
13	LABUHANBATU	151.20	151.20	151.20	151.20	TINGGI
14	BATU BARA	143.20	143.20	143.20	143.20	SEDANG
15	LANGKAT	155.20	148.50	143.54	140.68	SEDANG
16	SERDANG BEDAGAI	140.00	140.00	140.00	140.00	SEDANG
17	PADANG LAWAS UTARA	138.00	138.00	138.00	138.00	SEDANG
18	LABUHANBATU SELATAN	131.20	131.20	131.20	131.20	SEDANG
19	HUMBANG HASUNDUTAN	130.00	130.00	130.00	130.00	SEDANG
20	KOTA PADANG SIDIMPUAN	128.00	128.00	128.00	128.00	SEDANG
21	DAIRI	127.60	127.60	127.60	127.60	SEDANG
22	DELI SERDANG	155.20	113.00	108.28	121.73	SEDANG
23	KARO	154.00	136.71	125.24	120.99	SEDANG
24	TAPANULI UTARA	118.00	118.00	118.00	118.00	SEDANG
25	SAMOSIR	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
26	KOTA TANJUNG BALAI	114.00	114.00	114.00	114.00	SEDANG
27	PAKPAK BHARAT	112.00	112.00	112.00	112.00	SEDANG
28	TOBA SAMOSIR	107.20	107.20	107.20	107.20	SEDANG
29	KOTA BINJAI	103.20	103.20	103.20	103.20	SEDANG
30	KOTA TEBING TINGGI	101.60	101.60	101.60	101.60	SEDANG
31	KOTA MEDAN	155.20	103.55	100.61	93.77	SEDANG
32	KOTA PEMATANGSIANTAR	91.20	91.20	91.20	91.20	SEDANG
33	SIMALUNGN	95.20	75.03	73.59	73.59	SEDANG

*Catatan : nilai indeks risiko yang tidak mengalami perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan

Sasaran Strategis 2 :

Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata. Hasil pengukuran melalui 1 indikator kinerja dengan capaian “Sangat Baik”. Indikator dimaksud adalah :

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 4 pintu masuk pada bulan Desember 2019 mencapai 24.113 kunjungan, mengalami kenaikan 7,94% dibanding yang datang pada bulan November 2019 mencapai 22.340 kunjungan. Demikian juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun 2018, jumlah wisman pada bulan Desember 2019 mengalami kenaikan 10,68 % dari 21.787 kunjungan pada bulan Desember 2018 menjadi 24.113 kunjungan. Kenaikan kunjungan jumlah wisman tertinggi pada bulan Desember 2019 dibanding bulan sebelumnya terjadi pada pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai Asahan sebesar 89,86%, jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Silangit mengalami kenaikan 14,31% dan jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Kualanamu Internasional naik 6,77. Sedangkan jumlah kunjungan wisman melalui Pelabuhan Laut Belawan turun sebesar 100,00%.

Selama Desember 2019 jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara mencapai 24.113 kunjungan, naik 10,68% dibanding jumlah wisman pada periode yang sama tahun 2018. Kenaikan terbesar terjadi pada jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Pelabuhan Laut Tanjungbalai sebesar 18,82% dan kunjungan wisman melalui pintu masuk Bandara Internasional Kualanamu naik sebesar 12,35%. Sementara itu jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Bandar Udara Silangit turun sebesar 15,10% dan jumlah wisman yang datang melalui pintu masuk Belawan turun sebesar 100,00%.

Dari sepuluh negara pasar utama wisman pada Desember 2019, Malaysia masih mendominasi jumlah wisman yang datang di Sumatera Utara yaitu 54,25%, diikuti oleh Singapura 7,56%, Tiongkok 4,53%, Belanda 3,55%, Australia 1,54%, Jerman 1,28%, India 1,13%, Inggris 1,10%, Amerika Serikat 0,97% dan Taiwan 0,81%. Jumlah wisman dari sepuluh negara tersebut adalah 76,72% dari total kedatangan wisman di Sumatera Utara.

Kenaikan jumlah kunjungan wisman ke Sumatera Utara bulan Desember 2019 terhadap November 2019 yang mencapai 7,94%, searah dengan total kunjungan wisman yang masuk ke Indonesia bulan Desember 2019 yang mengalami kenaikan sebesar 6,66% atau dari 1.291.117 bulan November 2019 menjadi 1.377.067 kunjungan pada bulan Desember 2019.

D. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan target jangka menengah yang ada pada dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

Tabel 8.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kerukunan umat beragama					
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	77	76,30	99,09
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan					
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,4	89,6	99,19
Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan kesejahteraan petani					
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	100,10	99,08	98,98
Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan kualitas hunian kawasan permukiman					
1	Rasio rumah layak huni	Persen	92,72	93,18	100,46
Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat					
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	68,74	68,74	100
Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran					
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,5	100
Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi					
1	Pertumbuhan PDRB	Persen	5,3	5,11	96,42
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan					
1	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	97,29
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan					
1	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	102,52
Sasaran Strategis 10 : Meningkatkan infrastruktur dasar					
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	82,99	82,19	99,04
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,90	99,11	99,21
Sasaran Strategis 11 : Terkendalinya inflasi					
1	Inflasi	Persen	2,95	2,33	126,61
Sasaran Strategis 12 : Terkendalinya Jumlah penduduk					
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	2,86	2,82	98,60
Sasaran Strategis 13 : Meningkatkan derajat kualitas hidup sosial masyarakat					
1	IPM	Poin	71,12	71,18	100,08
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola yang berintegritas					
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	WTP	-	
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	B	B	100
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat					
1	Persentase penegakan Perda	Persen	45	57	127
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan					
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	9,79	9,79	100
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan dunia					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan					
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	0,90	1,18	131
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan					
1	Indeks pembangunan gender	Poin	90,87	90,93	100,07
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab					
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	68,00	68,2	103,3
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	145	145,25	
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata					

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Jangka Menengah 2019	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	280.000	1.377.016	492

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah dapat terealisasi dengan sangat baik.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan standar nasional adalah sebagai berikut :

Tabel 8.13.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Standar Nasional	Realisasi
			2019	2019
Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan kerukunan umat beragama				
1	Indeks Kerukunan umat beragama	Poin	73,83	76,30
Sasaran Strategis 2 : Terpenuhinya kecukupan gizi dan terpenuhinya bobot kelompok pangan				
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	92,5	89,6
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kesejahteraan petani				
1	Nilai Tukar Petani (NTP)	Skor	104,46	
Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas hunian kawasan permukiman				
1	Rasio rumah layak huni	Persen	NA	
Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,39	68,74

Sasaran Strategis 6 : Menurunnya tingkat pengangguran				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen		
Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi				
1	Pertumbuhan PDRB	Persen		
Sasaran Strategis 8 : Menurunnya angka kemiskinan				
1	Persentase Kemiskinan	Persen	9,66	8,63
Sasaran Strategis 9 : Menurunnya tingkat ketimpangan pendapatan				
1	Indeks Gini	Poin		
Sasaran Strategis 10 : Meningkatnya infrastruktur dasar				
1	Tingkat kemantapan jalan Provinsi	Persen	NA	82,19
2	Rasio Elektrifikasi	Persen	NA	99,11
Sasaran Strategis 11 : Terkendalinya inflasi				
1	Inflasi	Persen	2,72	2,33
Sasaran Strategis 12 : Terkendalinya Jumlah penduduk				
1	Total Fertility Rate (TFR)	Nilai	NA	2,82
Sasaran Strategis 13 : Meningkatnya derajat kualitas hidup sosial masyarakat				
1	IPM	Poin	70 – 80	71,18
Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya tata kelola yang berintegritas				
1	Opini BPK terhadap laporan kinerja keuangan daerah	Opini	-	-
2	Nilai sistem akuntabilitas instansi pemerintah (SAKIP)	Predikat	-	B
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat				
1	Persentase penegakan Perda	Persen	NA	57
Misi 3 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan				
1	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun		
Misi 4 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi				

teladan di Asia Tenggara dan dunia				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan				
1	Indeks ketentraman dan ketertiban masyarakat	Poin	NA	1,18
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Implementasi pengarusutamaan Gender dalam pembangunan				
1	Indeks pembangunan gender	Poin	NA	
Misi 5 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab				
Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	NA	68,2
2	Indeks Resiko Bencana	Poin	NA	145,25
Sasaran Strategis 2 : Terciptanya masyarakat yang berbudaya sesuai dengan norma adat istiadat dalam meningkatkan daya saing sektor pariwisata				
1	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara	Orang	NA	1.1377.016

2. Keberhasilan dan Permasalahan/Kegagalan Kinerja

2.1 Keberhasilan

Faktor penyebab keberhasilan pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan sasaran misi adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam upaya mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh :
 - a. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
 - b. Program Pemasaran dan Pengolahan Hasil;

- c. Program Peningkayan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT).

Guna meningkatkan keragaman pola pangan dapat tercapai didukung oleh program : Peningkatan Ketahanan Pangan dan Diversifikasi Pangan. Rumah layak huni didukung oleh program : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Pengembangan Perumahan. Dalam rangka mewujudkan kesehatan yang prima didukung :

- a. Program obat dan perbekalan kesehatan;
- b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Program perbaikan gizi masyarakat;
- e. Program pengembangan lingkungan sehat;
- f. Program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- g. Program peningkatan pelayanan kesehatan Rumah Sakit, Rumah Sakit Khusus, Laboratorium Kesehatan;
- h. Program pengembangan sumber daya kesehatan;
- i. Program kebijakan dan manajemen kesehatan;
- j. Program pembinaan pelayanan kesehatan;
- k. Program jaminan pemeliharaan kesehatan.

Untuk mewujudkan kestabilan harga di masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara didukung oleh Program peningkatan kapasitas kelembagaan Pemerintah daerah. Meningkatkan jumlah dan kualitas wirausahawan, difasilitasi dengan peningkatan penjualan produksi KUKM dan peningkatan sarana usahanya sekaligus meningkatkan mutu produknya dengan memberikan sertifikat Hak atas Kekayaan Intelektual, sertifikasi Halal dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).

- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melibatkan berbagai pihak secara terintegrasi. Sistem pemerintahan tidak akan berjalan optimal apabila lembaga tidak didukung oleh partisipasi aktif oleh elemen masyarakat. Lalu, untuk mencapainya diperlukan kesadaran serta pengetahuan agar masyarakat dapat berpikir kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan. Selain itu, guna memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya rasa berbangsa dan bernegara perlu diberikan pembekalan wawasan kebangsaan sehingga diharapkan dapat menumbuhkan rasa persaudaraan dan rasa kebersamaan. Untuk mewujudkannya didukung oleh :
- a. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara;
 - b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - c. Program Pendidikan Politik Masyarakat.
- 3) Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Kesenjangan tingkat pendidikan penduduk dirasakan masih cukup besar, terutama tingkat pendidikan penduduk perkotaan dan perdesaan. Hal tersebut disebabkan, antara lain, oleh ketersediaan fasilitas pelayanan pendidikan, khususnya untuk jenjang pendidikan menengah pertama ke atas. Di samping itu, fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa belum tersedia secara memadai.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan dengan didukung :

- a. Program Pembinaan Pendidikan Khusus;
- b. Program Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- c. Program Sekolah Menengah Kejuruan;
- d. Program Pembinaan dan Ketenagaan;
- e. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Lainnya.

4) Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dengan menurunnya kasus judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan dan meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, yang didukung :

- a. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindakan Kriminal;
- b. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga;
- c. Program peningkatan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak.

5) Masalah lingkungan hidup merupakan kewajiban asasi manusia untuk dikelola sebagaimana mestinya menurut amanah Tuhan yang Maha esa, sehingga setiap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab terhadap kelangsungan lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan suatu hubungan yang terjalin antara seluruh benda, daya, dan kondisinya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan hal yang ada di sekitarnya. Yang termasuk dalam suatu hubungan ini ialah manusia dan tingkah lakunya. Maka dari itu, jika lingkungan hidup rusak, kualitas lingkungan hidupnya pun akan turun, kalau

kualitas lingkungan hidup menurun akan muncul berbagai masalah.

Untuk memajukan pariwisata Sumatera Utara, kemudahan akses infrastruktur, amenities, promosi dan pelaku bisnis perlu menjadi perhatian guna mengembangkan sektor pariwisata. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan pemerintah sebagai kawasan strategis pariwisata.

Keberhasilan misi ini dicapai dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

- a. Program pengendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup;
- b. Program pemasaran pariwisata;
- c. Program destinasi pariwisata;
- d. Program pengembangan kepariwisataan.

BAB IX

PENUTUP

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 merupakan manifestasi pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pembangunan di daerah selama 1 tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat sebagai realisasi dari dokumen perencanaan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019.

Penyampaian Ringkasan LPPD ini sebagai perwujudan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian program dan kegiatan serta permasalahan dan pemecahan masalahnya. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2019 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini selain sebagai masukan dari masyarakat dalam memberikan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan, juga menjadi bahan pertimbangan sekaligus memberikan arti tersendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Secara keseluruhan pencapaian dari seluruh bidang adalah sangat baik. Beberapa bidang bahkan telah menghasilkan capaian yang telah melebihi target yang telah ditetapkan pada RPJMD. Namun terdapat beberapa bidang yang masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan pada RPJMD dan akan menjadi perhatian utama didalam pengembangan kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di masa depan.

Beberapa hasil capaian pada bidang pendidikan dan kesehatan adalah peningkatan usia harapan hidup dan peningkatan rata-rata lama sekolah. Pertumbuhan yang positif terutama pada peningkatan rata-rata lama sekolah merupakan modal penting didalam membangun kualitas sumber daya manusia Provinsi Sumatera Utara yang lebih baik. Peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan juga telah meningkatkan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam bidang ekonomi berbagai kemajuan yang telah dicapai adalah pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan inflasi yang rendah. Pertumbuhan PDRB terutama ditopang oleh sektor informasi dan komunikasi dari segi produksi dan sektor pengeluaran konsumsi pemerintah (PK-P) dari sisi pengeluaran. Inflasi Provinsi Sumatera Utara adalah lebih baik jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Inflasi yang rendah dan stabil memberikan dampak positif pada perekonomian dan menguatkan daya beli masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Inflasi yang rendah dan stabil terutama didorong oleh stabilnya harga pangan di Provinsi Sumatera Utara.

Berbagai kemajuan lainnya dalam bidang ekonomi adalah menurunnya pengangguran terbuka dan meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Jumlah angkatan kerja mengalami peningkatan dari

tahun sebelumnya, namun pertumbuhan pada sektor perekonomian telah berhasil didalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Peningkatan TPAK terutama didukung peningkatan pada industri pertanian, akomodasi dan transportasi.

Berbagai pencapaian lain adalah peningkatan rasio rumah layak huni, peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, menurunnya kesenjangan gender, tingginya kerukunan beragama dan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara. Peningkatan rasio rumah layak huni terutama disebabkan oleh program rehabilitasi rumah rakyat yang telah dilaksanakan di beberapa kabupaten dan kota. Kerukunan umat beragama yang tinggi dan lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional memperlihatkan keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing di Provinsi Sumatera Utara. Menurunnya kesenjangan gender menunjukkan pembangunan manusia di Provinsi Sumatera Utara menunjukkan trend perbaikan dengan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Peningkatan sektor pariwisata terlihat dari pesatnya pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara yang didominasi oleh wisatawan manca negara yang berasal dari Malaysia, Singapura, Tiongkok, Belanda dan Australia. Pertumbuhan pada sektor pariwisata juga telah menimbulkan multiplier effect yang positif kepada sektor lainnya terutama pada sektor transportasi. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan terus memajukan pariwisata Sumatera Utara melalui peningkatan kemudahan akses infrastruktur, amenities, promosi dan pelaku bisnis. Promosi khususnya untuk kawasan wisata Danau Toba yang dijadikan sebagai kawasan strategis pariwisata.

Selain berbagai kemajuan yang telah dicapai kami juga menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian utama untuk diperbaiki pencapaiannya di masa depan. Didalam bidang ekonomi, walaupun persentase kemiskinan sudah menurun akan tetapi proporsinya masih cukup tinggi. Selain itu terdapat ketimpangan ekonomi yang meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya walaupun angka Gini Ratio telah memenuhi target yang telah ditetapkan didalam RPJMD. Salah satu penyebab meningkatnya ketimpangan ekonomi adalah tingginya laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara terutama pada daerah perkotaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berfokus kepada pemerataan ekonomi di masa depan terutama dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui penguatan program pendidikan.

Provinsi Sumatera Utara memiliki indeks resiko bencana yang tinggi. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang mempunyai potensi besar terjadinya bencana alam, seperti bencana gempa bumi dan letusan gunung berapi. Hal ini disebabkan karena Provinsi Sumatera Utara mempunyai 4 ruas patahan yang menjadi sumber gempa, yakni patahan renun, patahan toru, patahan angkola dan patahan barumun. Selain itu, di wilayah Sumatera Utara terdapat beberapa gunung berapi aktif dan salah satunya adalah Gunung Sinabung yang meletus tahun 2013. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan terus memperkuat unsur ketahanan daerah seperti kelembagaan, kapasitas mitigasi, pencegahan, dan lainnya.

Pola pangan harapan (PPH) Provinsi Sumatera Utara masih belum tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk masih belum beragam, bergizi dan berimbang antar kelompok pangan. Hal ini juga menandakan bahwa konsumsi masyarakat terhadap kelompok bahan pangan masih belum bervariasi. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera

Utara akan berfokus kepada program peningkatan ketahanan pangan dan diversifikasi pangan di masa depan untuk dapat meningkatkan PPH.

Dalam bidang lingkungan, indeks Kualitas Lingkungan Hidup telah mengalami peningkatan dan capaian yang sangat baik. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup terutama disebabkan peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU). Akan tetapi Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), sebagai salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, capaiannya masih rendah. Tidak tercapainya target nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) Sumatera Utara disebabkan karena berkurangnya luasan hutan primer dan hutan sekunder dimana terdapat banyak hutan yang telah dialih fungsikan menjadi perkebunan, bangunan, gedung, perumahan, sarana prasarana umum, jalan dan sebagainya. Kualitas tutupan lahan akan ditingkatkan dengan mempertahankan luasan kawasan berfungsi lindung, rehabilitasi kawasan berfungsi lindung yang terdegradasi, kegiatan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan, penghijauan untuk ekosistem darat dan rehabilitasi untuk ekosistem pesisir seperti mangrove.

Terhadap berbagai kemajuan yang telah dicapai tentu akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan dimasa-masa yang akan datang, dan kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusi dalam pencapaian terbaik dalam proses pembangunan Sumatera Utara. Disisi lain kita juga menyadari bahwa belum semua urusan pemerintahan mencapai peningkatan kinerja seperti yang diharapkan, ada beberapa bidang yang akan menjadi perhatian kita di masa yang akan datang agar pencapaiannya dapat lebih baik. Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Utara akan terus meningkatkan kerjasama dan sinergitas yang baik dari semua pihak terutama dengan legislatif dan Pemerintahan Pusat untuk dapat membangun desa menata kota untuk mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan, semoga dapat menjadi bahan untuk memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara.

Semoga Allah S.W.T melindungi dan memberikan kekuatan kepada kita semua.

GUBERNUR SUMATERA UTARA



EDY RAHMAYADI